



**PIDANA PENGAWASAN
SEBAGAI SANKSI NON CUSTODIAL
DALAM KEBIJAKAN LEGISLATIF
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ETTY CHRISTIANI, SH

NIM : B 4A000029

PEMBIMBING

PROF.DR BARDA NAWAWI ARIEF, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**PIDANA PENGAWASAN
SEBAGAI SANKSI NON CUSTODIAL
DALAM KEBIJAKAN LEGISLATIF
DI INDONESIA**

Oleh :

ETTY CHRISTIANI, SH
NIM : B 4A000029

Dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal : 23 Desember 2002

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Barda N. Arief, SH
NIP : 130.350.519



Mengetahui

Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda N. Arief, SH
NIP : 130.350.519

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan dibidang hukum. Kemajuan dibidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukumnya, karena hukum sebagai salah satu tiang utama untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia mengandung tiga persoalan pokok yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana.

Khusus mengenai pidana ada perkembangan untuk mencari alternatif pidana penjara. Hal ini sebagaimana direkomendasikan oleh *Sub Committee II The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, The Consultative Assembly of the Council of Europe* dan Hasil Kongres PBB ke-8 berupa diterimanya aturan standar minimum untuk tindakan-tindakan *non custodial* yang disebut *Tokyo Rules*. Tindakan *non custodial* yang disebutkan dalam *Tokyo Rules* khususnya pada tahap peradilan dan pemidanaan salah satu bentuknya adalah *probation and judicial supervision*.

Dalam Konsep KUHP 1999/2000, jenis sanksi *probation* atau pidana pengawasan dirumuskan dalam Pasal 60 sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi orang dewasa dan Pasal 109 sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi anak yang dikategorikan dalam "pidana dengan syarat". Pidana pengawasan juga dirumuskan sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 angka (2) huruf d. Ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai salah satu sanksi *non custodial* dalam kebijakan legislatif di Indonesia berupa 1) Konsep KUHP 1999/2000 antara lain sebagai alternatif pidana penjara, mencegah terjadinya stigma, rehabilitasi dan resosialisasi dll, sedangkan 2) UU No. 3 Tahun 1997 berdasarkan risalah DPR RI dapat diketahui bahwa ide dasar tersebut adalah untuk mengantisipasi KUHP Baru, alternatif pidana penjara dan memberi perlindungan atau pendidikan bagi anak. Ide-ide tersebut diatas yang diwujudkan dalam kebijakan legislatif pada saat ini masih mengandung banyak kelemahan dalam formulasinya. Oleh karena itu dalam rangka *Ius Constituendum*, perumusan pidana pengawasan dalam kebijakan legislatif yang ada sekarang berupa Konsep KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 perlu direvisi dengan terlebih dahulu melakukan studi komparatif dengan beberapa KUHP Asing yang juga merumuskan pidana pengawasan di dalamnya yang meliputi jenis/sistem, syarat-syarat, masa percobaan/masa pengawasan serta pelaksanaan dari pidana pengawasan itu sendiri.

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia should of development in any fields. Law development is a case of point. The progress in law development marked by the efforts to reform the law, since it is believed as one of fundamental factors to guarantee orderliness in the society. Law reform in Indonesia, especially criminal law, consists of three main points viz: criminal offence; person who to commit crime, and the punishment itself.

In trying to alternative imprisonment sentence to offender, there is an alternative sanction. It was recommended by Sub Committee II The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, The Consultative Assembly of the Council of Europe and the results of The Eighth United Nations Congress which accepted minimum standard rules for non custodial measures namely Tokyo Rules. The one type of non custodial sentence, especially in trial and sentencing stage, is probation and judicial supervision.

In the concept of Indonesian Penal Code 1999/2000, the kind probation sentence is stated in article 60 as the kind of principal punishment for adult and in article 109 for children which categorized in "conditional sentence". Probation is also stated as the kind of principal punishment for adult and in UU No. 3/1997 article 23 number (2) letter d. The basic idea of taking/recommending probation as one kind of non custodial sentence in legislative policy in Indonesia are 1) The Concept of Indonesian Penal Code 1999/2000 as a alternative to imprisonment sentence, to prevent a stigma, rehabilitation, and resocialitation, etc. whereas 2) in UU No. 3/1997 based on the article of DPR RI, we know that the basic idea is to anticipate the new Indonesian Penal Code, as a alternative to imprisonment sentence and gives prevention or education for children. These ideas above which implemented in legislative policy has weakness in its formulation. Therefore, in the attempts of *Ius Constituendum*, the formulation of probation sentence in legislative policy (both the concept of Indonesian Penal Code and UU No. 3/1997) should be revised beforehand by doing comparative study with severals foreign Penal Code which formulate probation sentence in which including the kinds/systems, conditionals, probation period and the execution of probation sentence itself.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Pengenalan diri selalu berdimensi waktu, Masa lampau adalah sejarah dan kenangan, Masa kini adalah realita dan kenyataan yang hadir, Masa depan adalah harapan dan tantangan.
2. Barang siapa lupa akan yang indah, dia akan menjadi jahat dan barangsiapa lupa akan apa yang jelek, dia akan menjadi bodoh.

Kupersembahkan kepada :

- Negara, Bangsa dan Agamaku.
- Ayah, Ibu dan Yoki Adikku tercinta
yang selalu berdoa untuk kelancaran
studiku.
- Sahabatku yang telah banyak
menolongku.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan Rahmat dan BerkatNya, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul :

“PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI SANKSI NON CUSTODIAL DALAM KEBIJAKAN LEGISLATIF DI INDONESIA”

Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Ir Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr Barda Nawawi Arief selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing, yang penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini.

3. Budiharto, SH, MS selaku Sekretaris Bidang Akademik yang dengan penuh perhatian dan kesabaran bersedia mendengarkan dan menjawab pertanyaan seputar proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang.
4. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan memberikan pencerahan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum.
5. Paulus Hadisuprpto, SH, MH selaku reviewer sekaligus dosen penguji dan Eko Sponyono, SH, MH selaku reviewer, dosen pendamping seminar dan dosen penguji yang penuh kesabaran membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. Para Staf dan Karyawan di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang yang dengan baik hati membantu penulis selama menempuh studi di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para Staf dan Karyawan di lingkungan DPR RI Jakarta, BHPN dan Dirjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI yang penuh kesabaran membantu penulis mencari bahan yang diperlukan bagi penyusunan tesis ini serta karyawan di lingkungan Mess Pemda Jawa Tengah di Jalan Darmawangsa yang telah memberikan tempat untuk menginap selama penulis melakukan penelitian di Jakarta.

8. Eyang Kakung dan Eyang Putri serta seluruh sanak saudara yang memberikan dukungan moril kepada penulis sejak penulis terlahir ke dunia ini hingga sekarang ini tercatat sebagai mahasiswa program magister ilmu hukum UNDIP Semarang.
9. Ayah yang sabar dan bijaksana yang selalu membantu dalam doa, memberikan dukungan berupa moril maupun materiil selama penulis menempuh studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP dan ibu tercinta dalam sakitnya selalu mendampingi penulis memberikan restunya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra putrinya. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada beliau berdua tercinta untuk dapat mendampingi dan menyaksikan keberhasilan kami putra putrinya. Amin.
10. Adikku Yoki Imam Subhekti, satu-satunya saudara kandungku tercinta yang selalu memberikan dukungan moril kepada peneliti, tempat berbagi rasa dan cerita baik dalam suka maupun duka semoga sukses dalam menempuh studinya di Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
11. Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata khususnya Hadiyono, SH, MH, Yuni Wahono, SH, MH dan Marcella Elwina, SH, CN, yang memberikan dukungan moril kepada penulis sejak duduk di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sampai dengan sekarang tercatat sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

12. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Program Kajian Sistem Peradilan Pidana (Pagi) dan rekan-rekan penulis pada saat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang dengan tulus memberi dukungan kepada penulis selama menempuh studi sampai dengan penyusunan tesis ini.
13. Petugas keamanan di lingkungan Universitas Diponegoro yang memberikan rasa aman selama penulis menempuh studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
14. Bapak dan Ibu pengelola warung makan di lingkungan UNDIP Semarang yang menyediakan makanan dan minuman pada saat penulis lapar dan dahaga.
15. Bapak Sopir Angkutan Kota dan abang becak yang dengan penuh tanggungjawab mengantarkan penulis selama dua setengah tahun ini menempuh studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
16. Mbak-mbak di tempat fotocopy yang dengan penuh kesabaran membantu mengcopy bahan yang diperlukan.
17. Karyawan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang dengan baik hati melayani peminjaman buku kepada penulis selama menyusun tesis ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya, dan almamater tercinta pada khususnya.

Semarang, Desember 2002

Penulis

ETTY CHRISTIANI, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
A. Kebijakan Legislatif Dalam Tahapan/Strategi Pemidanaan... ..	18
B. Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Non Custodial.....	32
B.1. Sanksi Non Custodial	32
B.2. Pengertian Pidana Pengawasan.....	54
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 67
A. Ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai salah satu sanksi non custodial dalam kebijakan legislatif di Indonesia	67
A.1. Dalam UU No. 3 Tahun 1997	67
A.2. Dalam Konsep KUHP Baru	75

B. Perwujudan Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Legislatif	86
B.1. Kebijakan Legislatif Dalam Memformulasikan dan mewujudkan Pidana Pengawasan Pada Masa Kini.....	86
B.1.1. Pengertian dan Jenis Pidana Pengawasan.....	87
a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997.....	87
b. Dalam KUHP (WvS).....	88
c. Dalam Konsep KUHP Baru.....	88
d. Dalam KUHP Asing.....	89
B.1.2. Syarat-syarat pidana pengawasan.....	92
a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997.....	92
b. Dalam KUHP (WvS).....	93
c. Dalam Konsep KUHP Baru.....	95
d. Dalam KUHP Asing.....	101
B.1.3. Masa Percobaan/pengawasan	114
a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997.....	114
b. Dalam KUHP (WvS).....	115
c. Dalam Konsep KUHP Baru.....	115
d. Dalam KUHP Asing.....	115
B.1.4. Pelaksanaan Pidana Pengawasan.....	116
a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997.....	116
b. Dalam KUHP (WvS).....	117
c. Dalam Konsep KUHP Baru.....	118
d. Dalam KUHP Asing.....	119
B.2. Kebijakan Legislatif dalam Memformulasikan dan Mewujudkan Pidana Pengawasan Yang Akan Datang	156
B.2.1. Jenis/Sistem Pidana Pengawasan	156
B.2.2. Syarat-syarat pidana pengawasan.....	161
B.2.3. Masa pengawasan	165
B.2.4. Pelaksanaan Pidana Pengawasan.....	173

BAB IV PENUTUP.....	185
A. Kesimpulan.....	185
B. Saran.....	190
Daftar Pustaka.....	191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, yang secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan :

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹⁾

Sebagai upaya yang sadar dan melembaga, pembangunan, tidak boleh tidak, akan bermuatan nilai artinya pembangunan ingin mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik dalam citra bangsa. Karena pembangunan berkaitan dengan nilai, maka pembangunan seringkali bersifat transendental, suatu gejala meta disiplin, atau bahkan suatu ideologi (*the ideology of devalopmentalism*), karena perencanaan pembangunan, para pengambil kebijakan serta para ahli selalu

¹⁾ TAP MPR '99 Hasil Sidang Umum MPR RI Th. 1999, Penerbit Pabelan, hal. 60.

dihadapkan pada pilihan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistemologi-ontologi pada jenjang filsafat sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek.²⁾

Pembangunan Nasional Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi semata tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Hukum, kata Harold J. Berman adalah “*one of the deepest concern of all civilized men everywhere*” yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang berperadaban di manapun juga. Sedangkan menurut Dennis Liyod, hukum itu adalah “*one of the great civilizing force in human society*”.³⁾ Kemajuan di bidang hukum itu sendiri ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukumnya, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum khususnya hukum pidana materiel (substentif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana materiel peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Di samping itu hukum pidana (KUHP) yang sekarang berlaku bukan berasal,

²⁾ Moeljarto Tjokowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 1-2.

³⁾ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 35.

berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*groundnorm*) dan kenyataan socio-politik, socio-ekonomi dan socio-budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Menurut J.E. Sahetapy, apabila pembangunan atau pembentukan hukum nasional tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL negara dan bangsa yang bersangkutan merupakan suatu impian.⁴⁾ Selain itu sebagaimana disitir Yong Ohoitmur,⁵⁾ hukum yang adil konsisten dengan nilai dan visi hidup masyarakatnya, tidak memihak sang korban saja, tetapi memperhatikan juga pandangan, keyakinan, alam rasa si terpidana serta struktur sosial masyarakat setempat sebagai konteks tindakan kejahatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya hukum pidana materiel, sudah dilakukan sejak tahun 1946 dengan dicabutnya pasal-pasal dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada serta ditambahkannya beberapa pasal yang dianggap perlu. Namun pembaharuan yang demikian sifatnya tambal sulam atau parsial, sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara menyeluruh atau pembaharuan secara total. Pembaharuan secara total ini juga melanda negara-negara lain yang sudah maju yang merasa perlu mengadakan pembaharuan akibat spekulasi politik yang berkembang sesudah Perang Dunia II, misalnya pada Republik Demokrasi Jerman, Polandia, Yugoslavia, Jepang dan bahkan Swedia.⁶⁾

⁴⁾ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994, hal. 18. Dengan istilah **sobural** dimaksudkan adalah "sosial, budaya dan struktural".

⁵⁾ Yong Ohoitmur, MSC, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 106.

⁶⁾ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 5.

Jika kita mengadakan peninjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka dapat dikemukakan tiga persoalan pokok : perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana.

Dalam perjalanan sejarahnya, ketiga masalah tersebut selalu menjadi kajian yang aktual seiring dengan perkembangan peradaban masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang pun ketiga masalah pokok tersebut masih menjadi bahan kajian utama dalam hukum pidana. Khusus mengenai masalah pidana terdapat dua pandangan yang berhadapan. Beberapa ahli hukum⁷⁾ keberatan terhadap penggunaan sanksi (hukum) pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, dan sebagian ahli yang lain tetap mendukung digunakannya sanksi pidana dalam masyarakat, meskipun dengan berbagai catatan.

Menurut Alf Ross, keberatan terhadap penggunaan sanksi pidana dalam masyarakat ini bertolak dari munculnya pandangan deterministik, yang kemudian berlanjut pada munculnya gerakan “Anti Pidana” (*The Campaign against*

⁷⁾ Leo Polak sebagaimana dikutip Sudarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, hal. 22-23 menyatakan: “Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya—baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar dari hukum pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran penderitaan – pidana yang patut diterima, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan.

Filippo Gramatica tokoh radikal Gerakan/Aliran Perlindungan masyarakat sebagaimana dikutip Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 38 menyatakan: Hukum Perlindungan Masyarakat harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi secara prinsipil ajaran Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai *tindak pidana, penjahat dan pidana* (cetak miring dari penulis).

Punishment)⁸⁾. Karena munculnya keberatan tersebut, maka menurut Manninger, sikap memidana harus diganti dengan “sikap mengobati”.⁹⁾

Sikap mengobati ini menurut penulis tidak akan tercapai melalui pidana penjara yang mengandung banyak sisi negatif. Oleh karena itu perlu dikembangkan pemikiran untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tersebut. Hal ini sesuai dengan :

1. Rekomendasi yang diusulkan oleh *Sub Committee II The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1980 di Caracas-Venezuela), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

“in a resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and in activities aimed at the rehabilitation of offenders”.¹⁰⁾

2. Rekomendasi yang diusulkan dalam *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1985 di Milan, Italia), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

⁸⁾ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Steven & Sons Ltd., London, 1975, hal. 67.

⁹⁾ Stanley E. Group, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, 1971, hal. 250.

¹⁰⁾ Dokumen, Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.87/14/Rev.1, Caracas Declaration, Caracas-Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980, hal. 11

“In resolution on Reduction of the prison population, alternatives to imprisonment, and social integration of offenders, the Congress recommended that Member States Intensify the search for credible non-custodial sanctions, which would serve to achieve a reduction in the prison population”.¹¹⁾

3. Rekomendasi yang dianjurkan oleh *The Consultative Assembly of the Council of Europe* kepada Komite Menteri-menteri (negara-negara di Eropa), yang antara lain menyatakan : *“that member Governments be asked to adopt, as part of their national law, the following principles :*

- a. that the first offender who has committed an offence punishable by imprisonment shall, unless a serious crime is involved, receive a suspended sentence or be placed on probation or accorded some similar treatment;*
- b. ...¹²⁾*

Dari rekomendasi di atas pada intinya sama, yaitu menghimbau kepada negara-negara peserta untuk merumuskan ke dalam hukum nasional mereka jenis sanksi *non custodial* sebagai alternatif pidana penjara untuk perkara pidana yang di anggap tidak terlalu serius/membahayakan dengan maksud untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana dan menghindarkan pelaku tindak pidana tersebut dari dampak negatif pidana penjara.

Selain itu, dalam draft resolusi yang merupakan hasil kongres PBB ke-8 mengenai *“The Prevention of Crime and the Treatment Offender”* yang diadakan di Havana, Cuba, pada tanggal 27 Agustus - 7 September 1990, diterima aturan standar minimum untuk tindakan-tindakan non custodial oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang disebut dengan *Tokyo*

¹¹⁾ Dokumen, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.121/22/Rev.1, Milan- Italia, 26 agustus – 6 September 1985, hal. 84.

¹²⁾ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 1976, hal. 12.

Rules dengan pertimbangan bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan serta reintegrasi pelaku tindak pidana kedalam masyarakat sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana.

Tindakan non custodial yang disebutkan dalam Tokyo Rules ini sendiri dapat diterapkan pada tahap sebelum proses peradilan (*pre trial stage*) dengan melaksanakannya secara manusiawi dan dengan menghormati martabat kemanusiaan, pada tahap peradilan dan pemidanaan (*trial and sentencing stage*) dan pada tahap setelah pemidanaan (*post sentencing stage*).¹³⁾

Pada tahap sebelum proses peradilan, dalam hal sesuai dengan sistem hukum, polisi, jaksa atau pejabat lainnya yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*should be empowered to discharge the offender*) dengan pertimbangan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan atau untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum dan hak dari korban, sehingga untuk perkara yang ringan/tidak terlalu membahayakan, aparat penegak hukum dapat mengenakan tindakan *non-custodial* yang layak.

Pada Tahap Peradilan dan Pemidanaan (*Trial and Sentencing Stage*) adalah sebagai berikut : a) Sanksi-sanksi lisan (*“verbal sanctions”*) seperti *“admonition”* (teguran/nasihat baik), *“reprimand”* (teguran keras/penceraan), dan *“warning”* (peringatan); b) Pembebasan/pelepasan bersyarat (*“conditional discharge”*); c) Pidana yang berhubungan dengan status (*“status penalties”*);

¹³⁾ Centre for Human Rights Geneva, *A Compilation of International Instruments (Volume I Universal Instruments)*, United Nations New York, 1993, hal. 336.

d) Sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang ("*monetary penalties*") seperti denda dan denda harian; e) Perampasan ("*confiscation*") atau perintah pengambilan alih ("*expropriation order*"); f) Ganti rugi (*Restitution*) kepada korban, atau perintah kompensasi; g) Pidana bersyarat/tertunda ("*suspended/deferred sentence*"); h) Pengawasan ("*probation and judicial supervision*"); i) Pidana/perintah kerja sosial ("*a community service order*"); j) Penyerahan ke pusat kehadiran ("*referral to an attendance centre*"); k) Penahanan rumah ("*house arrest*"); l) Perawatan non-institusional lainnya ("*non-institutional treatment*"); m) Beberapa kombinasi dari tindakan di atas.

Pada tahap setelah pemidanaan (*post sentencing stage*), untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat, pejabat yang berwenang dapat mengambil beberapa alternatif tindakan setelah pemidanaan yang cukup luas, diantaranya meliputi cuti (*furlough*) dan penempatan pada "*half-way houses*" (suatu lembaga yang dirancang untuk merehabilitasi orang-orang yang telah keluar dari penjara atau membantu masa transisi dari kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan ke kehidupan bebas, penyaluran kerja/pendidikan ("*work/education release*"), macam-macam bentuk "*parole*", remisi dan pemberian maaf ("*pardon*").

Salah satu jenis sanksi *non custodial* yang ditawarkan pada tahap peradilan yang diatur dalam Tokyo Rules tersebut adalah Pengawasan ("*probation and judicial supervision*").

Sebenarnya dalam Konsep Rencana Undang-undang tentang Azas-azas dan dasar-dasar, pokok tatahukum pidana dan hukum pidana Indonesia tahun

1964 telah dirumuskan pidana pengawasan tersebut sebagai salah satu jenis pidana.

Dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pembimbingan di samping pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja dan pidana kerja bhakti, merupakan “pidana baru” sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan.¹⁴⁾

Dalam Konsep KUHP 1999/2000, jenis sanksi pidana pengawasan dirumuskan dalam Pasal 60 sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi orang dewasa dan Pasal 109 sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi anak yang dikategorikan dalam “pidana dengan syarat” yang terdiri dari (1) pidana pembinaan diluar lembaga; (2) pidana kerja sosial; atau (3) pidana pengawasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa Konsep 1999/2000 menetapkan pidana pengawasan tidak saja untuk orang dewasa tapi juga untuk anak.¹⁵⁾

Ketentuan mengenai pidana pengawasan khususnya untuk anak sebenarnya sudah tersurat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 angka (2) huruf d, bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a) pidana penjara; b) pidana kurungan; c) pidana denda; atau d) pidana pengawasan.

Dalam kaitannya dengan masalah “pidana pengawasan” tersebut, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud melakukan kajian terhadap pidana

¹⁴⁾ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 7

¹⁵⁾ Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, 1999-2000, *Rancangan UU RI No... tahun ... tentang KUHP*, hal. 24 dan 47.

pengawasan dengan fokus atau pokok masalah berupa menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan dalam perundang-undangan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan legislatif yang akan datang. Pemilihan pokok masalah yang demikian, didasarkan pada pertimbangan bahwa tahap legislatif sebagai tahap yang paling strategis dalam mengoperasionalkan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif ini terjadi kesalahan/kelemahan khususnya dalam hal merumuskan sanksi pidana pengawasan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi, mengingat pidana pengawasan itu sendiri sebagai jenis sanksi pidana baru. Sehubungan dengan itu maka yang perlu dipertanyakan disini apakah yang menjadi ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai salah satu sanksi non custodial dalam kebijakan legislatif Indonesia dan bagaimana pidana pengawasan sebagai sanksi non custodial tersebut diwujudkan dalam kebijakan legislatif Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan demikian itu sangat menarik, karena merupakan suatu permasalahan yang baru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai salah satu sanksi *non custodial* dalam kebijakan legislatif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pidana pengawasan sebagai sanksi *non custodial* tersebut diwujudkan dalam kebijakan legislatif di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui ide dasar merekomendasikan pidana pengawasan sebagai salah satu sanksi *non custodial* dalam kebijakan legislatif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pidana pengawasan sebagai sanksi *non custodial* tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan legislatif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan formulasi hukum pidana dalam menetapkan pidana pengawasan;
2. Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai pidana pengawasan, terutama dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

E. Metode Penelitian.¹⁶⁾

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁷⁾ Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁸⁾

Pendekatan terhadap hukum dengan menggunakan metode normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula di sebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal. Pendekatan terhadap hukum dengan mempergunakan metode empiris, mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari

¹⁶⁾ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII, 1996, hal. 3. Menurut Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1996, hal. 43.

¹⁸⁾ Ronny Hanitijo Soemitro (selanjutnya disebut Ronny Hanitijo Soemitro I), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga-Yang disempurnakan, 1988, hal. 9.

perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola, yang kemudian sering disebut sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis.¹⁹⁾

Berdasarkan permasalahan penelitian, bahwa objek yang akan diteliti mengenai kebijakan legislatif khususnya mengenai pidana pengawasan sebagai alternatif sanksi pidana, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai dan diteliti terutama adalah data sekunder atau data yang berasal dari bahan kepustakaan. Selain itu metode penelitian normatif dipakai karena pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah bahan pustaka terutama yang menyangkut kebijakan untuk menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan dalam perundang-undangan.

Menurut Sunaryati Hartono²⁰⁾, bahwa proses untuk menetapkan, memasukkan dan merumuskan suatu kebijakan dalam perundang-undangan dengan dilandasi oleh suatu latar belakang falsafah, nilai-nilai kultural, konsepsi-konsepsi, ajaran-ajaran atau teori-teori tertentu serta memasukkan pula latar belakang penemuan-penemuan empiris adalah merupakan suatu kegiatan yang bersifat teknik yuridis dan sistematis.

Selain pendekatan secara yuridis normatif, penelitian ini juga dilakukan dengan memakai studi historis dan studi komparatif (perbandingan) untuk pendalaman, yaitu dengan melakukan studi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan negara asing yang mencantumkan pidana pengawasan

¹⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro (selanjutnya disebut Ronny Hanitijo Soemitro II), *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*(dalam: *Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro No. 9 Tahun 1991*), Semarang, 1991, hal. 44.

²⁰⁾ Sunaryati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984, hal. 34.

sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa *Comparative Law* atau *Comparative Jurisprudence* adalah : *The scholarly study of the similarities and differences between the legal system of different jurisdiction*. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa *Comparative Interpretation* berarti : *a method of statutory interpretation by which parts of the statute are compared to each other, and the statute as a whole is compared to other documents from the same source on a similar subject*.²¹⁾ Menurut Rene David dan Brierley sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief,²²⁾ dengan metode komparatif ini akan dapat membantu memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri. Dengan demikian, dengan penggunaan metode komparatif dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang berbagai norma yang berkaitan dengan pidana pengawasan, untuk pada gilirannya menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia.

Dengan pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa sistem-sistem hukum yang berbeda tidak hanya menunjukkan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta pranata-pranata hukum yang berbeda, akan tetapi (hal mana seringkali mengejutkan adalah), bahwa seringkali dua sistem hukum yang sama sekali tidak menunjukkan hubungan atau pertemuan historis,

²¹⁾ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States of America: West, Seventh Edition, 1999, hal. 858 dan 276.

²²⁾ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988, hal. 18. Secara lengkap menurut Rene David dan Brierley, *Perbandingan Hukum* berguna untuk : 1) berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis, 2) penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, 3) membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

bagaimanapun juga masih dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep hukum atau asas-asas hukumnya ...²³⁾ Dengan demikian akan memperkaya referensi dalam rangka pembaharuan hukum (pidana) di Indonesia.

Pendekatan yuridis historis akan digunakan untuk melihat aspek historis tentang pidana pengawasan. Melalui pendekatan historis akan dilihat perkembangan pidana pengawasan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, mengingat dalam KUHP (WvS) telah mengatur pidana yang hampir sama dengan jenis pidana ini yaitu pidana bersyarat (KUHP Pasal 14a-f).

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama berupa data kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan/sumber data primer dan bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.²⁴⁾ Bahan/sumber primer yang terutama dipakai adalah peraturan perundang-undangan. Bahan/sumber sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

²³⁾ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan VI, 1989, hal. 27. Dalam konteks Hukum Pidana Internasional, pemahaman terhadap berbagai sistem hukum itu menjadi sangat urgen, oleh karena, hukum pidana nasional juga merupakan sumber hukum dari hukum pidana internasional. Jadi hukum pidana internasional mempunyai dua sumber, yaitu sumber hukum yang berasal dari hukum pidana nasional (suatu negara) dan sumber hukum yang berasal dari hukum internasional. Dua sumber hukum tersebut telah membentuk kepribadian ganda (double personality) di dalam hukum pidana internasional. Kepribadian ganda tersebut adalah aspek hukum pidana nasional dan aspek hukum internasional. Lihat lebih lanjut : Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 64 dan R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 26-27.

²⁴⁾ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I: Cetakan Keempat, Jakarta, 1994, hal. 29.

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁵⁾ Bahan/sumber sekunder yang akan diteliti meliputi dokumen atau risalah perundang-undangan, rancangan undang-undang, sumber hukum dan perundang-undangan negara asing, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional. Adapun dokumen atau risalah resmi mengenai konsep perundang-undangan pidana (terutama Konsep/Rancangan KUHP Nasional) yang diteliti adalah yang tersimpan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bagian Hukum Pidana Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI di Jakarta.

3. Metode Analisa Data

Melakukan analisis data merupakan tahap yang kritis dalam suatu penelitian. Pemilihan metode analisis harus dikaitkan dengan jenis data yang dikumpulkan. Metode analisa data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan yaitu data yang deskriptif atau data textular. Data deskriptif atau data textular ini nantinya dianalisis berdasarkan isinya sehingga disebut analisis isi (*content analysis*). Analisa kualitatif ini selain dilakukan secara deskriptif juga dilakukan secara preskriptif, karena dalam penelitian ini selain hendak dilukiskan atau diungkapkan data sebagaimana adanya, juga dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai kebijakan legislatif mengenai pidana pengawasan sebagaimana yang diharapkan.

²⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro I, *Op. Cit.*, hal. 12.

F. Sistematika Penulisan.

Sebelum membahas hasil penelitian pada Bab III yang disesuaikan dengan permasalahan, yaitu mengenai apa ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai salah satu sanksi *non custodial* dalam kebijakan legislatif di Indonesia dan bagaimana pidana pengawasan sebagai sanksi *non custodial* tersebut diwujudkan dalam kebijakan legislatif di Indonesia, terlebih dahulu dalam Bab II akan diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka berisi kerangka pemikiran, teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan serta peraturan-peraturan yang relevan dengan pokok permasalahan untuk digunakan menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Bahan pustaka itu diantaranya mengenai : A. Kebijakan Legislatif Dalam Tahapan/Strategi Pemidanaan, B. Pidana Pengawasan Sebagai Sanksi Non Custodial, B.1. Sanksi Non Custodial dan B.2. Pengertian Pidana Pengawasan.

Dalam bab terakhir dari Tesis ini yaitu Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di sertai saran yang tujuannya untuk lebih mendayagunakan alternatif pidana penjara dengan pidana pengawasan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Legislatif Dalam Tahapan / Strategi Pemidanaan.

Sejak KUHP dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, sudah ada upaya-upaya untuk mengadakan pembaharuan hukum pidana (materiel). Namun harus diakui bahwa apa yang telah dikerjakan itu sama sekali tidak dapat dikatakan suatu "*Law Reform*" secara "total". Oleh karena itu apa yang telah dilakukan hanyalah bersifat tambal sulam.

Kondisi hukum pidana yang demikian tentunya dapat dikatakan "menyedihkan", karena berbagai persoalan sosial pada masa kini semakin menghadang. Disamping itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian pesatnya, dan hal ini tidak boleh terhambat oleh hukum pidana, untuk itu hukum pidana harus terus berkembang. Apabila hukum pidana yang ada di Indonesia ini tidak dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka hukum pidana pasti tidak dapat berfungsi sebagaimana tujuannya, yaitu memberikan ketentraman dan ketertiban.

Disadari bahwa KUHP dalam banyak hal sudah ketinggalan dari perkembangan kebutuhan masyarakat yang telah berubah.¹⁾ KUHP adalah produk dari aliran klasik (aliran yang menitikberatkan kepada perbuatan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka) akan tetapi sudah mendapat pengaruh dari aliran

¹⁾ Teuku Mohammad Radhie, Gambaran Umum Perkembangan Hukum Di Indonesia dalam Abd. G. Hakim Nusantara & Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 52.

modern (aliran yang menitikberatkan kepada perbuatan secara konkrit), sehingga dapat dikatakan sebagai produk aliran neo-klasik. Aliran ini berpijak pada tiga tiang, ialah :

1. Asas Legalitas. Asas ini sebagai asas yang fundamental bagi suatu negara hukum.²⁾
2. Asas kesalahan. Asas ini mengandung asas perikemanusiaan dan merupakan sendi dari negara kita.³⁾
3. Asas pengimbalan yang sekuler yang menghendaki pidana setimpal dengan kesalahan pembuat.

Melihat tiga tiang hukum pidana tersebut, dalam rangka pembaharuan hukum pidana maka asas legalitas maupun asas kesalahan masih tetap dirumuskan dalam Konsep KUHP Baru dan memasukkan hukum yang hidup atau hukum adat disertai dengan syarat-syarat tertentu. Persoalan mengenai pemidanaan yang menyangkut kejahatan dan penjahat itu sendiri juga merupakan bagian penting. Salah seorang pakar Hukum Pidana (Sudarto) mengemukakan :⁴⁾

“Bagian yang terpenting dari suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah stelsel pidananya, stelsel pidana tersebut juga memuat aturan-aturan tentang jenis pidana dan tentang ukuran serta pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya, dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melakukan pembentukan Undang-undangnya dan sikap pemerintahnya terhadap warga masyarakat sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan”.

²⁾ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1973, hal. 174.

³⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 35.

⁴⁾ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Kertas kerja dalam Lokakarya “Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, BPHN, tanggal 13-15 Desember 1982, Jakarta, hal. 87. Lihat pula Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995, hal. 131.

Oleh karena itu pula menurut Barda Nawawi Arief “Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis termasuk dalam klasifikasi yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana”.⁵⁾

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan merupakan kebijakan legislatif. Oleh karena itu kebijakan legislatif sangat berperan dalam pembaharuan hukum pidana, meskipun pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilihat dari pendekatan legislatif belaka.⁶⁾

Pembaharuan pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).⁷⁾ Istilah kebijakan dalam hal ini merupakan alih bahasa dari istilah dalam bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum, pen.) dalam mengelola, mengatur / menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat / bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum / peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan

⁵⁾ Barda Nawawi Arief (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hal. 3.

⁶⁾ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal.48.

⁷⁾ Barda Nawawi Arief (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 31.

kesejahteraan / kemakmuran masyarakat (warga negara)⁸⁾. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial). Didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pertimbangan nilai.

Dengan demikian pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari dua sudut pendekatan. Dari sudut pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial, maka ia merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, maka ia merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukan pembaharuan hukum pidana, apabila orientasi

⁸⁾ Henry Campbell Black mengartikan "*policy*" adalah "The general principles by which a government is guided in its management of public affair, or the legislature in its measures... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community". Henry Campbell Black, et.al, ed, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Pubicing Co, hal 1041.

nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana warisan penjajah.⁹⁾

Melihat pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, maka pada tahap kebijakan legislatif hal ini dapat dilakukan.

Pada saat tahap kebijakan legislatif tersebut yaitu pada saat tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, maka pada saat itu harus dilakukan upaya reorientasi dan reformasi terhadap hukum pidana itu. Dengan kebijakan legislatif harus dapat direncanakan dan diprogram oleh pembuat undang-undang mengenai apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan hukum pidana, agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Disinilah letak strategisnya tahap kebijakan legislatif, karena tahap kebijakan legislatif merupakan bagian dari konkretisasi pidana. Ide-ide yang ada dalam rangka pembaharuan hukum pidana akan terlihat nyata pada tahap kebijakan legislatif. Ide-ide yang ada akan tertuang dalam rumusan undang-undang yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Ide yang tertuang dalam undang-undang pidana tersebut harus merupakan hasil reorientasi dan reformasi

⁹⁾ Barda Nawawi Arief II, *Op. Cit.*, hal. 32.

terhadap hukum pidana yang telah sesuai dengan nilai sentral masyarakat Indonesia. Menurut Sudarto:¹⁰⁾

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari sesuatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu tertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten... Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas.

Kebijakan legislatif sebagai tahapan yang strategis dapat dilihat dari perannya dalam pembaharuan hukum pidana. Juga dapat dilihat dari sisi fungsionalisasi hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, "Pada tahap kebijakan legislatif inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana."¹¹⁾

Dilihat dari perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat maka dikenal adanya tiga fase (tahapan). Dalam fase pertama dikenal dengan fase pengancaman pidana terhadap perbuatan oleh pembentuk undang-undang. Dalam fase ini pidana masih berupa ancaman, berupa norma sanksi yang menyebutkan sanksi minimum dan maksimumnya, keberadaannya itu masih tergantung di awang-awang dalam arti belum mempunyai batas yang konkrit, belum dapat diperkirakan dan belum terwujud sama sekali.¹²⁾ Fase pertama dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Disini pidana belum terwujud

¹⁰⁾ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 63.

¹¹⁾ Barda Nawawi Arief II, *Op. Cit.*, hal. 15.

¹²⁾ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi Seri Hukum Pidana 1*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988, hal. 30.

sama sekali, masih dalam rumusan undang-undang saja. Didalam fase kedua yaitu fase penjatuhan pidana oleh hakim. Disini pidana sudah lebih konkrit, misalnya tiga tahun penjara yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Fase kedua dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif. Sedang fase ketiga yaitu fase pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana pada orang yang telah dijatuhi pidana. Dalam fase ketiga ini pidana sudah betul-betul dirasakan oleh orang yang dikenai, misalnya pidana penjara adalah kalau seseorang itu telah benar-benar kehilangan kemerdekaannya. Fase ketiga tersebut merupakan tahap kebijakan eksekutif. Ketiga fase tersebut merupakan suatu rangkaian dari bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat.

Mengenai fase pertama/tahap kebijakan legislatif, sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2000 telah dirumuskan Konsep KUHP Baru, namun hingga sekarang belum menunjukkan adanya pembahasan lebih lanjut pada sidang di DPR RI. Lamanya waktu untuk sebuah undang-undang untuk dapat disahkan menjadi UU yang baru dikarenakan kebutuhan untuk mencari pemikiran-pemikiran baru sebagaimana diuraikan diatas yaitu menyesuaikan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam penyusunan Konsep KUHP Baru dimasukkan pemikiran-pemikiran baru yang berdasarkan pada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana yaitu perumusan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan pidana yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Mengenai masalah pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana,

sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Sejak zamannya Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pemidanaan. Di dalam Protagoras Plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah : tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.¹³⁾

Selanjutnya dibawah ini akan dibahas prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Para pakar teori ini antara lain, ialah Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Von Bar, Kohler dan Polak.

Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terdapat didalam *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu

¹³⁾ Muladi (selanjutnya disebut Muladi I), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 48.

harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, menurut Kant haruslah didasarkan atas asas keseimbangan. Pidana mati harus mutlak dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan.

Menurut teori Hegel, hak itu harus dipandang sebagai kebebasan yang sifatnya nyata, sedang sesuatu yang sifatnya melawan hukum itu sebenarnya bersifat tidak nyata. Dilanggarnya sesuatu hak oleh kejahatan, secara lahiriyah memang mempunyai suatu segi yang sifatnya positif, akan tetapi yang menurut sifatnya dari kejahatan itu sendiri segi positif tersebut adalah batal.

Kebatalan harus dibuat secara nyata, yaitu dengan perbuatan nyata. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu harus ditiadakan dengan suatu pidana, sebagai suatu pembalasan.

Menurut Hegel, didalam menjatuhkan suatu pidana itu, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu sendiri.

Pada hakikatnya Hegel menghendaki adanya apa yang disebut *dialektische Vergelding*/pembalasan dialektis. Yakni yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan. Yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan bagi orang tersebut. Seimbang disini tidak berarti

harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan bagi pelaku itu mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.

Sedangkan Herbart, mengatakan bahwa pembalasan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetik. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan ketidakadilan. Disamping melihat pidana sebagai pembalasan, pendapat Herbart telah mempengaruhi seorang penulis bernama Geyer, yang antara lain mengatakan, bahwa peradilan itu menghendaki adanya pembalasan, baik bagi yang buruk, maupun bagi yang baik.

Apabila keadilan itu menghendaki, maka pemidanaan itu harus dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.

Stahl, mengatakan bahwa asasnya pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat, dia mengatakan selanjutnya bahwa negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan diatas bumi, yang karena dilakukannya sesuatu kejahatan, telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap perbuatan-perbuatan, seperti meniadakan penjahatnya/membuat penjahatnya agar merasakan suatu penderitaan, dimana penderitaan itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat perbuatannya. Stahl juga berpendapat, suatu pemidanaan itu

orang dapat mencapai tiga tujuan, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera mengulang kejahatan.¹⁴⁾

Dari pendapat pakar diatas, menurut penulis ada beberapa ciri tentang teori pembalasan, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama, dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana lain, misal untuk kesejahteraan manusia.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus di sesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan murni, dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik/memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif atau teori tujuan

Dasar pemikiran teori ini adalah dengan pidana mempunyai tujuan tertentu. Teori ini pertama – tama harus di arahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau “*special*” (pengaruh pidana terhadap tingkah laku si terpidana supaya berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat) dan prevensi umum atau “*general*” (pengaruh pidana terhadap tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana).

¹⁴⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Sari Hukum Pidana Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* 2, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 60-61.

Sebagai tanda ciri teori ini, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan .
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran hukum yang dapat di persalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana.
4. Pidana harus di tetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung pencegahan.¹⁵⁾

3) Teori Gabungan

Pidana menurut teori gabungan di maksudkan atas tujuan tertentu, pembalasan, dan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka teori gabungan di bedakan dalam 3 (tiga) aliran, yaitu : ¹⁶⁾

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat, dan
3. Teori gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

¹⁵⁾ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983, hal. 24 – 28.

¹⁶⁾ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 24.

Menghadapi tiga teori tersebut, maka kita di hadapkan pada soal pemilihan, teori mana yang di anggap paling baik. Dalam hal ini maka teori gabungan merupakan teori tujuan pemidanaan yang tepat apabila dikaitkan dengan situasi hukum pidana yang dipakai di beberapa negara dewasa ini.

Di dalam konsep KUHP tahun 2000 Pasal 50 ayat (1) secara tegas telah tercantum tujuan pemidanaan untuk :

1. Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 50 ayat (2) Konsep : Pemidanaan tidak di maksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁷⁾

Menurut Niniek Suparni¹⁸⁾ dalam tujuan pemidanaan yang pertama terkandung pandangan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Tujuan kedua : mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan kedalam masyarakat. Tujuan ketiga : sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang

¹⁷⁾ Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, 1999-2000, *Rancangan UU RI No... tahun ... tentang KUHP*.

¹⁸⁾ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, 1996, Sinar Grafika, hal. 60.

berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik/pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat dihindari suatu pandangan dikehendaknya pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana oleh masyarakat/korban. Namun tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya tindak pidana adalah salah satu tujuan pemidanaan yang tidak dapat diabaikan, karena menurut Mattulada, keseimbangan dalam masyarakat menjadi tata tertib yang sakral (suci) yang pantang di langgar.¹⁹⁾ Oleh karena itu segala tindakan/perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum tersebut.²⁰⁾ Apabila hal ini terabaikan maka masyarakat akan melakukan tindakan sendiri yang dianggapnya akan memberikan keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

Menurut M. Hamdan²¹⁾ suatu jenis pidana senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan. Bila tidak demikian, maka penerapan pidana tersebut tidak akan bermanfaat (*useless meaning*) bagi tujuan pelaksanaan peradilan pidana (*administration of criminal justice*) dan seterusnya tidak akan bermanfaat pula bagi masyarakat.

¹⁹⁾ Mattulada, *Lingkungan Hidup Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan I, 1994, hal. 58.

²⁰⁾ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 1981, hal. 177.

²¹⁾ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997, hal. 75.

Selain tujuan pemidanaan, dalam penyusunan rancangan KUHP nasional juga dapat dilihat beberapa prinsip yang antara lain menyebutkan :²²⁾

- a. Bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila;
- b. Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak mau atau belum dapat diharapkan keefektifannya; dan
- c. Nilai-nilai yang walaupun menghambat pembangunan (hukum), akan tetapi berangsur-angsur akan berubah atau hilang karena faktor-faktor lain dalam pembangunan;
- d. Nilai-nilai yang secara definitif menghambat pembangunan (hukum) dan oleh karena itu harus dihapuskan dengan sengaja.

B. Pidana Pengawasan sebagai Sanksi Non Custodial.

B.1. Sanksi Non Custodial

Masalah mendayagunakan dan pencarian alternatif pidana penjara atau pidana pencabutan kemerdekaan telah menjadi masalah yang bersifat universal. Gerakan yang universal ini dimulai oleh gerakan abolisionis yang menghendaki dihapuskannya secara keseluruhan hukum pidana. Gerakan ini pada hakekatnya berisi kritik yang sangat tajam terhadap hukum pidana juga

²²⁾ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. vi.*

pada sistem peradilan pidana. Keduanya tidak dapat melepaskan diri dari sifatnya yang represif, sebagai karakteristik aslinya. Reaksi sosial dari akibat samping adanya pidana (penjara) kadang tidak bersifat preventif dan rehabilitatif, bahwa kadangkala justru meningkatkan desosialisasi serta adanya stigma dari masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan oleh terpidana. Menurut Hoefnagels²³⁾ stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak.

Secara psikologis stigmatisasi ini menimbulkan kerugian yang terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia adalah seorang penjahat, dengan segala akibatnya. Stigma seringkali dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat menyedihkan di dalam kaitannya dengan pandangan kita terhadap kejahatan dan pemidanaan.

Dalam Kongres PBB ke-5 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* yang diadakan di Geneva pada tahun 1975 dinyatakan dalam bagian *reforms of criminal law* butir 177 (f) bahwa : *it seemed possible to suggest to all countries some general guidelines which owing to the limitation of the present report, necessarily had to be brief a persistent endeavour to select measures that carried the least stigma and with the application of which the community could be associate*. Selanjutnya

²³⁾ Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal. 95-97. Lihat pula Peter Hoefnagels, *The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984, hal. 26, bahwa "Stigma occur when a person's identity is spoiled, which means that the agreement between what someone is and the judgment of society on him is spoiled".

disebutkan pula dalam butir ke 187 kongres tersebut dalam bagian *non-judicial forms of social control* bahwa : *special care should be taken to avoid social labelling and stigmatization. To that end an extensive information campaign should be launched to ensure that the whole population knew and accepted the view that the fate of the handicapped deviants and offenders was the business of the entire community and of each of its members.*²⁴⁾

Timbul akibat samping maupun langsung dari adanya pidana ini, gerakan abolisionis berusaha untuk menghilangkan atau menghapuskan sarana penal dengan sarana yang non penal ataupun penggabungan antara sarana penal dan non penal sekaligus. Gerakan abolisionis ini berkembang cukup pesat di bumi belahan Eropa maupun Amerika dengan karakteristiknya masing-masing.

Bilamana gerakan di Amerika menekankan penghapusan pidana penjara (*prison abolitionist*), maka gerakan di Eropa menekankan keberatannya terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*The criminal justice system as a whole*) dalam hal mana sistem kepenjaraan merupakan jantungnya yang bersifat represif.

Kaum abolisionis mengajukan beberapa konsep pemikiran tentang kejahatan, pidana dan pengendalian sosial, konsep itu adalah :

1. *decarceration* atau *deinstitutionalization*, yakni penghapusan penjara dan menggantikannya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan di masyarakat terbuka;

²⁴⁾ Dokumen, Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975, UN., New York, 1976, hal. 23-24.

2. *diversion*, yakni menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana yang formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat;
3. *deategorization*, (juga *delabelling*, *stigmatization*), merupakan usaha untuk mematahkan pelbagai sistem pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori-kategori perbuatan menyimpang. Dalam hal ini apabila dekriminalisasi merupakan usaha untuk mengurangi ruang lingkup perbuatan yang merupakan tindak pidana, maka abolisionisme berkeinginan untuk menghapus sama sekali seluruh konsep tentang kejahatan;
4. *delegalization* (and *deformalization*, *informal justice*), dalam arti menemukan sesuatu yang baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian perselisihan dan management konflik tradisional dan bentuk-bentuk keadilan di luar sistem;
5. *deprofessionalization* yang mengandung makna bahwa, untuk mengganti struktur monopoli profesional dan kekuasaan (dalam peradilan pidana, pekerja sosial dan psikiatri), perlu dibentuk jaringan (*network*) kontrol masyarakat, partisipasi masyarakat dan pelayanan informal.²⁵⁾

Kecenderungan internasional yang kemudian timbul sebagai reaksi gerakan abolisionis ini adalah gerakan reformis yang berusaha untuk mencari alternatif pidana penjara (*alternatives imprisonment*).

²⁵⁾ Muladi (selanjutnya disebut Muladi II), *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar FH Undip Semarang, 24 Pebruari 1990, hal. 20-21.

Gaung reformis ini mendapatkan perhatian dari Perserikatan bangsa-bangsa, yang pada tahun 1980 di Caracas oleh *Sub-Committee II* pada *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1980 di Caracas, yang khusus membicarakan topik *De-institutionalization of corrections* antara lain memberikan rekomendasi sebagai berikut :

*“in a resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and in activities aimed at the rehabilitation of offenders”.*²⁶⁾

Kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara ini hampir melanda semua negara. Walaupun sebenarnya sejak tahun 1965 Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kongresnya yang ke-3 di Stockholm telah memfokuskan diri pada diskusi-diskusi tentang probation untuk orang dewasa dan tindakan-tindakan lain yang bersifat non institusional.²⁷⁾

Bentuk-bentuk tindakan yang bersifat non institusional ini bermacam-macam dengan adanya aturan standar minimum atau *Standard Minimum Rules* (selanjutnya disebut *Tokyo Rules*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990. Draft resolusi PBB ini merupakan hasil Kongres PBB ke-8 mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” yang diselenggarakan di Havana, Cuba,

²⁶⁾ Dokumen, Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.87/14/Rev.1, Caracas Declaration, Caracas-Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980, hlm. 11

²⁷⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 84.

pada tanggal 27 Agustus -7 September 1990. Ruang Lingkup Tindakan Non Custodial yang diatur dalam Tokyo Rules ini meliputi :²⁸⁾

1. Tahap sebelum Proses Peradilan (*Pre Trial Stage*);
 - a. Dalam hal sesuai dengan sistem hukum, polisi, jaksa atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*should be empowered to discharge the offender*) apabila mereka mempertimbangkan bahwa tidak perlu meneruskan perkara itu karena (berdasar alasan) :
 - *The protection of society, crime prevention*; atau
 - *The promotion of respect for the law and the rights of victims.*
 Untuk tujuan menetapkan keputusan yang tepat mengenai pembebasan dari proses itu, setiap sistem hukum harus menentukan seperangkat kriteria. Untuk perkara ringan/kecil, jaksa boleh mengenakan tindakan non custodial yang layak.
 - b. Penahanan sebelum peradilan (*pre trial detention*) seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam proses pidana, dengan mengingat keperluan untuk “penyidikan” (*investigation*), perlindungan masyarakat dan korban (*the protection of society and the victim*).
 - c. Alternatif penahanan *pre trial* sejauh mungkin harus digunakan pada tahapan awal. Penahanan *pre trial* seyogyanya digunakan

²⁸⁾ Centre for Human Rights Geneva, *A Compilation of International Instruments Vol. I*, United Nations, New York, 1993, hal. 336-340 (yang diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief dalam Sari Kuliah *Kapita Selekta Hukum Pidana*)

terakhir, tidak lebih daripada keperluan untuk mencapai tujuan dan harus dilaksanakan secara manusiawi (*humanely*) dan dengan menghormati martabat kemanusiaan (*with respect for the inherent dignity of human beings*).

- d. Pelaku tindak pidana mempunyai hak untuk banding ke pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dalam hal-hal penahanan *pre trial* digunakan.

2. Tahap Peradilan dan Pemidanaan (*Trial and Sentencing Stage*);

- a. Dalam membuat keputusan mengenai tindakan non custodial, pejabat peradilan:
 - dapat mengambil manfaat dari laporan penelitian sosial (*social inquiry reports*);
 - harus mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku (*the rehabilitative needs of the offender*), perlindungan masyarakat (*the protection of society*), dan kepentingan korban (*the interest of the victim*).
- b. Pejabat yang berwenang memidana (*Sentencing authorities*) dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :
 - Sanksi-sanksi lisan (*“verbal sanctions”*) seperti *“admonition”* (teguran / nasihat baik), *“reprimand”* (teguran keras / pencercaan), dan *“warning”* (peringatan);
 - Pembebasan/pelepasan bersyarat (*“conditional discharge”*);
 - Pidana yang berhubungan dengan status (*“status penalties”*);

- Sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang (*"monetary penalties"*) seperti denda dan denda harian;
- Perampasan (*"confiscation"*) atau perintah pengambilan alih (*"expropriation order"*)
- Ganti rugi (*Restitution*) kepada korban, atau perintah kompensasi;
- Pidana bersyarat/tertunda (*"suspended/deferred sentence"*);
- Pengawasan (*"probation and judicial supervision"*);
- Pidana/perintah kerja sosial (*"a community service order"*);
- Penyerahan ke pusat kehadiran (*"referral to an attendance centre"*);
- Penahanan rumah (*"house arrest"*);
- Perawatan non-institusional lainnya (*"non-institutional treatment"*);
- Beberapa kombinasi dari tindakan di atas.

3. Tahap setelah Pemidanaan (*Post Sentencing Stage*).

- a. Untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat, pejabat yang berwenang harus mempunyai alternatif tindakan setelah pemidanaan (*"post sentencing alternatives"*) yang cukup luas.
- b. Tindakan/penetapan itu dapat meliputi :
 - cuti (*furlough*) dan penempatan pada *"half-way houses"* (suatu lembaga yang dirancang untuk merehabilitasi orang-orang

yang telah keluar dari penjara atau membantu masa transisi dari kehidupan di LP ke kehidupan bebas.

- Penyaluran kerja/pendidikan ("*Work/education release*").
 - Macam-macam bentuk "*parole*".
 - Remisi.
 - Pemberian maaf ("*pardon*").
- c. Kecuali dalam hal pemberian maaf, tindakan/penetapan di atas dapat ditinjau kembali (*review*) oleh pejabat pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, atas permintaan pelaku tindak pidana.
- d. Tiap bentuk pengeluaran dari institusi ke program non custodial harus dipertimbangkan seawal mungkin.

Pengaturan standar minimum ini berdasarkan beberapa latarbelakang yaitu adanya UDHR, ICCPR dan instrumen internasional lain yang berkaitan dengan hak asasi orang yang melanggar hukum; adanya SMR *for treatment of prisoners*; adanya hasil resolusi PBB ke-8 Kongres PBB ke-6 mengenai "*alternatives to imprisonment*", yang dinyatakan sebagai berikut : "*in resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member State examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and in*

activities aimed at the rehabilitation of offenders"²⁹⁾; adanya hasil resolusi PBB ke-16 Kongres PBB ke-7 mengenai "*alternatives to imprisonment*", yang dinyatakan sebagai berikut : "*In resolution on Reduction of the prison population, alternatives to imprisonment, and social integration of offenders, the Congress recommended that Member States Intensify the search for credible non custodial sanctions, which would serve to achieve a reduction in the prison population*"³⁰⁾; pemikiran mengenai perlunya pengembangan strategi lokal, nasional, regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non institusional; adanya pemikiran bahwa alternatif terhadap pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat; adanya pemikiran bahwa pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*) dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana yaitu "reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat" (*reintegration of offender into society*); serta meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnya penjara yang menimbulkan kesulitan untuk menerapkan *SMR for the Treatment of Prisoners*.

²⁹⁾ Dokumen, Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.87/14/Rev.1, Caracas Declaration, Caracas-Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980, hal. 11

³⁰⁾ Dokumen, Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.121/22/Rev.1, Milan-Italia, 26 Agustus-6 September 1985, hal. 84.

Dalam Prinsip Umum *Tokyo Rules* ini, dikemukakan juga mengenai tujuan diadakannya aturan standar minimum ini yang meliputi : ditetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar untuk mengembangkan tindakan-tindakan non-custodial dan mengembangkan jaminan minimum bagi orang yang dikenakan alternatif pidana penjara; meningkatkan keterlibatan/peran serta masyarakat khususnya dalam pembinaan pelaku tindak pidana dan meningkatkan rasa tanggungjawab pelaku tindak pidana terhadap masyarakat; pengimplementasian dengan mengingat kondisi politik, ekonomi, social, kultural dan tujuan sistem peradilan pidana masing-masing negara; menjamin keseimbangan antara hak individual pelaku tindak pidana, hak korban dan kepentingan masyarakat berupa keamanan publik dan pencegahan kejahatan; dan mengembangkan tindakan non custodial dalam sistem hukum negara anggota dengan mengingat penghormatan terhadap hak-hak asasi, keadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.

Selain karena alasan-alasan efektifitas pidana penjara, alternatif pidana penjara dengan tindakan non custodial yang diatur dalam *Tokyo Rules* dapat dikatakan juga mendasarkan diri pada ide individualisasi pidana, dimana pidana harus sesuai dengan orang bukan dengan perbuatan (*the punishment should fit the criminal (not the crime)*).

Ide individualisasi pidana antara lain mengandung beberapa karakteristik yaitu pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan; pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah; pidana harus

disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana dan kemungkinan adanya modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian dalam pelaksanaannya).

Sehubungan dengan ide individualisasi pidana ini, Sheldon Glueck mengemukakan 4 prinsip yang mendasari proses individualisasi pidana, yaitu : ³¹⁾

1. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from guilt finding phase;*
2. *The decision as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data;*
3. *The Treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress;*
4. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful action on the part of the treatment tribunal.*

Prinsip pertama dan kedua dikenal dengan proses dua fase (*two-fasen proces*), yaitu suatu gagasan untuk mengadakan pemisahan dalam perkara pidana antara fase pembuktian secara teknis-yuridis (penentuan kesalahan) dengan fase pengenaan pidana (fase pembinaan). Pemeriksaan fase pertama dilakukan oleh sarjana hukum (hakim) dan fase kedua dilakukan oleh para ahli di bidang ilmu pengetahuan tingkah laku yang mampu melakukan interpretasi dan evaluasi terhadap data psikiatrik, psikologik dan sosiologik yang ditangani oleh suatu badan khusus yang dikenal dengan *treatment tribunal* atau *sentencing tribunal*.

³¹⁾ Sheldon Glueck, *Principles of a Rational Code*, dalam buku Stanley E. Grupp, *Theories of Punishment*, 1971, hal. 287-288.

Dalam hal ini Sudarto tidak menyetujui adanya, proses dua fase tersebut, karena dalam kenyataannya proses ini menyatu sehingga apabila diadakan pemisahan dikhawatirkan justru tidak akan tercapai tujuannya. Disamping itu juga didasarkan pada pemikiran bahwa meskipun hakim tidak dididik secara khusus mengenai ilmu tingkah laku, tetapi tetap mampu karena selama ia dididik dan berdasar pengalamannya untuk menentukan atau memahami tingkah laku manusia.

Prinsip ketiga mengatakan bahwa treatment harus dapat dimodifikasi dalam kaitannya dengan laporan perkembangan ilmiah. Prinsip ini sangat penting berkaitan dengan berubahnya si terpidana. Bahwa terpidana adalah manusia biasa yang suatu waktu bisa berubah tingkah lakunya. Hal ini disebabkan karena ide individualisasi pidana itu sendiri selalu dikaitkan dengan orangnya, sehingga apabila orangnya berubah maka pidananya juga harus berubah.

Prinsip keempat adalah hak-hak individu harus dilindungi terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin timbul atau tindakan melawan hukum lainnya dari pihak treatment tribunal. Sebagai pihak yang tidak dibekali secara khusus pendidikan dibidang ilmu hukum pidana, adalah hal yang sangat mungkin pihak treatment tribunal melakukan kesewenang-wenangan atau tindakan melawan hukum lainnya. Karenanya terpidana sebagai manusia yang mempunyai hak-hak individu perlu mendapat perlindungan meskipun dia telah terbukti kesalahannya di pengadilan.

Mengenai tindakan non-custodial pada tahap peradilan dan pemidanaan (*"trial and sentencing stage"*) yang diatur dalam *Tokyo Rules* diatas, beberapa bentuk telah terakomodasi dalam Konsep KUHP Indonesia sejak tahun 1964 s/d 2000. Lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan perubahan dan perkembangan penyusunan jenis sanksi pidana dalam Konsep KUHP Baru.

1. Dalam Konsep tahun 1964 dan tahun 1972 dirumuskan sebagai berikut :

Jenis pidana adalah :

A. Pidana Pokok :

1. pidana mati;
2. pidana pemasyarakatan;
3. pidana pembimbingan;
4. pidana peringatan;
5. pidana perserikatan.

B. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu;
3. pengumuman keputusan hakim;
4. pengenaan kewajiban ganti rugi;
5. pengenaan kewajiban agama;
6. pengenaan kewajiban adat

Lebih lanjut dalam Pasal 45 dirumuskan pidana pemasyarakatan terdiri dari pidana pemasyarakatan istimewa, pidana pemasyarakatan khusus dan

pidana pemasyarakatan biasa. Sedang pidana pembimbingan terdiri dari pidana pengawasan, pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja dan pidana kerja bhakti (Pasal 46). Pidana Peringatan sendiri terdiri dari pidana denda dan pidana tegoran (Pasal 47).

2. Dalam Konsep tahun 1982/1983 dirumuskan sebagai berikut :

Jenis-Jenis Pidana

(1) Pidana pokok :

- 1.1. Pidana pemasyarakatan
- 1.2. Pidana tutupan
- 1.3. Pidana pengawasan
- 1.4. Pidana denda

(2) Pidana tambahan :

- 2.1. Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2.2. Perampasan barang-barang tertentu.
- 2.3. Pengumuman keputusan hakim.
- 2.4. Ganti Rugi.
- 2.5. Kewajiban adat.

(3) Pidana mati merupakan pidana pokok yang istimewa.

Konsep tahun 1982/1983 ini perumusan sanksinya berbeda dengan konsep sebelumnya dimana pidana pembimbingan dihapus diganti dengan pidana pengawasan yang sebelumnya dirumuskan sebagai salah satu jenis pidana pembimbingan disamping pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja dan pidana kerja bhakti. Sedangkan pidana denda yang semula

bagian dari pidana peringatan disamping pidana tegoran (pidana tegoran juga dalam konsep tahun 1982/1983 dihapuskan) menjadi jenis pidana pokok yang berdiri sendiri menghapuskan pidana peringatan. Muncul pidana baru yaitu pidana tutupan dan kedudukannya menghapuskan pidana perserikatan. Dalam Pidana tambahan, pidana kewajiban agama dihapuskan.

Terhadap tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua yang diancamkan hanyalah tiga jenis pidana, ialah pidana pemasyarakatan dan atau pidana denda dan atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan sebenarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pidana mati dicantumkan dalam ayat tersendiri hanya untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat istimewa, meskipun jika dibandingkan dengan jenis-jenis pidana yang lain dipandang yang paling berat. Oleh karena itu pidana mati harus diancamkan secara alternatif. Jenis pidana tambahan yang baru dibandingkan konsep sebelumnya adalah pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat.

3. Dalam Konsep tahun 1983 / 1984 dirumuskan sebagai berikut :

Jenis-Jenis Pidana

(1) Pidana pokok :

Ke-1 Pidana penjara

Ke-2 Pidana tutupan

Ke-3 Pidana pengawasan

Ke-4 denda

(3) ...

(4) Pidana tambahan :

Ke-1 Pencabutan hak-hak tertentu.

Ke-2 Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.

Ke-3 Pengumuman putusan hakim.

Ke-4 Pembayaran Ganti Kerugian.

Ke-5 Pemenuhan Kewajiban Adat.

(5) Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.

Dibandingkan konsep sebelumnya (Konsep tahun 1982/1983) ada perubahan dalam hal penyebutan pidana pemasyarakatan yaitu menjadi pidana penjara sedangkan jenis pidana yang lainnya tetap sama seperti konsep tahun 1982/1983.

4. Dalam Konsep tahun 1987/1988 dirumuskan sebagai berikut :

(1) Pidana pokok :

Ke-1 Pidana penjara

Ke-2 Pidana tutupan

Ke-3 Pidana kerja sosial

Ke-3 Pidana pengawasan

Ke-4 Pidana denda

(2) ...

(3) Pidana tambahan :

Ke-1 Pencabutan hak-hak tertentu.

Ke-2 Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.

Ke-3 Pengumuman putusan hakim.

Ke-4 Pembayaran Ganti Kerugian.

Ke-5 Pemenuhan Kewajiban Adat.

(4) Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.

Dibandingkan konsep sebelumnya ada penambahan jenis pidana pokok yaitu pidana kerja sosial dan pada konsep selanjutnya (s/d konsep tahun 1999/2000) mengalami perubahan dimana penempatannya/susunannya dibawah pidana denda dengan alasan bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara dan juga alternatif pidana denda maka penempatannya harus dibawah pidana denda. Pidana kerja sosial sendiri merupakan jenis pidana pokok baru, yang dipelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat “*daad daderstrafrecht*”, yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan.

Bentuk-bentuk tindakan Non-Custodial dalam *Tokyo Rules* juga tampak dalam perumusan jenis sanksi yang diperuntukkan untuk anak, mulai Konsep Tahun 1991/1992 yaitu :

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

a. Pidana nominal :

1. pidana peringatan; atau
2. pidana teguran keras;

- b. Pidana dengan syarat :
 - 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 - 2. pidana kerja sosial; atau
 - 3. pidana pengawasan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kemerdekaan:
 - 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 - 2. pidana penjara; atau
 - 3. pidana tutupan.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Timbul pertanyaan sekarang, apakah pembagian jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sudah tepat ? Menurut penulis tidak perlu dilakukan pembagian antara pidana pokok dan pidana tambahan kalau pada akhirnya dalam penerapannya bisa sendiri-sendiri maupun bisa digabung misalnya pidana penjara dan perampasan barang-barang tertentu. Lebih baik jenis-jenis pidana yang ada disusun berdasarkan urutan berat ringannya sanksi dari pidana itu sendiri tanpa harus dipisahkan dengan klasifikasi pidana pokok dan pidana tambahan. Sehingga dengan penyusunan seperti ini hakim bebas menentukan preferensi/pilihan (yang merupakan fase kedua). Penyusunan jenis-jenis pidana di beberapa negara juga tidak berdasarkan

klasifikasi pokok dan tambahan. Contoh di KUHP Greenland (*Greenland Criminal Code*) Pasal 85 sanksi itu berupa : ³²⁾

- (1) *Warning*/peringatan
- (2) *Fine*/denda
- (3) *Restrictions as to residence and visiting particular places*/pembatasan-pembatasan tempat kediaman dan kunjungan ke tempat-tempat tertentu.
- (4) *Compulsory labor*/Kerja Wajib
- (5) *Compulsory training*/Latihan Wajib
- (6) *Medical treatment*/Perawatan kesehatan
- (7) *Placement in an institution*/Penempatan di dalam sebuah lembaga
- (8) *Other limitations on freedom of action*/pembatasan untuk berbuat
- (9) *Confiscation*/perampasan

Selain sanksi diatas, dalam KUHP Greenland Pasal 97 ditetapkan juga jenis sanksi berupa *Probation*/pidana pengawasan.

Pemilihan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan satu atau beberapa jenis sanksi mana yang akan diterapkan tergantung pengadilan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 86.

Pidana tambahan, sebagaimana terlihat pada namanya, dimaksudkan sebagai “tambahan” pada pidana pokok. Pidana tambahan ini, dari istilah bahasa Belanda “*bijkomende straffen*”, karena itu mempunyai sifat “lebih ringan” (hanya *toevoegsel* atau *aanhangsel*) dari pidana pokok. Pada

³²⁾ *The Greenland Criminal Code*, Fred B. Rothman & Co., New York, 1971, hal .36, 37, 41. Lihat pula Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995.

dasarnya pidana tambahan inipun bersifat “fakultatif”,³³⁾ akan tetapi, sebagai pengecualian dapat pula wajib dijatuhkan (misalnya pada Pasal 250 bis KUHP lama : perampasan mata uang palsu). Selain lebih ringan, pidana tambahan juga tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri tanpa pidana pokok. Namun dalam Konsep KUHP Baru, hal ini bisa disimpangi apabila diterapkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dengan tujuan memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis pidana termasuk pidana tambahan.³⁴⁾

Perbedaan pidana tambahan dengan pidana pokok menurut Roeslan Saleh adalah :³⁵⁾

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Akan tetapi inipun ada pengecualiannya. Perampasan barang-barang tertentu, misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan (*maatregel*) dan bukanlah pada pidana pokok.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi

³³⁾ Lamintang dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Pioner, Bandung, 1992. Lihat pula dalam Joko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 69-70. Lebih lanjut Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 10 mengatakan bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Akan tetapi untuk hukum pidana khusus ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang disebut dalam KUHP.

³⁴⁾ Mardjono Reksodiputro, *Jenis-jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru*, Makalah pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana, BPHN, tanggal 5-7 Pebruari 1986 di Jakarta, hal. 2.

³⁵⁾ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 10. Lihat pula Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Penerbit Tinta Mas, 1987, hal. 326-327.

pidana pokok. Akan tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka ia boleh menjatuhkan pidana tambahan dan boleh pula tidak. Mengenai ini juga ada pengecualian yaitu di dalam Pasal-pasal 250 bis 261 dan 275 KUHP, diperintahkan supaya benda-benda itu dirampas (imperatif).

3. Mulai berlakunya pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Mengenai pidana tambahan ini juga mengemuka pada saat dilakukan pembahasan pada Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi pidana seperti Jimly Asshidigi yang menyarankan bahwa pidana tambahan diubah karena dengan istilah itu timbul kesan bahwa pidana jenis ini haruslah bersifat tambahan, dan berarti ada yang ditambah, sehingga kategori pidana itu menjadi pidana pokok dan pidana lainnya. Jadi disini tampaknya Jimly Asshidigi masih setuju dengan penyebutan pidana pokok kecuali penyebutan untuk pidana tambahan diganti/diubah.

Namun pada saat dilakukan pembahasan lebih lanjut (sidang kelompok dalam hal ini sidang kelompok IV yang diketuai J.E. Sahetapy) perubahan nama untuk pidana tambahan ditolak oleh kelompok sehingga perumusannya tetap yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

B.2. Pengertian Pidana Pengawasan

Istilah *probation* berasal dari bahasa latin *probare* yang berarti menguji atau membuktikan. Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa *Probation*/pidana pengawasan adalah penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan dengan menempatkan pelaku tindak pidana di luar lembaga sebagai pengganti pidana penjara atau kurungan berdasarkan pertimbangan kondisi dari si pelaku (*A court-Imposed criminal sentence that, subject to stated conditions, releases a convicted person into the community instead of sending the criminal to jail or prison*)³⁶⁾.

Di Hong Kong, *A Probation Order is not a sentence in itself but is considered as a suspended sentence giving the offender a chance to show remorse for the offence he had committed and make the necessary amends; if he successfully completes the period of probation the charge brought against him is dropped. If he fails to complete his probation period successfully, then can be brought back to the juvenile court for revocation of the Probation Order. He will be dealt with for his original charge in addition to any other offenses he has committed during the Probation Order.*³⁷⁾

³⁶⁾ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, United States of America: West, Seventh Edition, 1999, hlm. 858 dan 276.

³⁷⁾ The Seminar-cum-Field Study on Programmes to Rehabilitate Juvenile Delinquents in the ESCAP Region, 6-24 Januari 1992, collaboration with the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), hal 211.

Menurut Peter C. Kratcoski dan Lucille Dunn Kratcoski, "*probation*" *can refer to a disposition given to an adjudicated delinquent by a juvenile court judge, or it may be used to describe the probation process.*³⁸⁾

Sedangkan menurut Wolf Middendorff, *Probation is chiefly valuable as a substitute for imprisonment, since it avoids both the harmful effects and the higher costs of a prison sentence.*³⁹⁾

Sedang kata "*probation*" sendiri menunjuk pada : 1) *a disposition of the juvenile court in lieu of institutionalization*; 2) *the status of an adjudicated offender*; 3) *a subsystem of the juvenile justice system (the term's most common use)*; or 4) *the activities, functions, and services that characterize this subsystem's transactions with the juvenile court, the youthful offender, and the community.*⁴⁰⁾

Menurut G. Larry Mays & L. Thomas Winfree, ada 3 pengertian mengenai probation yaitu : ⁴¹⁾

- a. *First, probation is conditional. Juvenile placed on probation have certain restrictions placed on their freedom. They have conditions imposed on them by juvenile probation officers and backed by the court's authority, and their freedom is dependent on the degree to which they live up to those conditions.*

³⁸⁾ Peter C. Kratcoski & Lucille Dunn Kratcoski, *Juvenile Delinquency Second Edition*. Lihat pula dalam Clemens Bartollas and Stuart J. Miller, *The Juvenile Offenders: Control, Correction and Treatment*, Holbrook Press, 1978, hal. 126 "*Probation is a judicial disposition under which youthful offenders are subject to certain conditions imposed by the juvenile court and are permitted to remain in the community under the supervision of a probation officer*"

³⁹⁾ Harold D. Hart, *Punishment: For & Against*, Hart Publishing Company, Inc., New York City, 1971, hal. 34.

⁴⁰⁾ Clemens Bartollas and Stuart J. Miller, *Loc. Cit*, hal. 126.

⁴¹⁾ G. Larry Mays & L. Thomas Winfree, *Juvenile Justice*, The Mc Graw Hill Companies, Inc., United States of America, 2000, hal. 189.

- b. *Second, probation is a sentence. In fact, it is the primary disposition ordered by juvenile and family court judges. Juveniles on probation remain under the court's supervision enforced through juvenile probation officers surveillance.*
- c. *Third, probation is ordered and monitored by the courts. This fact makes probation a judicial function, in contrast with parole, which is essentially an executive function.*

Sedangkan menurut Aryeh Neier :⁴²⁾ *Probation is used as a way of rewarding a police informant, as a method of permitting a convicted person to work and make restitution, or as a way to allow a criminal to support his family. It may be used as a method of encouraging guilty pleas (apparently its purpose in the sentencing of Spiro Agnew). Sometimes it is used because there isn't enough room to house any more people in the jails, and probation may also be employed as a relatively mild punishment for first offenders or for people who have committed relatively minor crimes.*

Dari beberapa pengertian *probation* diatas, maka *probation* berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan. Sistem ini berusaha untuk menghindari cara-cara pembinaan narapidana didalam penjara yang tidak alamiah dan seringkali kondisinya secara sosial tidak sehat. *Probation* yang berhasil memerlukan penelitian yang seksama terhadap

⁴²⁾ Aryeh Neier, *Crime and Punishment A Radical Solution*, A Scarborough Book Stein And Day, Publishers, New York, 1975, hal. 173.

lingkungan hidup pelaku tindak pidana, karakter dan pengalamannya dimasa lalu, suatu sistem seleksi yang bijaksana oleh pengadilan terhadap kemampuan pelaku pidana untuk memanfaatkan sistem pembinaan tersebut, dan suatu sistem pengawasan yang rajin, tekun dan simpatik. Yang menarik dari definisi diatas, bahwa di Hong Kong *probation* bukan sebagai pidana tapi sebagai *suspended sentence* sedangkan menurut G. Larry May & L. Thomas W. *Probation* adalah pidana.

Pengertian mengenai pidana pengawasan ini menurut penulis tidak tersurat dalam Konsep KUHP Baru maupun dalam UU No. 3 Tahun 1997.

Di Indonesia, pidana pengawasan bukanlah pidana yang sebelumnya tidak pernah dikenal sama sekali sebab pidana ini menggantikan pidana bersyarat dalam usaha mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Bilamana pengaturan pidana pengawasan tersebut dibandingkan dengan pidana bersyarat dalam WvS, maka terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

- (1) Pidana pengawasan dijatuhkan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pemasyarakatan paling lama tujuh tahun atau kurang. Dalam WvS maka syarat penjatuhan pidana bersyarat adalah dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun atau sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda atau dalam hal menyangkut pidana

denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda dengan batasan betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

- (2) Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama tiga tahun, sedangkan masa percobaan dalam pidana bersyarat ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal-pasal 492, 504, 506, dan 536 KUHP dan pelanggaran lainnya dua tahun.
- (3) Di dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina Departemen Kehakiman yang dapat minta bantuan dari Pemerintah Daerah, Lembaga sosial atau orang lain, sedangkan pada pidana bersyarat dibedakan antara pengawasan umum yang dilakukan oleh Jaksa dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu.
- (4) Pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang mandiri (*independent punishment*), sedangkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (*modality of punishment*).

Sedangkan apabila pidana bersyarat di Indonesia dibandingkan dengan probation, menurut Djoko Prakoso, maka keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara keduanya adalah baik pidana bersyarat maupun probation merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap terpidana yang bersifat non-institusional. Perbedaannya adalah pidana bersyarat merupakan suatu bentuk pemidanaan sedangkan probation tidak dipandang sebagai pidana dalam arti yang sesungguhnya.

Pada probation tidak dikenal syarat khusus misalnya penggantian kerugian kepada si korban yang dimungkinkan pada pemidanaan dengan perjanjian. Soedarto tidak keberatan pidana bersyarat diidentikan dengan probation, asal probation jangan diartikan secara klasik seperti yang terdapat di Inggris melainkan meliputi pemidanaan yang ditangguhkan (*suspended sentence*). Probation bagi orang yang untuk pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*) memang penting hanya kalau orang ingin bersungguh-sungguh melaksanakannya.⁴³⁾

Antara *probation*/pidana pengawasan dan *suspended sentence*/pidana bersyarat/pidana yang ditunda seringkali terjadi kekacauan pengertian. Kedua istilah tersebut seringkali dipergunakan secara bergantian. Yang jelas **suspended sentence bukanlah probation**. Probation harus dilakukan dengan pengawasan, sedangkan dalam hal pidana yang ditunda, para hakim dibatasi oleh undang-undang bilamana hendak memintanya.⁴⁴⁾

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Departement of Social Affairs, Devision of Social Wlfare*) tentang hasil-hasil praktis dan aspek finansial probation terhadap orang-orang dewasa di beberapa negara tertentu (1954) dapat disimpulkan, bahwa kedua bentuk penundaan pidana tersebut melayani tujuan yang berbeda. Penundaan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan secara pasti didasarkan atas skala pemidanaan yang bersifat represif, dengan menggunakan pidana yang pasti

⁴³⁾ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 178.

⁴⁴⁾ Muladi I, *Op. Cit*, hal. 157.

sebagai alasan pencegahan. Sebaliknya penundaan penjatuhan pidana didasarkan atas suatu tujuan pembinaan yang konstruktif di masyarakat.⁴⁵⁾

Di Amerika Serikat "*probation*" menempati posisi yang utama di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, hal ini ditunjukkan dari tingkat keberhasilannya menangani kasus yang mencapai 75% sedangkan untuk parole tingkat keberhasilannya hanya sekitar 55 s/d 65% saja.⁴⁶⁾ Probation hanya dijatuhkan terhadap kejahatan ringan dan tidak dapat dijatuhkan terhadap kejahatan pembunuhan dan perkosaan, narkotik dan kejahatan mengenai senjata. Terutama di Amerika Tengah yaitu di kota-kota prairi, probation ini dijalankan sangat intensif. Dibentuk suatu jabatan probation yang memberi advis apakah hakim perlu memberikan probation ataukah menjatuhkan pidana penjara. Advis pejabat ini efektif sekali terhadap putusan hakim, karena ternyata menurut statistik, diantara 131 orang 84 orang dikabulkan mendapat probation sesuai rekomendasi, sedangkan semua yang diusulkan mendapat probation diterima oleh hakim. 41 orang ditolak karena tidak diusulkan dan hanya 6 orang diberi probation tanpa usul. Seorang terpidana yang telah pernah ditolak mendapat probation sebelumnya, tidak akan mendapat probation lagi jika ia mengulangi kejahatannya. Menurut Undang-undang di Illinois, seseorang mendapat probation jika :

- a. Terdakwa tidak melakukan kejahatan lain.
- b. Kepentingan umum tidak menuntut agar terdakwa mendapat pidana sesuai dengan kejahatannya.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hal. 169.

⁴⁶⁾ Howard Abadinsky, *Probation and Parole : Theory and Practice*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, hal. 388

- c. Rehabilitasi terdakwa tidak perlu melalui pemidanaan yang diperuntukkan bagi delik itu.

Jadi, disana hakim selalu menghadapi dua alternatif, jika terdakwa terbukti bersalah seperti yang didakwakan, yaitu penjatuhan pidana atau probation. Berbeda dengan di Indonesia dimana pidana bersyarat jarang sekali dijatuhkan, mungkin tidak sampai 1% dari kejahatan ringan.⁴⁷⁾

Probation ini pertama kali dipergunakan oleh seorang tukang sepatu dari Boston, John Augustus, yang mempraktekkan pengawasan yang bersifat kekeluargaan pada permulaan tahun 1841. Ia mempergunakan banyak waktunya untuk mengunjungi pengadilan, dan membayar denda bagi pemabuk yang harus masuk penjara karena tidak dapat membayar denda.⁴⁸⁾

Untuk mengenakan probation biasanya diadakan pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Di Amerika Serikat, tindak pidana yang pelakunya dikecualikan dari pengenaan probation adalah tindak pidana yang secara tradisional tidak disukai (menjijikkan) oleh masyarakat, yakni (1) kejahatan-kejahatan kekerasan/*crime of violence*, (2) kejahatan-kejahatan terhadap moral/*crime against morals*, (3) kejahatan-kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata-senjata yang mematikan/*crimes involving the use of deadly weapons*, (4) kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang karena diupah oleh orang lain/*mercenary crimes* (5) kejahatan-kejahatan terhadap pemerintah/*crimes against the government* dan (6) kejahatan-kejahatan yang diancam pidana tertentu/*carrying a certain penalty*.

⁴⁷⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 35.

⁴⁸⁾ Howard Abadinsky, *Loc. Cit.*, hal 22.

Tetapi bagaimanapun juga, pemberian probation tersebut dalam instansi tertentu tergantung pengadilan. Wewenang Pengadilan dalam memberikan sanksi pidana non custodial berupa pidana pengawasan berdasarkan beberapa kriteria :⁴⁹⁾

- (1) Pengadilan akan menyetujui untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terpidana, dengan terlebih dahulu memperhatikan sifat dan riwayat kejahatan dan latarbelakang hidupnya, karakter dan kondisi terpidana, dimana tujuannya untuk melindungi masyarakat selama (*The Court shall deal with a person who has been convicted of a crime without imposing sentence of imprisonment unless, having regard to the nature and circumstances of the crime and the history, character and condition of the defendant, it is of the opinion that his imprisonment is necessary for protection of the public because*);
 - (a) Terpidana setuju bahwa selama menjalani pidana bersyarat/pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lainnya; atau (*there is undue risk that during the period of a suspended sentence or probation the defendant will commit another crime; or*)
 - (b) Terpidana membutuhkan tindakan perbaikan didalam sebuah lembaga; atau (*the defendant is in need of correctional treatment that can be provided most effectively by his commitment to an institution; or*)

⁴⁹⁾ The American Law Institute, *Model Penal Code Official Draft And Explanatory Notes*, as Washington, D.C., 1985, hal. 99.

(c) Pidana akan menurunkan tingkat kejahatan serius. (*a lesser sentence will depreciate the seriousness of the defendant's crime*)

(2) Diskresi oleh Pengadilan sebagai sesuatu yang hal mendasar, oleh karena itu Pengadilan hendaknya menghindari menjatuhkan pidana penjara :

(*The following grounds, while not controlling the discretion of the Court, shall be accorded weight in favor of withholding sentence of imprisonment:*)

(a) Kejahatan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan serius; (*the defendant's criminal conduct neither caused nor threatened serious harm;*)

(b) Terpidana tidak menyadari perilakunya tersebut bisa menimbulkan / termasuk kejahatan; (*the defendant did not contemplate that his criminal conduct would cause or threaten serious harm;*)

(c) Terpidana melakukan Tindak Pidana dibawah tekanan; (*the defendant acted under a strong provocation;*)

(d) Adanya alasan yang kuat untuk membenarkan perilaku/Tindak Pidana yang dilakukan terpidana, walaupun gagal menegakkan sebuah peraturan; (*there were substantial grounds tending to excuse or justify the defendant's criminal conduct, though failing to establish a defense;*)

(e) Korban dari perilaku kejahatan; (*the victim of the defendant's criminal conduct induced or facilitated its commission;*)

- (f) Kompensasi dari terpidana/memberi kompensasi kepada korban dari / akibat Tindak Pidana yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian/luka-luka; (*the defendant has compensated or will compensate the victim of his criminal conduct for the damage or injury that he sustained;*)
 - (g) Terpidana belum pernah dipidana; (*the defendant has no history of prior delinquency or criminal activity or has led a law-abiding life for a substantial period of time before the commission of the present crime;*)
 - (h) Tindak Pidana yang dilakukan sebagai hasil dari pengaruh lingkungan; (*the defendant's criminal conduct was the result of circumstances unlikely to recur;*)
 - (i) Adanya sikap untuk tidak mengulangi Tindak Pidana lagi; (*the character and attitudes of the defendant indicate that he is unlikely to commit another crime;*)
 - (j) Terdakwa menyetujui untuk dilakukannya tindakan pengawasan; (*the defendant is particularly likely to respond affirmatively to probationary treatment;*)
 - (k) Pidana penjara akan membawa/membuat terdakwa trauma. (*the imprisonment of the defendant would entail excessive hardship to himself or his dependents*)
- (3) Pada saat terpidana tidak dijatuhi pidana penjara, pengadilan akan mengirimkannya ke probation untuk mendapat pengawasan, bimbingan.

(When a person who has been convicted of a crime is not sentenced to imprisonment, the Court shall place him on probation if he is in need of the supervision, guidance, assistance or direction that the probation service can provide)

Pada bagian Explanatory Note/Catatan penjelas, dinyatakan bahwa : subsection/sub bagian (1) Didalam menjatuhkan putusan, pengadilan harus mempertimbangkannya secara matang, dipilih yang paling tepat, dan dalam memutuskannya berdasarkan temuan adanya 1/3 faktor untuk tujuan melindungi masyarakat. Ke-3 faktor tersebut dimana tidak perlu dijatuhkannya pidana penjara, perlunya rehabilitasi/perbaikan dan untuk menghindari pidana penjara. Subsection/subbagian (2) Ada 7 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghindari pidana penjara. 1 faktor tidak dipenuhi bukan berarti mengakhiri persoalan. Subsection/subbagian (3) Pengadilan seharusnya memilih antara probation dan conditional release, dimana/terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan pengawasan dan pembimbingan.

Di California misalnya saja terdapat ketentuan, bahwa bilamana pengadilan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang meringankan pembedaan berdasarkan undang-undang, atau pada akhir proses peradilan akan bermaksud memberikan probation kepada terdakwa, maka pengadilan mempunyai kekuasaan mengambil kebijaksanaan untuk menempatkan terdakwa di bawah probation. Sebaliknya di beberapa negara bagian, probation dapat diberikan sebelum pembedaan. Di Massachusetts, Superior

Court, (bukan *district* atau *unipical court*) dapat menempatkan seseorang di bawah probation sebelum perbuatan tersebut dituntut sebagai kejahatan. Pengadilan-pengadilan di Rhode Island mempunyai kekuasaan untuk membebaskan terdakwa di bawah probation sebelum pemidanaan. Di Kentucky, probation diperluas terhadap seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, kecuali kejahatan-kejahatan tertentu. Di salah satu daerah di Maine, seseorang yang dituntut karena suatu tindak pidana ringan dapat memperoleh probation tanpa adanya dakwaan dalam hal tertentu.⁵⁰⁾

⁵⁰⁾ Muladi I, *Op. Cit.*, hal 157-158.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai sanksi non-custodial dalam kebijakan legislatif di Indonesia.

A.1. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap UU No. 3 Tahun 1997, maka ide dasar perlunya merekomendasikan pidana pengawasan dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dari jawaban pemerintah melalui Menteri Kehakiman (Oetoyo Oesman) pada saat Rapat Kerja dengan Anggota DPR-RI sejak 18 Juni 1996 sampai dengan 5 Desember 1996, yaitu : ¹⁾

- a. Mengantisipasi KUHP yang baru;
- b. Menghindarkan anak dari Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Memberikan perlindungan atau pendidikan bagi anak;

Ide yang pertama yaitu mengantisipasi KUHP yang baru menurut Sudarto sebagai bentuk pelaksanaan politik hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. ²⁾

Ide yang kedua yaitu menghindarkan anak dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga masih bisa disatu pihak dibawah orang tua atau walinya, tapi perilakunya masih senantiasa dapat diawasi oleh petugas yang

¹⁾ Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Anak, Sekretariat Jenderal DPR RI.

²⁾ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 93 & 109.

berwenang, karena pada dasarnya anak ini dikenakan pidana, maka perilakunyapun masih diawasi oleh pejabat yang berwenang hanya penempatan si anak ini tidak lagi di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi bisa di rumah orang tua, atau wali yang bersangkutan. Ide untuk menghindarkan anak dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai akibat dipidana penjara sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Dalam peraturan-peraturan tersebut dicantumkan bahwa anak-anak dan remaja yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak biasanya tidak diberi hukuman penjara.³⁾

Selanjutnya memberikan perlindungan atau pendidikan bagi anak, karena sebagai anak tentunya dia tidak bisa menolong dirinya sendiri kecuali dengan bimbingan merupakan ide dasar yang ketiga perlunya merekomendasikan pidana pengawasan sebagai sanksi non custodial dalam UU No. 3 Tahun 1997. Perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak ada hubungannya dengan :⁴⁾

1) Pengayoman :

- a) Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut.

Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan

³⁾ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 8.

⁴⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 3-6.

diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik dan sosial yang maksimal.

- b) Yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya/panggilannya, bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat Pemerintah.

2) Usaha bersama :

- a) Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggungjawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut.
- b) Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka agar mencapai hasil yang baik (ini mungkin memakan waktu). Perlindungan ini adalah hasil suatu interaksi karena adanya interrelasi.
- c) Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan, bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak/remaja ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri juga, sesuai dengan kemampuannya.
- d) Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta maupun Pemerintah, dan bukan tanpa saling pengertian satu sama lain.

3) Kepentingan bersama :

Melindungi yang dilindungi berarti juga melindungi diri sendiri yang melindungi dikemudian hari dalam arti luas. Dengan melindungi seorang anak/remaja tadi dan juga dihindarkan kesulitan yang mungkin akan menimpa/mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) bila anak remaja tadi dilindungi/tidak dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana besar secara tepat bukanlah sesuatu yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu usaha di bidang pertahanan sosial juga demi ketertiban dan keamanan masyarakat.

4) Luas lingkup perlindungan :

- a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
- b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

5) Unsur-unsur yang edukatif :

- a) Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun. Dalam arti perlindungan itu harus diarahkan kepada kemampuan. Dapat mengemban *sense of achievement*-nya sehingga bermanfaat dalam pembangunan semesta Nasional.
- b) Pemberian perlindungan tidak boleh mengikat para peserta dalam pemberian perlindungan.

- c) Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri, rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi.

6) Penimbunan korban dalam pemberian perlindungan :

- a) Yang dilindungi menjadi korban tindakan dan perlindungan yang melindungi.
- b) Mencari keuntungan pribadi/golongan dalam kegiatan perlindungan harus dihindarkan.

7) Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Ide dasar dicantumkannya jenis pidana pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 1997 seperti tersebut diatas, banyak mendapat kritikan dari anggota Dewan karena ketidaksetujuan mereka apabila pidana pengawasan

dicantumkan sebagai salah satu pidana pokok yang dijatuhkan kepada Anak Nakal. Kritikan itu diantaranya :

- a. bahwa pidana pengawasan yang diusulkan oleh pemerintah tidak pernah dikenal selama ini dalam KUHP khususnya Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kritikan ini disampaikan oleh DJORALI PURBA dari Fraksi ABRI dan DRS. SABAR KOEMBINO dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP). Lebih lanjut diuraikan oleh FKP bahwa pidana pengawasan ini tidak terdapat dalam Pasal 10 KUHP (seharusnya “Pasal 10 KUHP”, pen.) dan darimanakah kiranya hal itu dicantumkan karena pelaksanaan daripada hukuman tentunya akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan pokoknya.⁵⁾
- b. dikemukakan oleh H. SUKARDI EFFENDI, SH dari Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa dalam praktek (Das Sein)nya, pidana pengawasan akan menemui kesulitan **teknis**, karena putusan nanti kalau akan dijatuhkan pidana pengawasan mau tidak mau akan diserahkan kepada petugas (Jaksa atau Bapas) untuk mengawasi. Menurut UU Kejaksaan bahwa Kejaksaan yang terbawah yaitu kejaksaan negeri itu berdomisili di Ibukota Kabupaten ataupun Kotamadya. Sekarang andaikata, ada seorang terpidana yaitu anak tadi yang kebetulan nun jauh disana diudik seratus kilo misalnya, berapa jumlah Jaksa yang harus di siapkan untuk selalu mengawasi seratus kilo selain dari pada transportnya, waktunya, jumlah Jaksa dan sebagainya. Dari segi **kewenangan**, disebutkan dalam salah satu

⁵⁾ Proses Pembahasan Rancangan UU RI tentang Pengadilan Anak, *Op. Cit.*, hal. 805.

Pasal bahwa dalam suatu putusan pengadilan tadi disebutkan Jaksa ataupun Bapas mengawasi. Jadi nanti dobel-dobel pengawasan, pengawasan sebagai vonis pidana pengawasan. Yang kedua sebagai tugas *follow-up*. Jadi setelah masuk Lapas masih ada juga pengawasan atau mungkin ditempatkan di luar Lapas.⁶⁾

Meskipun dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang sampai dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 1997 pencantuman pidana pengawasan banyak mendapat kritikan, pada akhirnya mereka (Anggota Dewan) sepakat untuk tetap mencantumkan pidana pengawasan tersebut. Terlepas dari hasil akhir berupa diterimanya pidana pengawasan kedalam UU No. 3 Tahun 1997, penulis ingin menyoroti mengenai alasan keberatan Anggota Dewan, bahwa pidana pengawasan selama ini tidak dikenal karena tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP, menunjukkan kurangnya pengetahuan dari Anggota Dewan dan tidak adanya keinginan dari Anggota Dewan untuk melakukan studi komparatif untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai hubungan dengan hukum pidana dari negara-negara lain yang meliputi :

- Apa yang tidak ada di Indonesia, tapi ada di negara-negara lainnya.
- Apa yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya, tetapi ada perbedaan dalam penerapan dan tafsiran.
- Apa yang ada di Indonesia dan di negara lainnya supaya diadakan perumusan bersama.

⁶⁾ *Ibid*, hal. 809.

Sedangkan terhadap kritik no. 2 tentang ketakutan akan menemui kesulitan dalam pelaksanaan pidana pengawasan, menurut penulis perlu dipertanyakan kembali, apakah benar akan menemui kesulitan, karena belum pernah kita jalankan. Selain itu, mengenai Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Pengawasan, dapat dilihat (sebagai gambaran) Laporan Akhir Tim Naskah Akademis dari BPHN Tahun 1999/2000 sebagai bahan rekomendasi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (4). Dalam mencari bentuk-bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan tetap bertitik tolak pada usaha pencapaian tujuan untuk memperbaiki perilaku anak dalam menjalani kehidupan sosialnya serta untuk mencegah agar anak yang bersangkutan tidak melakukan pengulangan tindak pidana, disamping diharapkan pula mampu menimbulkan prevensi umum (*general deterrence*) bagi anak yang lain agar tidak menjadi anak nakal.

Berbeda dengan Konsep KUHP, selain pidana pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 1997 juga tetap mencantumkan pidana bersyarat. Hal ini juga dipertanyakan oleh Anggota Dewan mengenai dasar pemikiran tetap memasukkan pidana bersyarat padahal pengertiannya hampir sama dengan pidana pengawasan. Tapi sayangnya pertanyaan ini kurang mendapat jawaban yang memuaskan dari pemerintah dan lebih disayangkan lagi, anggota dewan menerima saja jawaban itu walaupun menurut penulis belum nampak ide yang melatarbelakanginya.

A.2. Dalam Konsep KUHP Baru ⁷⁾

Kebijakan legislatif yang mencantumkan pidana pengawasan dalam Konsep KUHP terlihat pada penjelasan umum Buku I angka 3, dinyatakan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diatur mengenai jenis pidana yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, salah satunya huruf (c) adalah pidana pengawasan. Jenis sanksi pidana pengawasan dirumuskan dalam Pasal 60 sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi orang dewasa dan Pasal 109 sebagai salah satu jenis pidana pokok bagi anak yang dikategorikan dalam “pidana dengan syarat” yang terdiri dari (1) pidana pembinaan diluar lembaga; (2) pidana kerja sosial; atau (3) pidana pengawasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa Konsep KUHP Baru menetapkan pidana pengawasan tidak saja untuk orang dewasa tapi juga untuk anak.

Dalam Penjelasan Pasal 111, dijelaskan bahwa pidana dengan syarat berbeda pengertiannya dengan pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP (WvS). Pidana dengan syarat artinya bahwa, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi pidana berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim selalu harus menjatuhkan syarat-syaratnya, baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan perpanjangan waktu menjalani pidana. Pidana pengawasan

⁷⁾ Konsep KUHP Baru yang dimaksud disini merupakan Konsep KUHP 1999/2000.

yang diancamkan untuk anak mutatis mutandis serupa dengan pidana pengawasan untuk terpidana dewasa.

Pengaturan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok seperti tersebut diatas dilakukan berdasarkan pokok pikiran/ide dasar :

a. Menghindarkan dari pidana penjara.

Ide ini nampak dari perumusan Pasal 72 Konsep KUHP Baru, bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan.⁸⁾ Pidana penjara dilihat dari sejarahnya baru digunakan pada akhir abad ke-18 (delapan belas) yang bersumber pada paham individualisasi.⁹⁾ Walaupun dalam perkembangannya pidana penjara ini dapat dikatakan sebagai pidana yang telah menjadi milik dunia, namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali tentang akibat yang tidak menguntungkan dari penggunaan pidana penjara ini. Akibat yang tidak menguntungkan ini dapat bersifat filosofis maupun praktis.¹⁰⁾ Ditinjau dari segi filosofis maka hal-hal yang saling bertentangan, yakni di satu pihak diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi narapidana dengan pendekatan manusiawi, namun dilain pihak sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengalaman dan pengendalian narapidana tidak dapat

⁸⁾ Hasil Penelitian Barda N. Arief dalam Disertasi beliau diperoleh gambaran bahwa sejak tahun 1973 s/d 1982 sebanyak 355.456 kasus dari 434.313 terdakwa dijatuhi pidana penjara.

⁹⁾ R. A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961, hal. 7-8.

¹⁰⁾ Muladi, *Masalah-masalah Hukum No. 3 Th. XVI 1986*, hal. 10, tentang Pelaksanaan Pidana Perampasan Kemerdekaan.

ditinggalkan begitu saja. Dilihat dari segi praktis kerugian tersebut tampak sebagaimana dilukiskan oleh Clemer,¹¹⁾ bahwa penjara pada hakekatnya merupakan suatu masyarakat didalam suatu masyarakat, bahkan merupakan suatu sistem sosial yang informal yang disebut subkultural narapidana. Melalui proses sosialisasi yang disebut prisonisasi narapidana baru akan menjadi terpenjara dan makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi penjahat hambatan semakin besar. Pidana penjara oleh R.M. Jackson dipandang suatu jenis pidana yang kurang efektif, didalam penelitiannya dikemukakan bahwa rata-rata angka pengulangan atau angka penghubungan kembali berbanding terbalik dengan usia pelaku. Angka yang tinggi terjadi pada anak-anak yaitu mencapai 50%, dan angka pengulangan tertinggi terjadi pada usia dibawah 21 tahun yaitu 70%.¹²⁾ Dibanyak negara masalah efektifitas pidana penjara ini juga banyak mendapat kritik dan ada kecenderungan untuk menggantikan lembaga pidana penjara dengan pidana yang lain.¹³⁾ Disamping itu pidana penjara dipandang tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal, hilangnya kebebasan pribadi, kebebasan untuk mandiri yang hilang.¹⁴⁾ Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya

¹¹⁾ Roger Hood & Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, World University Library, London, 1970, hal. 217-227.

¹²⁾ Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972, hal. 306-308.

¹³⁾ Lihat pula kongres ke-4 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Tindakan terhadap pelaku, 1975, no. 265.

¹⁴⁾ Gresham M. Sykes, *The Panins of Punishment*, dalam Disertasi Barda Nawawi Arief.

kemerdekaan berusaha dari orang itu yang mengakibatkan juga hilangnya penghasilan. Kondisi yang demikian ini akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan anak-anak dan keluarganya. Terlebih adanya akibat cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat yang lain juga sering dipandang menyebabkan turunnya tingkat derajat harga diri manusia, yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri. Kritik yang cukup radikal dilihat sudut politik kriminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, apabila akan lebih kelihatan terutama pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau remaja. Sehubungan dengan hal tersebut sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tingginya atau pabriknya kejahatan. Mengenai kritik terhadap pidana penjara ini, *The American Correctional Association* pada tahun 1959 telah mengemukakan bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Dinyatakan selanjutnya, bahwa pidana penjara yang bersifat pembedaan saat ini bukanlah alat yang efektif.¹⁵⁾ Menurut Koesnoen, suatu politik perbaikan narapidana yang mengandung sifat pembedaan dan pembalasan tidak lagi mendapat sambutan. Rehabilitasi narapidana dalam suasana perikemanusiaan telah menjadi *primus inter peres* dan tujuan pasti dari

¹⁵⁾ Donal Taft and R.W.England, Jr., *The Criminology*, Macmillan Co, New York, 1964, hal. 415.

tiap politik kepenjaraan.¹⁶⁾ Kritik-kritik ini juga dilontarkan pada pidana penjara menurut pandangan yang retributif yang tradisional, sampai pada pandangan yang modern yang lebih mengacu pada perbaikan narapidana. Untuk mengurangi akibat yang tidak menguntungkan dengan adanya pidana penjara tersebut, telah ditempuh langkah-langkah pembaharuan di bidang pelaksanaan pidana penjara, baik yang bersifat universal (internasional) maupun khusus perbaikan seperti di Indonesia yaitu menghindarkan pengenaan pidana penjara dan menetapkan pidana pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru.

- b. Memungkinkan terpidana untuk bekerja yang secara ekonomis menguntungkan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Ide ini dirumuskan dalam bentuk syarat yang harus dipenuhi terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan (Pasal 73 ayat (3) huruf c), bahwa terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Perbuatan tersebut (bisa diartikan sebagai sebuah pekerjaan .pen), akan dibayar dan hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.

Ide ini mirip dengan salah satu syarat yang ditentukan dalam KUHP Polandia. Berdasarkan pasal 73-79 KUHP Polandia¹⁷⁾, maka pengadilan dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan pidana secara bersyarat bagi pidana pencabutan kemerdekaan yang tidak melebihi dua tahun dalam hal

¹⁶⁾ R.A. Koesnoen, *Op. Cit*, hal. 77.

¹⁷⁾ Edward M. Wise & Gerhard O.W. Mueller, *Studies In Comparative Criminal Law*, New York University, 1975, hal. 94-95.

kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan bagi pidana perampasan kemerdekaan yang tidak melebihi tiga tahun dalam hal kejahatan yang dilakukan karena kealpaan. Didalam memutuskan penundaan pidana tersebut pengadilan harus mempertimbangkan sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang menyangkut si pelaku tindak pidana, perilakunya pada masa lalu, dan segala faktor lain yang memberikan pembenaran atas kesimpulan bahwa sekalipun pidana tidak akan dilaksanakan, si pelaku tindak pidana akan mentaati hukum dan tidak akan melakukan kejahatan lain. Pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah keuntungan-keuntungan sosial yang dicapai oleh pemidanaan membenarkan penundaan pelaksanaan pidana.

Penerapan pidana dapat ditangguhkan untuk jangka waktu antara 2 sampai 5 tahun. Pengadilan dapat menentukan syarat-syarat bagi si pelaku untuk (1) melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya, (2) mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, (3) melakukan pekerjaan atau jasa-jasa pelayanan khusus untuk kepentingan umum, (4) melakukan pekerjaan yang menguntungkan atau mengikuti suatu pendidikan atau latihan keterampilan yang akan bermanfaat baginya untuk memperoleh pekerjaan yang menguntungkan, (5) menghentikan penggunaan alkohol yang berlebihan, (6) menjalani pembinaan medis, (7) menghentikan kunjungan ke tempat-tempat tertentu atau keterlibatan di dalam pergaulan dengan orang-orang atau kelompok tertentu, (8) mematuhi beberapa

ketentuan tata tertib selama jangka waktu penangguhan pidana yang akan mencegahnya untuk melakukan tindak pidana yang lain.¹⁸⁾

c. Pidana pengawasan akan mencegah terjadinya stigma.

Menurut Hoefnagels¹⁹⁾ Stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak (*stigma occurs when a person's identity is spoiled, which means that agreement between what someone is and the judgment of society on him is spoiled*). Terganggunya identitas seseorang semakin dipicu dengan masuknya seseorang tersebut ke lembaga pemasyarakatan. Kondisi dan lingkungan kehidupan lembaga pemasyarakatan sedikit banyak akan membentuk kepribadian dan membekas yang sisa-sisanya akan nampak setelah keluar dari lembaga. Secara psikologis stigmatisasi ini menimbulkan kerugian yang terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia adalah seorang penjahat, dengan segala akibatnya. Stigma seringkali dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat menyedihkan di dalam kaitannya dengan pandangan kita terhadap kejahatan dan pembedaan.

Dalam Kongres PBB ke-5 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* yang diadakan di Geneva pada tahun 1975 dinyatakan dalam bagian *reforms of criminal law* butir 177 (f) bahwa : *it seemed possible to suggest to all countries some general guidelines*

¹⁸⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 166-167.

¹⁹⁾ Peter Hoefnagels, *The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology*, F.H. Universitas Pajajaran, Bandung, 1984, hal. 26.

which owing to the limitation of the present report, necessarily had to be brief a persistent endeavour to select measures that carried the least stigma and with the application of which the community could be associate. Selanjutnya disebutkan pula dalam butir ke 187 kongres tersebut dalam bagian *non-judicial forms of social control* bahwa : *special care should be taken to avoid social labeling and stigmatization. To that end an extensive information campaign should be launched to ensure that the whole population knew and accepted the view that the fate of the handicapped deviants and offenders was the business of the entire community and of each of its members.*²⁰⁾

Yang sangat dibutuhkan dalam hal ini menurut Hoefnagels adalah suatu suntikan (*injection*) dari pemikiran sosiologis kedalam keseluruhan administrasi peradilan pidana guna menjamin supaya keganjilan-keganjilan pada saat ini dalam hubungannya antara stigma dan penghukuman dapat ditekankan sampai pada tingkat minimum yang tidak dapat dihindari.

Andenaes dalam hal ini menyatakan, bahwa didalam sistem tradisional, pidana diartikan sebagai pernyataan pencelaan sosial terhadap suatu perbuatan.

Peradilan pidana digambarkan sebagai suatu “permainan moralitas” (*morality play*) bahkan juga merupakan upacara degradasi (*degradation ceremony*).

²⁰⁾ Dokumen, *Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1975, UN., New York, 1976, hal. 23-24.

Penghukuman dan pidana meninggalkan stigma moral, dan si terhukum dicap jahat.

Stigma moral ini mungkin sangat ringan dan hampir-hampir tidak ada, misalnya saja didalam tindak-tindak pidana lalu lintas dan tindak-tindak pidana ringan yang lain, tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan keberatan seseorang untuk melakukan sesuatu karena bertentangan dengan kepercayaannya (*conscientious objectors*) dan pelaku-pelaku tindak pidana lain yang motifnya secara ideal dapat diterima.

Tetapi paling tidak dalam hal menyangkut kejahatan-kejahatan tradisional stigma moral didalam pemidanaan ini tampak secara jelas.

Karakter pemidanaan sebagai pencelaan moral tidak diragukan lagi meningkatkan pengaruh pencegahan.

Untuk beberapa kelompok pelaku tindak pidana, stigmatisasi tersebut lebih banyak menimbulkan penderitaan dan oleh karena itu lebih menakutkan, daripada pengenaan pidananya sendiri.²¹⁾

d. Membantu terpidana untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

Ide ini tersurat kedalam tujuan pemidanaan keempat dimana bersifat spiritual dan sangat idiil. Ide ini merupakan tipe ideal bagi setiap bangsa dan negara khususnya Indonesia karena menjunjung tinggi manusia Indonesia sebagai insan yang berKetuhanan YME.²²⁾

²¹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 82-83.

²²⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 93.

- e. Masyarakat dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.
- f. Rehabilitasi dan resosialisasi

Ide ini sebagaimana yang direkomendasikan oleh *Sub Committee II The Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1980 di Caracas), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

*"in a resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and in activities aimed at the rehabilitation of offenders".*²³⁾

Perbedaan hakiki antara rehabilitasi dan resosialisasi menurut Sagarin dan Mac Namara adalah .²⁴⁾

"Rehabilitation... emphasizes changing the offender's attitudes. It is based on the "medical" or psychogenic model that reflects the belief that delinquency and crime are largely the result of emotional maladjustment... This coupled with theoretical and conceptual advances linking crime chiefly to social factors has led to... the most recent theoretical perspective in dealing with crime. That perspective characterized by the words (re) socialization and reintegration..."

Menurut Vello, proses rehabilitasi sendiri terjadi pada saat seorang tersangka ditahan polisi.²⁵⁾

²³⁾ Dokumen, *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Caracas Declaration, Caracas-Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980, hal. 11

²⁴⁾ Romli, *Op. Cit.*, hal.91.

²⁵⁾ Muladi, *Op. Cit.*, hal. 121.

Ide ditetapkannya pidana pengawasan itu sendiri kedalam Konsep KUHP Baru banyak mendapat kritikan seperti yang dikemukakan oleh Soekarno (dari BABINKUM ABRI pada saat Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional tanggal 13-15 Desember 1982 di Jakarta):

- Apakah petugas mampu untuk melaksanakan, karena pengawasan di Indonesia ini paling sulit.
- Dalam rancangan KUHP dan dalam KUHAP ada “Hakim Pengawas” yang tugasnya berlainan. Apakah ini nantinya tidak sulit dalam prakteknya?
- Eksekusi pidana bersyarat jarang/tidak pernah terjadi ini saja sudah mendapat tanggapan negatif dari masyarakat apalagi pidana pengawasan.

Oleh karena itu pidana pengawasan mohon ditinjau lagi dan lebih baik mempertahankan pidana bersyarat karena lebih memenuhi selera pencari keadilan.

Menurut penulis, kritikan Soekarno ini berdasarkan hasil penelitian Muladi pada saat menyusun Disertasi beliau yang menunjukkan hambatan dalam sistem pengawasan dan pembinaan. Tetapi satu hal yang dilupakan oleh Soekarno dan menjadikan kontradiksi dengan materi kritiknya yaitu dengan usulan untuk mempertahankan pidana bersyarat akibat ketidaktahuan atau kurang memahami bahwa pidana pengawasan merupakan perluasan dari pidana bersyarat. Jadi bukannya menghapuskan pidana bersyarat, hanya saja lebih diperluas dalam pengaturannya, yang sudah pasti lebih menguntungkan dari sebelumnya (pidana bersyarat). Selain itu alasan akan menemui kesulitan

dalam prakteknya (pada tahap aplikasi maupun eksekusinya) berdasarkan pengalaman sebelumnya menurut penulis perlu dipertanyakan kembali, sebab kesulitan tersebut timbul karena menyimpang dari Das Sollen/yang seharusnya sebagaimana ditentukan UU (tahap formulasi).

Selain kritikan juga ada yang memberikan saran berupa kemungkinan memperluas dijatuhkannya pidana pengawasan oleh Bismar Siregar yaitu Pidana pengawasan, apa salahnya diimbangi dengan jaminan ?

Adanya kritik dan saran terhadap pidana pengawasan ini, menurut penulis sah-sah saja mengingat alam demokrasi yang berkembang saat ini yang semuanya membawa ke arah kebaikan, namun hendaknya yang menjadi fokus perhatian sekarang adalah pada sistem yang di pilih.

B. Perwujudan pidana pengawasan dalam kebijakan legislatif.

B.1. Kebijakan Legislatif Dalam Memformulasikan dan Mewujudkan Pidana Pengawasan Pada Masa Kini.

Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogram itu.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan legislatif di Indonesia, maka dibawah ini akan diuraikan mengenai kebijakan legislatif tersebut dalam memformulasikan pidana pengawasan. Selain itu juga akan diuraikan kebijakan legislatif dari negara lain dalam merumuskan pidana

pengawasan/pidana bersyarat dalam KUHPnya sebagai bahan perbandingan untuk memformulasikan kebijakan legislatif yang akan datang di Indonesia.

B.1.1. Pengertian dan Jenis Pidana Pengawasan

a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997

Dalam UU ini selain sanksi berupa pidana pengawasan juga ada sanksi pidana bersyarat yang dapat diterapkan untuk Anak Nakal.

1) Pidana Pengawasan

Pengertian pidana pengawasan dalam hal ini menurut Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 30 adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.²⁶⁾ Dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai sistem apa yang digunakan (sursis simple atau prova). Tapi apabila melihat laporan akhir Tim Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan, disana terlihat bahwa apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka secara otomatis pidana pengawasan ditangguhkan.

²⁶⁾ UU No. 3 Tahun 1997, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman RI 1997/1998.

2) Pidana Bersyarat

Pengertian pidana bersyarat dalam hal ini adalah suatu pidana, dalam hal mana selama masa percobaan si terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut.

b. Dalam KUHP (WvS)

Pengertian pidana bersyarat dalam hal ini adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.²⁷⁾ Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana / *sistem sursis simple*.

c. Dalam Konsep KUHP Baru

Pidana pengawasan adalah suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara (Penjelasan Pasal 60 Konsep KUHP Baru)²⁸⁾

²⁷⁾ KUHP Moeljatno, Edisi Baru, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

²⁸⁾ Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, 1991-1992, *Rancangan UU RI No... th... tentang KUHP*.

d. Dalam KUHP Asing

1) Denmark

Menggunakan istilah *suspended sentence/Betinget Dom* (*Other penalties*). Ada 2 bentuk pidana tertunda/bersyarat dan 2 bentuk kombinasi/penggabungan pidana.²⁹⁾

2 bentuk pidana bersyarat :

a) Penetapan/penjatuhan pidana itu ditunda/*suspending the fixing of the penalty* (Pasal 56:1 PC).

Apabila pengadilan memandang bahwa suatu pidana tidak perlu dilaksanakan, vonis akan menetapkan bahwa “penetapan pidana ditunda (*“the fixing of the penalty the suspended”*) dan setelah masa percobaan, dihentikan / dibatalkan sama sekali/sepenuhnya.

b) Pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan itu ditunda (Pasal 56:2 PC) ditetapkan/berlaku sejak tahun 1905.

Apabila pengadilan mempertimbangkan bahwa lebih tepat pidana dijatuhkan, maka dapat ditetapkan/dijatuhkan pidana itu dan menentukan untuk menunda pelaksanaannya. Setelah masa percobaan dilewati, pidana itu akan dihentikan/dibatalkan sepenuhnya. Kemungkinan pidana tertunda seperti ini hanya untuk pidana denda, penahanan/kurungan ringan dan penjara.

²⁹⁾ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah *Perbandingan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP 2001.

Pidana custodial/penjara dan pidana bersyarat dapat juga digabung/dikombinasikan (Pasal 58:1 PC) dalam dua bentuk :

- a) Hakim dapat menjatuhkan pidana custodial dan pada saat yang sama memerintahkan bahwa sebagian dari pidana itu, dengan maksimal 3 bulan, harus dijalani (*must be served*) dan sisanya ditunda (*the rest suspended*); dan
- b) Hakim dapat menetapkan/memastikan lamanya sebagian pidana penjara dan membiarkan sisanya terbuka (*leave the rest open*). Sebagian pidana yang ditetapkan itu tidak boleh lebih dari 3 bulan, dan harus dijalani. Sisanya (*the remainder*) dikonversi dalam pidana penjara yang pasti apabila terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya.

2) Polandia

Di Polandia dengan diterimanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Polandia yang baru pada tahun 1969 untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1932, maka alternatif pidana pencabutan kemerdekaan menjadi semakin dirasakan manfaatnya sebagai bagian dari proses perbaikan narapidana.

Sebagai pengganti pidana penjara, dengan syarat-syarat serta pembatasan-pembatasan tertentu pengadilan dapat menetapkan (1) suatu denda (2) pidana berupa pembatasan

ditunda/*suspended sentence* yang diatur didalam Bab 22-27 *Power of Criminal Courts Act 1973*.

5) Yugoslavia ³²⁾

Jenis *sursis simple* yaitu penundaan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

B.1.2. Syarat-syarat pada pidana pengawasan

a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997

1) UU No. 3 Tahun 1997 tidak merumuskan mengenai Tindak Pidana yang bisa dijatuhi dengan pidana pengawasan sedangkan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat dapat dilihat pada :

- a) Pasal 29 ayat (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Pasal 29 ayat (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- c) Pasal 29 ayat (3) Syarat Umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- d) Pasal 29 ayat (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam

³²⁾ Criminal Code of Yugoslavia, Servis Saveza Udruzenja pravnika Jugoslanje Beograd, Proleterskih brigada, 1974.

putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- e) Pasal 29 ayat (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- f) Pasal 29 ayat (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- g) Pasal 29 ayat (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- h) Pasal 29 ayat (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

b. Dalam KUHP (WvS)

Syarat-syarat untuk dijatuhkan pidana bersyarat :³³⁾

1) Syarat Umum

Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat umum adalah syarat yang wajib dan mutlak dipenuhi dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14a ayat (4) KUHP syarat mana berupa keyakinan hakim

³³⁾ Hermien Hadieti Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 33.

bahwa terdakwa tidak akan melakukan lagi perbuatan pidana selama dalam jangka waktu masa percobaan, dan selama jangka waktu yang ditentukan itu mentaati keputusan hakim, maka ia dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani pidananya. Sebaliknya apabila ia di dalam jangka waktu yang telah ditentukan itu melakukan sesuatu perbuatan pidana, maka ia diharuskan menjalani pidana yang pertama yang telah dijatuhkan kepadanya.

Dalam hal Pasal 14 a ayat (4) KUHP hakim hanya akan menjatuhkan pidana bersyarat apabila hakim memperoleh keyakinan sesudah melalui proses pemeriksaan persidangan yang teliti, bahwa ada pihak-pihak yang melakukan pengawasan yang cukup terhadap si terpidana.³⁴⁾

2) Syarat Khusus

Syarat ini lebih bersifat fakultatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14c ayat (2) KUHP. Di dalam hal syarat khusus ini terpidana diwajibkan membayar kerugian, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagai akibat dari perbuatannya yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan jika dijatuhkan

³⁴⁾ *Ibid*, hal. 34.

hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda.³⁵⁾

c. Dalam Konsep KUHP Baru

1) Pasal 72 mensyaratkan bahwa Tindak Pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun/dibawah 7 tahun. Ukuran 7 tahun tersebut diambil dengan melihat ancaman pidana yang ada dalam WvS sekarang, ialah kejahatan ringan dan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat seperti pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*) ancaman pidananya tujuh tahun. Jenis tindak pidana dalam Konsep KUHP yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau kurang meliputi semua tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana kecuali :

- a) Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan (Pasal 193-204, Pasal 215, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 221);
- b) Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (Pasal 224);
- c) Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat, Kepala Negara Sahabat, Dan Perwakilan Negara Sahabat (Pasal 231);
- d) Tindak Pidana Terhadap Kewajiban Dan Hak Kenegaraan (Pasal 238, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 269 ayat (2) huruf c)

³⁵⁾ *Ibid*, hal. 34.

- e) Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Barang, Dan Lingkungan Hidup (Pasal 298, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 311 huruf b, c, d, Pasal 312 huruf c, Pasal 313, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 319, Pasal 321, Pasal 327, Pasal 329, Pasal 331)
- f) Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum Dan Lembaga Negara (Pasal 345 huruf c, Pasal 346 ayat (2));
- g) Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas (Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378, Pasal 379);
- h) Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 396, Pasal 398 ayat (2));
- i) Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 415, Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425, Pasal 426, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431 ayat (3), Pasal 432, Pasal 433, Pasal 437 ayat (2) huruf b, Pasal 438, Pasal 440)
- j) Tindak Pidana Menelantarkan Orang (Pasal 442 ayat (2), Pasal 443 ayat (2));
- k) Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 460, Pasal 461, Pasal 463, Pasal 464, Pasal 467 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 470 ayat (2)(3));
- l) Tindak Pidana Terhadap Nyawa (Pasal 475, Pasal 477, Pasal 478, Pasal 480 ayat (2)(3), Pasal 481 ayat (2));

- m) Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 484 ayat (3), Pasal 486, Pasal 488 huruf b);
- n) Tindak Pidana Pencurian (Pasal 493 ayat (3), Pasal 495);
- o) Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 498);
- p) Tindak Pidana Perbuatan Curang (Pasal 522, Pasal 524, Pasal 525);
- q) Tindak Pidana Merugikan Kreditor atau Orang Yang Berhak (Pasal 537);
- r) Tindak Pidana Jabatan (Pasal 552 ayat (2), Pasal 553 s/d Pasal 565 ayat (1), Pasal 575, Pasal 576);
- s) Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 581, Pasal 582, Pasal 583, Pasal 584, Pasal 585, Pasal 586, Pasal 587, Pasal 588, Pasal 589, Pasal 591, Pasal 592, Pasal 593, Pasal 594 ayat (1), Pasal 596, Pasal 598 ayat (2) huruf b,c, Pasal 599 ayat (2));
- t) Tindak Pidana Penerbangan Dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan (Pasal 620 ayat (2)(3), Pasal 66 ayat (2)(3)(4), Pasal 624, Pasal 625, Pasal 627, Pasal 628, Pasal 629, Pasal 630, Pasal 631, Pasal 632, Pasal 633, Pasal 634, Pasal 635, Pasal 641, Pasal 642).

Adanya ketentuan Pasal 72 tersebut dapat dilihat sebagai suatu kebijaksanaan baru untuk mengurangi atau membatasi diterapkannya pidana penjara terhadap orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Dengan adanya batasan ancaman pidana

penjara maksimum tujuh tahun, tampaknya pembuat Konsep ingin memberikan ukuran yang obyektif bagi tindak pidana yang dipandang tidak begitu berat. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan disini pengaturan tentang "probation" di Amerika Serikat, yang dapat dikenakan pada semua tindak pidana, kecuali yang menyangkut tindak pidana berat :

- (1) *Crime of violence*;
- (2) *Crime against morals*;
- (3) *Crime involving the use of deadly weapons*;
- (4) *Mercenary crime*;
- (5) *Crime against the government* dan
- (6) *Crime carrying a certain penalty*.³⁶⁾

Disamping memberikan ukuran obyektif, tampaknya pembuat konsep ingin mengobyektifkan ukuran sikap batin si pelaku yang dipandang tidak begitu jahat, walaupun ukuran demikian tidak dinyatakan secara eksplisit.

Dengan demikian, adanya ketentuan mengenai pidana pengawasan itu menunjukkan pendirian pembuat konsep bahwa pidana penjara pada dasarnya hanya ditujukan pada tindak pidana berat atau hanya ditujukan pada pelaku yang jelas-jelas mempunyai watak jahat. Pendirian demikian jelas dilatarbelakangi oleh banyaknya kritik-kritik tajam yang

³⁶⁾ Periksa Barnes and Teeters, *New Horizons in Criminology*, Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 1966, hal. 560.

ditujukan terhadap segi-segi negatif dari pidana penjara. Dan hal inipun sesuai dengan kebijaksanaan limitatif yang dinyatakan dalam laporan Kongres PBB kelima tahun 1975 sebagai berikut :³⁷⁾

“Sebagai suatu masalah kebijakan publik, penggunaan pidana penjara harus dibatasi terhadap para pelaku kejahatan yang perlu dinetralisir untuk kepentingan keamanan masyarakat dan untuk perlindungan masyarakat”.

Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan anjuran dari *The Consultative Assembly of the Council of Europe* kepada Komite Menteri-menteri (negara-negara di Eropa), yang antara lain menyatakan : *“than member Governments be asked to adopt, as part of their national law, the following principles :*

- a. *that the first offender who has committed an offence punishable by imprisonment shall, unless a serious crime is involved, receive a suspended sentence or be placed on probation or accorded some similar treatment;*

- 2) Selain syarat mengenai jenis Tindak Pidana yang dapat dijatuhi pidana pengawasan, dalam penjatuhan pidana pengawasan itu

³⁷⁾ Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1975, hal 5 dan hal. 33 No. 268.

sendiri dapat ditetapkan syarat-syarat (yang sifatnya lebih khusus .pen) yaitu :

- a. terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana (Pasal 73 ayat (3) huruf a) ;

jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati/bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Tapi apabila terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh/sebagian kerugian yang timbul oleh Tindak Pidana yang dilakukan (Pasal 73 ayat (3) huruf b);

syarat ini sebagai bentuk perlindungan masyarakat yaitu perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu didalam masyarakat.

- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik (Pasal 73 ayat (3) huruf c);

Perbuatan ini dalam bentuk suatu pekerjaan tertentu, dimana terpidana mendapat pembayaran atas pekerjaannya yang hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.

- 3) Pasal 73 (1) Pidana pengawasan dijatuhkan kepada terpidana yang dengan mengingat keadaan dan perbuatannya, pembinaannya cukup diawasi. Ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) diatas berorientasi pada pelaku secara pribadi / individual. Jadi menganut sistem pemidanaan / "pertanggungjawaban individual / personal" (*"individual/personal responsibility"*). Salah satu kelemahan / keterbatasan sistem pemidanaan individual dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sifatnya yang sangat *"fragmentair"*, yaitu melihat upaya pencegahan / penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diatas mutatis mutandis dengan pidana pengawasan yang berlaku bagi anak.

d. Dalam KUHP Asing

1) Denmark

- a) Situasi sebelum 1963 sangat berbeda. Pidana bersyarat/tertunda dalam arti penundaan pelaksanaan, hanya dimungkinkan untuk pidana denda, kurungan sampai

2 tahun dan penjara maksimum 1 tahun. Memori penjelasan untuk RUU pembaharuan KUHP (UU No. 37 tanggal 1-2-1961) juga memberikan petunjuk kepada hakim dalam menetapkan kapan ia seharusnya menunda penetapan/penjatuhan pidana (*"suspended the fixing of a penalty"*).

b) Ada tiga kelompok kasus yang dapat dipertimbangkan untuk bentuk *"suspended sentence"* ini, yaitu :

- (1) Delik-delik yang tidak serius;
- (2) Kasus-kasus yang pidananya akan dicabut (ditarik kembali) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat umum dan khusus, dan apabila pidana non-custodial kemungkinan akan dikenakan;
- (3) Kasus-kasus dimana pengadilan telah menjatuhkan tindakan-tindakan pengawasan.

c) UU baru, menetapkan sejumlah daftar kondisi/syarat khusus untuk menetapkan *"suspended sentence"*. Daftar ini tidak bersifat *exhaustive*, karena pengadilan masih diberi kebebasan untuk menetapkan kondisi lain. Pasal 57 PC menyebutkan 8 kondisi/syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh pengadilan, yaitu :

- (1) Terpidana harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggalnya, pekerjaannya,

pendidikannya, penggunaan waktu luangnya atau pergaulannya dengan orang-orang tertentu;

- (2) Terpidana diserahkan kepada suatu lembaga untuk waktu yang ditentukan dalam putusan, yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- (3) Terpidana harus berhenti menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan;
- (4) Ia diserahkan pada tempat perawatan untuk orang-orang yang kecanduan alkohol dan obat-obatan, apabila perlu di rumah sakit;
- (5) Ia diserahkan pada perawatan kejiwaan, apabila perlu di rumah sakit;
- (6) Ia harus menuruti instruksi-instruksi dari Pejabat Pengawas (*Pobation Service*) mengenai pengeluaran dari penghasilan/modalnya;
- (7) Ia harus membayar kompensasi untuk kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya;
- (8) Ia harus mengikuti instruksi/petunjuk dari Pejabat Kesejahteraan Anak (*Children's Welfare Authorities*) dan memenuhi tiap syarat yang ditetapkan oleh pejabat itu.

Beberapa syarat di atas jarang diterapkan dalam praktek, khususnya tiga syarat terakhir. Yang paling sering

ditetapkan adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tempat tinggal dan pekerjaan, dimasukkan ke suatu lembaga, dan menjauhkan diri (menghentikan) dari penggunaan alkohol.

2) Polandia

Berdasarkan pasal 73-79 KUHP Polandia, maka pengadilan dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan pidana secara bersyarat bagi pidana pencabutan kemerdekaan yang tidak melebihi dua tahun dalam hal kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan bagi pidana perampasan kemerdekaan yang tidak melebihi tiga tahun dalam hal kejahatan yang dilakukan karena kealpaan. Didalam memutuskan penundaan pidana tersebut pengadilan harus mempertimbangkan sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang menyangkut si pelaku tindak pidana, perilakunya pada masa lalu, dan segala faktor lain yang memberikan pembenaran atas kesimpulan bahwa sekalipun pidana tidak akan dilaksanakan, si pelaku tindak pidana akan mentaati hukum dan tidak akan melakukan kejahatan lain. Pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah keuntungan-keuntungan sosial yang dicapai oleh pembedaan membenarkan penundaan pelaksanaan pidana.

Pengadilan dapat menentukan syarat-syarat bagi si pelaku untuk (1) melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan yang

ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya, (2) mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, (3) melakukan pekerjaan atau jasa-jasa pelayanan khusus untuk kepentingan umum, (4) melakukan pekerjaan yang menguntungkan atau mengikuti suatu pendidikan atau latihan keterampilan yang akan bermanfaat baginya untuk memperoleh pekerjaan yang menguntungkan, (5) menghentikan penggunaan alkohol yang berlebihan, (6) menjalani pembinaan medis, (7) menghentikan kunjungan ke tempat-tempat tertentu atau keterlibatan di dalam pergaulan dengan orang-orang atau kelompok tertentu, (8) mematuhi beberapa ketentuan tata tertib selama jangka waktu penangguhan pidana yang akan mencegahnya untuk melakukan tindak pidana yang lain.

Penundaan pidana tersebut dapat dilakukan atas jaminan yang diberikan oleh suatu organisasi sosial, lembaga atau orang yang dipercaya, yang akan menjamin bahwa si pelaku tindak pidana akan mematuhi hukum dan tidak akan melakukan tindak pidana lebih lanjut.

Di dalam menunda pelaksanaan pidana tersebut, pengadilan dapat menempatkan terpidana di bawah probation untuk masa tertentu dengan pengawasan yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk, lembaga atau organisasi sosial. Tindakan ini bersifat

fakultatif bilamana pelaku tindak pidana tersebut seorang dewasa, tetapi merupakan suatu kewajiban dalam hal terpidana di bawah usia dua puluh satu tahun. Dari sini tampak, bahwa hukum Polandia menerima sebagai aturan umum pola Perancis yang memungkinkan penundaan pidana baik dengan maupun tanpa pengawasan, sekalipun dengan mempertimbangkan sifat-sifat khusus dari si pelaku disyaratkan adanya pengawasan untuk pelaku tindak pidana yang masih muda. Perkembangan ini diakibatkan oleh makin bertambahnya jumlah tenaga pengawas probation dan pengawas-pengawas sukarela yang terlatih di Polandia, yang dapat menjamin bahwa lembaga ini akan dapat berjalan secara efektif.

3) Portugal

a) Pada mulanya Pidana Tertunda/Bersyarat (*Suspended sentence*) hanya diberikan untuk pidana penjara koreksional dan hanya untuk pelaku pemula (*first offender*). Hal ini kemudian diperluas pada revisi KUHP tahun 1954. Pidana tertunda dapat juga diberikan untuk denda. Perkecualian pemberian Pidana tertunda kepada “*first offender*” juga mengalami perubahan. Yang dikecualikan, hanya mereka yang pernah dipidana penjara. Namun dalam revisi terakhir, klausul demikian juga

mengalami pergeseran. Recidivist juga dapat memperoleh Pidana Tertunda. Saat ini, semua pidana penjara sampai 3 tahun (sebelumnya hanya 2 tahun) dapat memperoleh Pidana Tertunda.

b) Syarat-syarat Pidana Tertunda yang secara eksplisit disebut dalam PC adalah :

- (1) Memberi kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk melakukan hal itu (memberi kompensasi);
- (2) Melakukan perbaikan moral kepada korban;
- (3) Membayar sejumlah uang kepada Bendahara Negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan untuk delik ybs.

Hakim dapat menetapkan syarat-syarat lain sepanjang tidak merugikan/membahayakan terpidana dan tidak bertentangan dengan standar moral. Berdasarkan kriteria pertama, maka hakim tidak dapat menetapkan suatu sanksi, misalnya pidana kerja sosial (yang merupakan pidana pokok) sebagai syarat khusus.

c) Syarat-syarat untuk pidana bersyarat/tertunda juga dapat diterapkan untuk “probation” ini. Perbedaan penting antara “*suspended sentence*” dengan “*probation*” adalah, bahwa dalam “*probation*”, putusan pemidanaan ditunda. Jadi,

tidak ada “*final sentence*”. Untuk dibuatnya perintah pengawasan (“*probation order*”), cukup bahwa hakim yakin akan kesalahan terdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari 3 tahun penjara. Perbedaan yang sangat signifikan antara “*probation*” dan “*suspended sentence*” adalah, bahwa orang yang diberi “*probation*” menjadi sasaran rencana rehabilitasi di bawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1-3 tahun.

d) Pasal 54 PC menentukan beberapa larangan bagi mereka yang terkena “*probation*”, yaitu larangan untuk :

- 1) Melakukan pekerjaan/profesi tertentu;
- 2) Berada di tempat-tempat tertentu;
- 3) Bertempat tinggal di tempat tertentu atau dalam wilayah tertentu;
- 4) Melakukan kontak dengan orang-orang tertentu;
- 5) Bergabung dengan masyarakat tertentu atau menghadiri pertemuan-pertemuan khusus;
- 6) Memiliki barang-barang untuk tujuan melakukan tindak pidana lain.

e) Syarat lain yang disebut dalam KUHP adalah :

- (1) Kewajiban menentukan orang yang membayar jaminan untuknya;

- (2) Kewajiban melapor secara periodik kepada pejabat pengawas dan menerima perawatan wajib di dalam rumah sakit jiwa, klinik rehabilitasi alkohol/obat-obatan atau lembaga terapi lainnya.

Patut dicatat, bahwa hakim dapat menetapkan syarat-syarat lain.

4) Inggris

a) Untuk Probation :

(1) Syarat Umum

- (a) Khusus untuk pelaku dewasa selama 12 bulan tidak boleh melanggar hukum.
- (b) Baik untuk pelaku dewasa maupun anak-anak diminta persetujuannya suka tidaknya dikenakan tindakan probation berupa pengawasan dan bimbingan. Jika suka harus diterangkan bahwa ia harus bersedia datang di kantor pegawai probation jika dipanggil dan bersedia menerima pegawai probation jika didatangi rumahnya. Jadi perintah probation tidak berdasarkan paksaan.
- (c) Perintah probation tidak dapat dibuat untuk kepentingan pelaku tindak pidana yang sudah berumur 14 tahun kecuali ia menyatakan tidak

setujunya untuk memenuhi syarat-syarat yang disebut.

(2) Syarat Khusus

Sebagaimana disebutkan didalam Powers of Criminal Courts Act 1973 :

- (a) Pada Bab 2 (5), bahwa pelaku tindak pidana bertempat tinggal di tempat yang ditunjuk oleh pengadilan seperti pelaku tindak pidana yang bekerja ditempatkan dalam *probation hostel* sedang pelaku tindak pidana yang masih sekolah ditempatkan dalam *probation home*.
- (b) Pasal 3 UU tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana menerima pemeliharaan yang bersangkutan dengan keadaan mentalnya. Pelaku tindak pidana harus dipelihara dalam rumah sakit jiwa untuk paling lama 12 bulan, jika sekeluanya dari rumah sakit jiwa masih berada dalam jangka waktu *probation* maka pengawasan oleh pegawai *probation* diteruskan sampai berakhir. Jika sekiranya dari rumah sakit jiwa masa probationnya sudah habis dan pelaku tindak pidana perlu diawasi juga behubungan dengan

keadaan mentalnya maka yang mengawasi ialah pegawai sosial dari rumah sakit jiwa.

- (c) Bab 4 yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk menentukan suatu syarat, bahwa si pelaku tindak pidana harus menghadiri suatu hari latihan yang ditentukan didalam perintah tersebut. Pengaruh persyaratan ini adalah, bahwa si pelaku tindak pidana harus hadir sesuai dengan perintah pengawas tidak lebih dari 60 hari dan selama didalam tempat latihan tersebut, ia harus mematuhi perintah-perintah orang yang ditugaskan disitu.

Pada tahun 1962 telah dipublikasikan *Report of the Interdepartmental Committee on the Probation Service*, yang antara lain menyatakan, bahwa untuk menempatkan seseorang di bawah probation harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) Atas dasar sifat kejahatan dan catatan kriminal si pelaku tindak pidana, demi kepentingan masyarakat tidak dipertimbangkan untuk menerapkan cara yang keras untuk membinanya;
- (b) Risiko bagi masyarakat melalui penerapan pembebasan si pelaku tindak pidana diperbesar

berdasarkan alasan-alasan moral, sosial dan ekonomi;

- (c) Pelaku tindak pidana memerlukan perhatian terus menerus;
- (d) Pelaku tindak pidana mampu untuk menanggapi perhatian tersebut sementara dalam keadaan bebas.

b) Untuk pidana penjara yang ditunda :

Bab 26 (1) Powers of Criminal Courts Act 1973 mengatur,

- (1) Bahwa bilamana suatu pengadilan menetapkan pidana yang ditunda bagi seorang pelaku tindak pidana yang tidak lebih dari enam bulan karena suatu tindak pidana tunggal, maka pengadilan tersebut dapat membuat perintah pengawasan (*suspended sentence supervision order*), yakni menempatkan si pelaku tindak pidana di bawah pengawasan seorang petugas pengawas untuk jangka waktu yang ditentukan di dalam perintah tersebut, yang tidak melebihi jangka waktu pidana yang ditunda tersebut. Dalam hal ini si pelaku tindak pidana harus selalu berhubungan dengan petugas pengawasnya sesuai dengan perintah dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan alamat. Bilamana ia gagal melakukan hal-hal tersebut,

maka ia dapat diperintahkan untuk menghadap di depan *Magistrates Court* dan didenda sampai \$ 50.

- (2) Bilamana pengadilan menetapkan pidana penjara yang tidak lebih dari dua tahun, maka pengadilan tersebut dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di dalam jangka waktu yang tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari dua tahun, pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang dapat dipidana penjara di Britania Raya.
- (3) Bilamana pelaku tindak pidana tersebut dipidana karena tindak pidana lain maka pengadilan (biasanya pengadilan dimana pembedaan yang kedua berlangsung) harus mengaktifkan pidana yang ditunda kecuali ada pendapat bahwa pengaktifan tersebut dianggap tidak adil, sehubungan dengan kejadian-kejadian semenjak diterapkannya pidana yang baru dilakukan.

5) Yugoslavia

- a) Menurut Pasal 48 (2), syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk penundaan pidana itu ialah : (1) pemberian ganti rugi (restitusi) oleh terpidana atas keuntungan materiel yang diperolehnya dari tindak pidana; (2) pembayaran ganti rugi/kompensasi atas

kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya; atau (3) memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

b) Menurut Pasal 48 (3), pengadilan juga harus menetapkan batas tenggang waktu untuk memenuhi syarat-syarat pada ayat (2) diatas.

c) Pasal 48 (4) menegaskan, bahwa pengadilan harus menetapkan “penundaan bersyarat untuk pelaksanaan pidana” apabila berdasarkan keadaan dilakukannya delik, perbuatan terdakwa setelah melakukan delik, dan berdasar riwayat hidupnya, dijumpai dasar/alasan untuk mengharap bahwa sekalipun pidana tidak dilaksanakan, terpidana tidak akan melakukan delik lagi di waktu yang akan datang dan tujuan pembedaan tetap akan tercapai.

d) Akhirnya Pasal 48 (5) menegaskan, bahwa tindakan keamanan (*security measures*) yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan tanpa menghiraukan ditundanya pelaksanaan pidana.

B.1.3. Masa percobaan/masa pengawasan

a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997

Untuk Pidana bersyarat, menurut Pasal 29 ayat (6) UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3

(tiga) tahun. Sedangkan untuk pidana pengawasan, masa pengawasan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

b. Dalam KUHP (WvS)

Menurut Pasal 14 b (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 14b (2)). Lebih lanjut dalam Pasal 14b (3) disebutkan bahwa masa percobaan tersebut tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.

c. Dalam Konsep KUHP Baru

Lamanya masa pengawasan dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 73 ayat (2))

d. Dalam KUHP Asing

1) Denmark

Lamanya masa percobaan maksimum 3 tahun, tetapi dalam hal-hal tertentu dapat sampai 5 tahun. Hakim boleh membuat diskresi dengan tidak dibatasi usia pelaku, sifat/bobot delik yang dilakukan dan lamanya pidana.

2) Polandia

Penerapan pidana dapat ditangguhkan untuk jangka waktu antara 2 sampai 5 tahun.

3) Portugal

Untuk probation masa pengawasan dan bimbingan pekerja sosial antara 1-3 tahun.

4) Inggris

Untuk probation masa pengawasan baik untuk pelaku yang sudah dewasa maupun yang anak-anak antara 1-3 tahun (Bab 2 (1) Powers of Criminal Courts Act 1973)

5) Yugoslavia

Pidana penjara atau denda dapat ditunda dalam waktu antara 1 s/d 5 tahun.

B.1.4. Pelaksanaan pidana pengawasan

a. Dalam UU No. 3 Tahun 1997

UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang akibat yang diperoleh apabila terpidana tidak memenuhi syarat yang ditentukan baik itu syarat umum maupun khusus (apakah dengan dilanggarnya syarat akan menghentikan masa pengawasan/percobaan ataukah tidak?).

b. Dalam KUHP (WvS)

Pasal 14f (1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut pasal 14d ayat 1, Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya **pidananya dijalankan, atau** memerintahkan supaya atas namanya **diberi peringatan** pada terpidana, yaitu jika terpidana **selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana** dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi; ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintahkan pemberian peringatan, Hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.

Pasal 14f (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu di dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, Hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi.

Jadi disini ada ketentuan bahwa berakhirnya pengawasan apabila masa percobaan yang telah ditentukan habis/berakhir tapi apabila

selama masa percobaan ada syarat yang dilanggar maka terpidana akan mendapat peringatan atau memperpanjang pengawasan (jadi tidak secara otomatis pidana bersyarat itu berakhir/dibatalkan).

c. Dalam Konsep KUHP Baru

- 1) Pasal 73 ayat (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- 2) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya (Pasal 73 ayat (6))
- 3) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak. (Pasal 73 ayat (7))
- 4) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (Pasal 74 ayat (1))

- 5) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. (Pasal 74 ayat (2))

d. Dalam KUHP Asing

1) Denmark

- a) UU membolehkan hakim membuat diskresi yang luas dalam menggunakan pidana bersyarat / tertunda. Penggunaannya tidak dibatasi oleh usia pelaku, sifat/bobot delik yang dilakukan dan lamanya pidana. Sebaliknya, KUHP mewajibkan hakim untuk mengenakan "*suspended sentence*" apabila ia berpendapat bahwa pelaksanaan pidana itu tidak perlu. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menentukan apakah pidana itu perlu dijalani atau tidak, dan bebas menentukan bentuk dari pidana tertunda itu.
- b) Setelah masa percobaan berakhir, *suspended sentence* akan dihentikan / dibatalkan sama sekali / sepenuhnya (Pasal 56:1 PC).
- c) Apabila terpidana gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak secara otomatis berakibat dicabutnya "*suspended sentence*". Pengadilan mempunyai beberapa pilihan untuk menekan terpidana memenuhi syarat khusus itu, yaitu (1) memberi peringatan (*warning*), (2) mengubah syarat-syarat khusus itu (*alter the conditions*),

(3) menambah masa/tenggang waktu pengawasan (*increase the probationary period*), atau (4) memasukkan orang itu dalam penahanan dalam waktu pendek (*put in detention for a short period*).

2) Polandia

Pencabutan kembali pidana yang ditunda dalam beberapa hal merupakan perintah dan dalam hal yang lain diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan. Pengadilan wajib untuk melaksanakan pidana bilamana selama jangka waktu penundaan pidana, terpidana melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk itu ia dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan atau bilamana ia tidak melakukan perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Disamping itu pengadilan dapat memerintahkan untuk melaksanakan pidana bilamana terpidana melakukan pelanggaran terhadap tertib hukum dan bilamana khususnya ia telah melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipidana dengan pidana pencabutan kemerdekaan atau tidak didenda atau telah menghindari kewajiban yang dikenakan terhadapnya. Pelaksanaan pidana tersebut hanya dapat diperintahkan selama jangka waktu penundaan pidana atau selama enam bulan berikutnya. Sesudah berakhirnya

jangka waktu penundaan pidana, pemidanaan akan batal demi hukum.

3) Portugal

Apabila syarat-syarat yang ditentukan dilanggar, maka hakim dapat mengambil tindakan yang tergantung seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan :

- Teguran di muka umum,
- Uang jaminan,
- Memperpanjang masa percobaan,
- pencabutan penundaan pidana (tindakan ini dapat dilakukan jika terdakwa melakukan delik yang diancam dengan pidana penjara yang dilakukan dengan sengaja) dan
- Menerapkan pidana penjara

Jadi dalam KUHP Portugal ada ketentuan bahwa apabila syarat tersebut dilanggar maka secara otomatis pidana bersyarat tersebut berakhir atau dicabut untuk kemudian diberi tindakan seperti diatas.

4) Inggris

- a) Apabila waktu pengawasan yang dilakukan berhasil, pelaku tindak pidana bebas/pidana pengawasan berakhir,
- b) Apabila selama dalam masa pengawasan pelaku tindak pidana melanggar hukum lagi, akan diadili dan diputus mengenai pelanggaranannya yang baru, sedang putusan yang

lama tetap berlaku, yang berarti bahwa masa probationnya yang lama tetap berlaku. Ketentuan ini sudah disampaikan kepada pelaku tindak pidana oleh pengadilan sejak pelaku dinyatakan bersalah dan ditempatkan dibawah pengawasan (Bab 8 Powers of Criminal Courts Act 1973).

- c) Mengenai pelanggaran yang baru diputus oleh hakim dan dapat terjadi bahwa putusan yang kedua berupa tindakan probation lagi, yang berarti bahwa jangka waktu probationnya bertambah. Khusus untuk anak perpanjangan waktu pengawasan sampai paling lama 3 bulan.
- d) Jika mengenai pelanggaran yang kedua diputus masuk dalam suatu lembaga untuk waktu tertentu maka putusan probation yang pertama menjadi hapus.
- e) Jika putusan yang kedua berupa pidana denda maka probation yang pertama berjalan terus ditambah harus membayar denda.
- f) Sekalipun melanggar hukum tidak melanggar salah satu syarat tetapi karena keadaan yang mengkhawatirkan akan melanggar hukum, pegawai probation dapat membawanya kemuka pengadilan untuk mendapat putusan lain daripada probation/memperpanjang jangka waktu probation yang sudah ditentukan dengan mengingat batas 3 tahun.

- g) Seorang pelaku tindak pidana apabila wanita/gadis harus diawasi oleh seorang probation wanita.
 - h) Memotong dari upah/uang sakunya sebagai bentuk perlakuan secara probation. Apabila pelakunya anak-anak, angsurannya harus dapat dipikul oleh anak dengan bantuan orang tuanya.
 - i) Pengadilan dapat merubah syarat yang ditentukan atas permintaan pegawai probation/pelaku tindak pidana.
Perubahan syarat tersebut berdasar keadaan yaitu bisa dengan menambahkan syarat baru.
 - j) Khusus untuk anak,
 - (1) jika salah satu syarat dilanggar dapat memasukkan anak dalam *Attendance Centre*/mengenakan denda, yang tidak lebih dari 10 pounds, dengan tetap berlakunya tindakan probation. Atau pengadilan mengadili perkaranya yang lama dan dapat mengenakan pidana dan juga mengenai pelanggaran yang baru.
- Seorang anak yang sudah berumur 10 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun dan bersalah dalam melakukan suatu pelanggaran hukum yang jika dilakukan oleh seorang dewasa dapat dipidana penjara, dapat dikirim ke *Attendance Centre* untuk 24 jam, untuk tiap hadir tidak kurang dari 1 jam dan tidak lebih

dari 3 jam dan biasanya selama 2 jam. Juga dapat dikirim ke *Attendance Centre* jika seorang anak, yang diperintahkan dibawah pengawasan pegawai probation dengan putusan pengadilan melanggar perjanjiannya. Tidak diperkenankan pengadilan mengirim seorang anak ke *Attendance Centre* jika sudah pernah diputus pidana penjara, pernah dikirim ke *Borstal*, *Detention Centre* atau *Approved School*. Maksud pengiriman ke *Attendance Centre* ialah untuk mendidik disiplin dalam jangka waktu singkat dan melatihnya untuk belajar dengan tertib dan berfaedah dan memberi rekreasi bersama-sama dengan anak-anak lain secara teratur.

Attendance Centre diselenggarakan oleh Jawatan Kepolisian pada tiap sabtu sore dan umumnya untuk 2 jam lamanya. Selama 2 jam atau selama dalam *Attendance Centre* mereka mendapat pelajaran dalam kelas, pekerjaan tangan atau latihan-latihan dan permainan-permainan untuk rekreasi. Selama dalam *Attendance Centre* mereka harus menjalani disiplin keras. Siapa yang melanggar peraturan atau tidak masuk pada hari yang ditentukan dimajukan dimuka pengadilan dan diputus lagi tentang perkaranya yang lama. Sebagai syarat dalam memutus pengiriman ke

Attendance Centre ialah bahwa rumah dari anak tidak boleh lebih jauh dari 10 mil dari *Attendance Centre* yang terdekat, sehingga tiap harus hadir dengan tidak sukar dapat datang dan biasanya *Attendance Centre* didirikan di tengah-tengah kota.

- (2) Jika anak dikenakan pidana penjara atau dikirim ke *Borstal/Approved School/Detention Centre* maka tindakan probation menjadi hapus.³⁸⁾

Borstal: (Cara pemeliharaan khusus bagi golongan pemuda). Kebanyakan para residivis dewasa sudah mulai melakukan kejahatannya sebelum mereka menjadi dewasa dan bahwa sifat kejahatan para pemuda dan pemuda yang dipenjarakan justru menjadi makin keras karena pengalamannya dalam penjara. Sebagai hasil dari penemuan ini, kemudian diadakan percobaan yang lebih mementingkan pendidikan dalam memperlakukan para pemuda, semua bermula dilakukan dalam penjara dalam tempat-tempat tersendiri.

Sistem *Borstal* dimulai pada tahun 1908 dan diperbaiki pada tahun 1948 yang merubah *Borstal* sebagai tempat penutupan menjadi tempat latihan dengan mengurangi

³⁸⁾ R.A. Koesnoen, *Praktek Peradilan Anak di negara-negara yang telah maju*, Lokakarya tentang Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDIP tanggal 8 s/d 10 Agustus 1977 di Semarang.

sifat penutupannya dan memperluas usaha latihannya. Mengenai penutupannya dilakukan pertama-tama dalam lembaga dan diikuti dengan kebebasan yang diawasi. Seorang pemuda berumur 16 sampai 21 tahun, yang dimajukan dimuka pengadilan *Assize* atau *Quarter Session* mengenai pelanggaran yang dapat dipidana penjara. Jika dilakukan oleh orang dewasa, dapat dikirim ke *Borstal* jika dipandang kelakuannya akan menjadi lebih jelek atau selalu bergaul dengan orang-orang yang berkelakuan jahat dan si pemuda memerlukan latihan. Pengadilan Magistrate tidak mempunyai wewenang mengirimkan seorang pemuda ke *Borstal* kecuali jika ia melarikan diri dari *Approved School* dan memerlukan penutupan yang lebih tertib atau sudah pernah dikenakan tindakan probation. Dalam keadaan lain pengadilan Magistrate hanya dapat mengirimkan si pemuda ke pengadilan *Quarter Session* dengan pertimbangan bahwa penutupan dalam *Borstal* agaknya yang sesuai. Penutupan dalam *Borstal* dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan paling sedikit 6 bulan, tetapi sesudah menjalani 1 tahun dapat dilepas dengan perjanjian jika berkelakuan baik untuk mengalami masa percobaan 2 tahun terhitung dari hari

dilepasnya dengan perjanjian. Jika dalam masa percobaan ia melanggar hukum, ia dipanggil kembali untuk menghabiskan sisa pidananya, sedangkan mengenai pelanggaran yang baru diputus oleh hakim.

Pada tahun 1948 ditentukan suatu syarat ialah bahwa pengadilan *Quarter Session* atau pengadilan *Assize* atau pengadilan *Magistrate* dapat mempertimbangkan agar seorang pemuda dapat dikirim ke *Borstal* jika ia terdapat bersalah dalam suatu pelanggaran hukum yang dapat dipidana penjara dan pengadilan yakin, dengan memperhatikan kelakuannya dan corak kejahatannya, bahwa bagi pemuda tersebut diperlukan suatu tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatannya dengan menempatkannya dalam *Borstal* untuk dilatih.

Sebelum pemuda tersebut diputus dimasukkan dalam *Borstal* pengadilan harus mendapat laporan lebih dulu dari penjara yang menahannya, tentang keadaan badan, mental pemuda dan kesesuaiannya untuk dikirim ke *Borstal*. *Home Office* berwenang untuk memindahkan seorang pemuda dari penjara ke *Borstal* atau sebaliknya.

Pada permulaannya *Borstal* yang diadakan berupa *Borstal* tertutup. Keadaan demikian sampai pada tahun 1930, yang kemudian dimulai dengan mengadakan *Borstal* terbuka. Para pembesar menyadari bahwa sebagian besar para penghuni *Borstal* tidak sesuai jika ditempatkan dalam bekas penjara atau bangunan yang seperti penjara. Semua aturan yang berlaku bagi penjara terbuka juga berlaku bagi *Borstal* terbuka, dapat dikatakan melebihi. Umurnya membuat mereka tidak pernah berhenti bergerak, dan penyaluran kelincahan ini secara baik bersangkut paut dengan kesehatan mentalnya. Lebih dari itu karena kebanyakan dari mereka sudah mempunyai pengalaman kehidupan dalam lembaga-lembaga seperti *Approved School* dll. dan beberapa mengalami kehidupan dalam lembaga terus menerus. Tidaklah mungkin bagi golongan ini untuk menerima pendidikan dalam lembaga lagi secara tertutup sebagai lanjutan dari riwayat hidupnya. Bagaimana menggabungkan kebebasan dengan disiplin hanya dapat dipelajari dengan cara yang lain yang tidak terpelihara oleh orang tuanya hingga memerlukan pemeliharaan secara kehidupan rumah tangga. *Borstal* lain mementingkan pekerjaan pertanian, *borstal* lain

lagi mementingkan pekerjaan pembangunan perumahan dan gedung-gedung, dan ada yang mementingkan penggarapan tanah. Tetapi kebanyakan *Borstal* mempunyai tempat latihan untuk pertukangan yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan lebih terperinci lagi karena kepada tiap pimpinan diberi keleluasaan untuk mengadakan kebijaksanaan sendiri dalam rangka yang sudah ditentukan. Adanya perbedaan kebijaksanaan dan pengaruh pribadi dari pimpinan dan adanya percobaan-percobaan dalam cara pemeliharaan anak-anak, semua ini harus menjadi pengetahuan dan perhatian dari *Borstal* yang membagi-bagi anak-anak, agar tiap anak dikirim dengan tepat pada *Borstal* yang cocok dengannya. Maka dalam *Borstal Allocation Centre*, yang bekerjanya membagi-bagi anak-anak ke *Borstal-borstal* yang bersangkutan, terdapat para ahli jiwa, ahli kemasyarakatan, ahli latihan kerja yang membantu pengurus dan suatu badan yang menentukan akan dikirim ke *Borstal* mana yang sesuai. Untuk mendapat hasil penyelidikan yang mendalam anak harus tinggal dalam *Borstal Allocation Centre* selama paling lama 3 bulan. Dalam *Allocation Centre* diselidiki tentang riwayatnya, kepribadiannya, kemampuannya

dan kekuatannya. Sebagai cadangan ada 14 *Training Borstal* untuk anak-anak laki-laki yang berbeda-beda, yang mempunyai sifat dan kekuatan melatih yang berbeda, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Jika seorang anak dapat dilatih dalam *Training Borstal* terbuka maka dikirimlah ia ke *Borstal* terbuka, dan pengalaman menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya dapat dilatih dalam *Borstal* terbuka. Secara umum dapat dikatakan bahwa ada golongan *Borstal* yang untuk anak-anak yang termasuk agak lebih kecerdasannya, ada golongan lain untuk anak-anak yang kurang dan ada *Borstal* yang menampung yang agak baik dan ada yang menampung yang jelek. Dua *Borstal* diantaranya yang menampung anak-anak yang cacat badan atau mentalnya. Penggolongan *Borstal-borstal* secara umum ini dapat dilengkapi dengan *Borstal* untuk anak-anak yang mempunyai keperluan khusus, seperti dalam hal kemampuan melatih dalam salah satu kejujuran khusus.

Mengenai pemuda-pemudi karena tidak banyak jumlahnya, tidak ada *Allocation Centre* khusus klasifikasi. Semua pemuda dikirim pertama-tama ke *Borstal* tertutup untuk pemuda di *Aulesbury* dan sesudah

diselidiki jika sesuai untuk dilatih dalam *Borstal* terbuka dikirim ke *Training Borstal* di *East Sutton Park*.

Inti sistem yang sekarang berlaku, pertama bahwa anak yang sedang dilatih harus dipandang sebagai suatu organisme yang hidup yang mempunyai kehidupan dan watak sendiri-sendiri. Tugasnya ialah bukannya untuk menghancurkan dan membuatnya menjadi satu bentuk tertentu, tetapi mendorong beberapa kesanggupan yang dimilikinya untuk dapat berkembang dengan teratur, membuatnya suka menggunakan kehidupannya dengan baik, sehingga dengan demikian ia sendiri dan bukannya orang lain dapat menolong dirinya dari kehidupannya yang akan dapat menjerumuskan. Selanjutnya bahwa tiap anak diperlakukan secara individual dan tidak dipandang sama dengan anak lain, dituntutnya pula untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai akibatnya bahwa para pegawai yang turut serta dalam latihan itu pertama-tama ialah bahwa harus mengenal mereka, lahir dan batinnya, tiap hari makin lebih mengetahui tentang keadaannya. Kedua, bahwa sistem dari *Borstal* dengan staf harus merupakan satu kesatuan. Manusalah dan bukannya gedung-

gedungnya yang merubah hati dan jalan kehidupan anak-anak yang salah itu. Maka latihan staf adalah sangat penting dan lebih-lebih dari Direktur sampai kebawah, tidak hanya tahu akan pekerjaannya saja yang harus dilakukan.

Approved School :

Jawatan urusan anak-anak kecuali mengurus lembaga-lembaga untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang penempatannya ditentukan oleh Badan Urusan Anak-anak, juga mengurus suatu lembaga yang dinamakan *Approved School* yang penempatannya terutama ditentukan oleh pengadilan *Juvenile*. Jadi *Approved School* ini merupakan suatu lembaga pendidikan dan latihan bagi anak-anak nakal atau melanggar hukum yang menjadi tanggungjawab Jawatan Urusan Anak-anak, yang paling penting dan luas lapangan kerjanya diantara lembaga-lembaga lain. *Approved School* merupakan suatu sekolahan dengan asrama yang diadakan khusus bagi anak yang oleh pengadilan diputus perlu dipindahkan dari orang tuanya dan memerlukan latihan yang lama.

Approved School merupakan lembaga terbuka, yang menampung anak-anak secara tertib berdasarkan

peraturan dan disiplin tanpa menggunakan pagar tembok atau kawat yang tinggi. Tujuan pertama ialah untuk membentuk watak si anak dan bersama-sama diperkembangkan kepercayaan pada diri sendiri untuk mempersiapkan kehidupannya nanti jika sudah meninggalkan sekolah, yang ini semua merupakan proses perbaikan dan pendidikan kembali rasa sosialnya. Seorang anak dibawah umur 10 tahun atas kehendak dari seorang baik-baik yang memelihara sebelumnya dan seagama. Pula tidak dapat seorang yang sudah berumur 17 tahun dikirim ke *Approved School*.

Orang tua tidak dapat minta agar anaknya dipelihara dalam *Approved School* karena kenakalannya. Dengan lain perkataan bahwa *Approved School* hanya mendapat anak-anak langsung dari pengadilan *Training Approved School* dalam memberikan sanksi terhadap anak tidak boleh berupa pemindahan ke lain *Training Approved School* atau mengusir anak keluar dari sekolah. Jika karena suatu hal perlu seorang anak dipindahkan sekolahnya harus minta izin lebih dulu pada *Home Office* yang akan memutuskan dapat atau tidaknya dipindah. Pemindahan dari *Approved School* ke rumah

sakit jiwa hanya dapat dengan izin dari *Home Office* dalam keadaan lain oleh pengadilan atas nama *Home Office* dan tentu saja sesudah mendapat nasehat dari dokter jiwa.

Jangka waktu untuk memelihara seorang anak dalam *Approved School* tidak ditentukan oleh pengadilan, tetapi diatur oleh undang-undang. Seorang anak yang belum berumur 12 tahun dan 4 bulan pada hari dipidana dapat berada dalam *Approved School* sampai umur 15 tahun 4 bulan. Seorang anak yang sudah berumur 12 tahun 4 bulan pada hari diputus dapat berada di dalamnya selama 3 tahun atau sampai umur 19 tahun, dipilih mana yang lebih pendek. *Home Office* pada tiap saat dapat memerintahkan untuk melepas seorang anak. Lamanya anak berada dalam *Approved School* rata-rata 17 sampai 18 bulan. Sejak Oktober 1961 tiap anak yang lepas dari *Approved School* harus berada dalam pengawasan selama 2 tahun, tetapi tidak boleh melebihi umur 21 tahun dan pengurus sekolah dapat memanggil kembali jika terjadi pelanggaran selama dalam pengawasan. Jika seorang anak meminta dan pengurus menyetujuinya, sesudah 2 tahun pengawasan dapat

diteruskan oleh suatu badan swasta tanpa dapat dipanggil kembali.

Peraturan *Approved School* membolehkan anak cuti pulang ke rumahnya dalam 1 tahun selama 24 hari dan Inspektur Jawatan Urusan Anak-anak dapat memperpanjang menurut keadaan. Cuti rumah sekarang termasuk suatu sistem dalam perawatan dalam *Approved School* bersangkutan dengan rehabilitasinya dengan keluarga, dengan masyarakat. Cuti rumah juga digunakan untuk menghubungkan dengan majikan-majikan dimana ia akan bekerja nanti jika sudah bebas.

Jika pengadilan sudah memutuskan seorang anak dikirim ke *Approved School* maka si anak pertama-tama dikirim ke *Classifying Approved School*. Tugas *Classifying School* ialah menyelidiki si anak untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang sejarah, latar belakang, kebutuhannya, keadaan badan, kemampuannya sehingga anak dapat dikirim ke *Training Approved School* yang dapat memperkembangkan ke arah perbaikan dan kemajuannya. Tiap pengiriman anak ke *Training School* selalu dibarengi dengan keterangan tentang hasil penyelidikannya hingga memudahkan bekerjanya *Training School*. Lamanya anak dalam

Clasifying School tidak dibatasi dengan tegas dan tergantung dari keperluan sampai dapat menetapkan hasil penyelidikannya, pula tergantung dari sudah adanya lowongan di *Training School* yang dituju.

Detention Centre :

Sudah lama menjadi persoalan tentang perlakuan apa yang akan dikenakan terhadap anak-anak, kecuali sudah adanya *Remand Home*, yang juga dapat dipergunakan sebagai tempat untuk mengenakan tindakan penutupan dalam waktu pendek bersama-sama dengan anak-anak yang ditahan. Terutama adanya kekosongan tindakan yang terdapat antara tindakan probation, yang memperlakukan anak-anak di luar lembaga, dengan tindakan penempatan dalam *Approved School* untuk jangka waktu yang lama. Kekosongan ini bersangkutan dengan anak-anak, yang tidak dapat dikenakan tindakan probation, yang perlu dikenakan tindakan yang menjauhkan dari keluarganya atau yang perlu dilatih tetapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak selama seperti dalam *Approved School*. Bagi anak-anak tersebut tidak diperlukan latihan yang lama, hanya perlu mendapat pengalaman yang berat dan tertib untuk menjadi anak yang sehat kembali dalam jasmani dan

rohani. Anak yang berumur kurang dari 17 tahun tidak dapat dikirim ke penjara oleh pengadilan *Magistrate* atau *Juvenile*. Pengadilan *Assize* dan *Quarter Session* hanya dapat mengirim anak berumur diatas 15 tahun, jika lain-lain cara tindakan sudah dikenakan tetapi tidak mencapai hasil.

Untuk memecahkan persoalan ini sejak tahun 1948 diadakan 2 jalan dengan diadakan *Attendance Centre* dan *Detention Centre*, yang memperlakukan anak-anak yang diasuhnya secara tertib dan keras. *Detention Centre* dapat dipergunakan untuk anak-anak yang berumur 14 sampai 17 tahun, yang terdapat bersalah dalam suatu pelanggaran hukum, yang jika dilakukan oleh orang dewasa dapat dikenakan pidana penjara. Penempatan dalam *Detention Centre* diizinkan untuk paling lama 6 bulan, tetapi umumnya 3 bulan dan paling sedikit 1 bulan. Jika umurnya anak dibawah 15 tahun atau berumur dalam jangka wajib belajar, pengadilan dapat menempatkan dalam *Detention Centre* untuk 1 bulan. Tidak dapat seorang anak dimasukkan dalam *Detention Centre* jika sudah pernah dipidana penjara atau dimasukkan dalam *Borstal* atau sudah pernah masuk *Detention Centre* sebelumnya sesudah berumur

17 tahun. Diantara *Detention Centre* diadakan klasifikasi berdasarkan umur para penghuninya, ialah *Detention Centre* untuk golongan junior untuk anak-anak berumur 14 sampai 17 tahun dan untuk golongan senior ialah untuk anak-anak berumur 17 tahun sampai 21 tahun. Anak-anak golongan junior menjadi tanggungan dari Jawatan Urusan Anak-anak maka ditentukan bahwa Jawatan Kepenjaraan dalam hal mengadakan tindakan-tindakan yang menyangkut golongan junior minta pertimbangan dari jawatan urusan anak-anak yang para inspektornya mempunyai kekuasaan yang sama dengan Inspektur-inspektur kepenjaraan.

Gedung-gedung untuk *Detention Centre*, karena merupakan lembaga tertutup, semua dipagar dengan kawat yang rapat, dan tinggi, jendela-jendela beruji besi, semua pintu dengan kunci dan para pegawainya berseragam seperti pegawai penjara.

Prinsip dari cara perlakuannya ialah memberi perlakuan yang keras dan intensif dan berhubung dengan singkatnya waktu tidak dapat memberikan latihan kejuruan. Maka oleh pengurus tiap tindakan atau kegiatan dalam *Detention Centre* dimaksud untuk

memperkembangkan rasa tata-tertib dan mendidik self-disiplin. Maka kehidupan dalam lembaga adalah tertib dan menurut peraturan, yang merupakan kehidupan yang diharapkan dapat menjadi kebiasaan sekalipun dalam jangka waktu yang singkat. Anak-anak diharapkan cekatan dalam tindak tanduknya sopan santun, teliti, bersih, rapi, dan selalu dalam kegiatan-kegiatan. Sejak masuk pada tiap anak diterangkan bahwa harus menuruti apa yang diperintahkan dan diterangkan bahwa ia mulai hidup dalam masyarakat yang tidak membolehkan seorang menjadi nomor 2.

(3) Perintah pengawasan juga bisa dilakukan untuk seorang anak yang malas masuk sekolah atas perintah pengadilan.

5) Yugoslavia

Pasal 49, Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C :

- Setelah masa percobaan berakhir, *suspended sentence* dihentikan.
- Apabila selama menjalani pidana bersyarat, terpidana melakukan tindak pidana baru maka pengadilan dapat memperpanjang waktu percobaan atau dapat dikenakan pidana baru.

- Atau tidak mencabut pidana bersyarat walaupun terpidana melakukan tindak pidana baru lagi berdasarkan pertimbangan tertentu.

Jadi menurut penulis, KUHP Yugoslavia memuat ketentuan bahwa apabila terjadi pelanggaran syarat-syarat yang telah ditentukan tidak secara otomatis mencabut pelaksanaan pidana bersyarat.

Dari uraian diatas, maka dapat dibuatkan tabel perbandingan sebagai berikut :

SUMBER	DEFINISI & JENIS	SYARAT-SYARAT	MASA PERCOBAAN/MASA PENGAWASAN	PELAKSANAAN PIDANA PENGAWASAN/ PIDANA BERSYARAT
1. UU No. 3/1997	Dalam UU No. 3/1997 selain ada pidana pengawasan juga ada pidana bersyarat yang keduanya memakai sistem sursis simple.	<p>a. Untuk pidana pengawasan tidak dirumuskan syarat mengenai tindak pidana yang bisa dijatuhi dengan pidana pengawasan, berbeda dengan pidana bersyarat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9).</p> <p>b. Untuk dapat dijatuhkan pidana pengawasan dan pidana bersyarat, anak berusia minimal 12 tahun keatas; dibawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan</p>	Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan untuk pidana pengawasan, masa pengawasan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.	UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang akibat yang diperoleh apabila terpidana tidak memenuhi syarat yang ditentukan baik itu syarat umum maupun khusus (apakah dengan dilanggarnya syarat akan menghentikan masa pengawasan / percobaan atau tidak?). Tapi apabila melihat laporan akhir Tim Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah RI tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan, disana terlihat bahwa apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka secara otomatis pidana pengawasan ditanggguhkan.
2. KUHP (WvS)	Merupakan gabungan/kombinasi antara dua sistem yakni Sistem Amerika (prova) dan Sistem Belgia-Perancis (Sursis Simple).	<p>a. Syarat Umum Pasal 14a ayat (4).</p> <p>b. Syarat Khusus Pasal 14c ayat (2)</p>	Menurut Pasal 14 b (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah	Pasal 14f (1) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut pasal 14d ayat 1, Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas

			<p>menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 14b (2)). Lebih lanjut dalam Pasal 14b (3) disebutkan bahwa masa percobaan tersebut tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaannya karena tahanan yang sah.</p>	<p>namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan perbuatan pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi; ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis diijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Dalam memerintahkan pemberian peringatan, Hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.</p> <p>Pasal 14f(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu di dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, Hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya</p>
--	--	--	---	---

				<p>dijalankan, karena melakukan perbuatan pidana tadi. Jadi disini ada ketentuan bahwa berakhirnya pengawasan apabila masa percobaan yang telah ditentukan habis/berakhir tapi apabila selama masa percobaan ada syarat yang dilanggar maka terpidana akan mendapat peringatan atau memperpanjang pengawasan (jadi tidak secara otomatis pidana bersyarat itu berakhir/dibatalkan).</p>
3. Konsep KUHP	<p>Menggunakan istilah pidana pengawasan yaitu suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pengawasan haruslah diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun / dibawah 7 tahun. - Terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana dan - Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh Tindak Pidana yang dilakukan - Terpidana harus melakukan perbuatan/tidak melakukan 	<p>Lamanya masa pengawasan dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 73 ayat (2))</p>	<p>1) Pasal 73 ayat (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.</p> <p>2) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka</p>

		perbuatan tertentu.	<p>Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang- undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya (Pasal 73 ayat (6))</p> <p>3) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak. (Pasal 73 ayat (7))</p> <p>4) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. (Pasal 74 ayat (1))</p> <p>Jika terpidana diatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. (Pasal 74 ayat (2))</p>
--	--	---------------------	--

<p>4. KUHP Asing :</p> <p>a. Denmark</p>	<p>Menggunakan istilah suspended sentence / Betinget Dom baik untuk penundaan pidana maupun penundaan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan. Sistem yang dipakai adalah kombinasi antara sursis simple dengan sistem prova.</p>	<p>a. Ada tiga kelompok kasus yang dapat dipertimbangkan untuk bentuk suspended sentence ini, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delik yang tidak serius - Kasus-kasus yang pidananya akan dicabut. - Kasus-kasus dimana pengadilan telah menjatuhkan tindakan-tindakan pengawasan. <p>b. Syarat khusus yang dapat ditetapkan pengadilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpidana harus mematuhi ketentuan mengenai tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, penggunaan waktu luang atau pergaulan dengan orang-orang tertentu. - Terpidana diserahkan kepada suatu lembaga yang tidak lebih dari 1 tahun. - Terpidana harus berhenti menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan. - Diserahkan ke tempat perawatan. - Diserahkan pada perawatan 	<p>Lamanya masa percobaan maksimum 3 tahun, tetapi dalam hal-hal tertentu dapat sampai 5 tahun. Hakim boleh membuat diskresi dengan tidak dibatasi usia pelaku, sifat/bobot delik yang dilakukan dan lamanya pidana.</p>	<p>a. Setelah masa percobaan berakhir, suspended sentence akan dihentikan / dibatalkan sama sekali / sepuhnya.</p> <p>b. Apabila terpidana gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan secara otomatis berakibat dicabutnya suspended sentence dan pengadilan mempunyai beberapa pilihan untuk menekan terpidana memenuhi syarat khusus, yaitu memberi peringatan, mengubah syarat-syarat khusus itu, menambah masa/tenggang waktu pengawasan atau memasukkan orang itu dalam penahanan dalam waktu pendek.</p>
--	--	--	--	--

<p>b. Polandia</p>	<p>Sebagai salah satu sanksi yang dapat diterapkan oleh pengadilan, pidana yang ditangguhkan tersebut menganut sistem sursis simple.</p>	<p>kejiwaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuruti instruksi dari Probation Service. - Membayar Kompensasi - Memenuhi syarat dari pejabat kesejahteraan anak. <p>Pengadilan dapat menentukan syarat-syarat bagi si pelaku untuk (1) melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya,(2)mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan, (3) melakukan pekerjaan atau jasa-jasa pelayanan khusus untuk kepentingan umum, (4) melakukan pekerjaan yang menguntungkan atau mengikuti suatu pendidikan atau latihan keterampilan yang akan bermanfaat baginya untuk memperoleh pekerjaan yang menguntungkan, (5) menghentikan penggunaan alkohol yang berlebihan, (6) menjalani pembinaan medis, (7) menghentikan kunjungan ke tempat-tempat tertentu atau keterlibatan di dalam pergaulan</p>	<p>Penerapan pidana dapat ditangguhkan untuk jangka waktu antara 2 sampai 5 tahun.</p>	<p>Pencabutan kembali pidana yang ditunda dalam beberapa hal merupakan perintah dan dalam hal yang lain diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan. Pengadilan wajib untuk melaksanakan pidana bilamana selama jangka waktu penundaan pidana, terpidana melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan untuk itu ia dijaatui pidana pencabutan kemerdekaan atau bilamana ia tidak melakukan perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Disamping itu pengadilan dapat memerintahkan untuk melaksanakan pidana bilamana terpidana melakukan pelanggaran terhadap tertib hukum dan bilamana khususnya ia telah melakukan suatu tindak pidana yang tidak dipidana dengan pidana</p>
--------------------	--	---	--	---

		dengan orang-orang atau kelompok tertentu, (8) mematuhi beberapa ketentuan tata tertib selama jangka waktu penangguhan pidana yang akan mencegahnya untuk melakukan tindak pidana yang lain.		

<p>d. Inggris</p>	<p>Menggunakan istilah probation (sistem prova) yaitu penundaan penjatuan pidana dan pidana penjara yang</p>	<p>c. Syarat a dan b diatas juga dapat diterapkan untuk probation.</p> <p>d. Untuk mereka yang terkena probation syaratnya tidak melakukan pekerjaan/profesi tertentu, tidak berada ditempat tertentu, tidak bertempat tinggal di wilayah tertentu, tidak melakukan kontak dengan orang-orang tertentu, tidak bergabung dengan masyarakat tertentu, tidak memiliki barang-barang untuk tujuan melakukan tindak pidana lain.</p> <p>e. Syarat lainnya adalah membayar jaminan untuk terpidana, melapor secara periodik kepada pejabat pengawas.</p>	<p>Untuk probation masa pengawasan baik untuk pelaku yang sudah dewasa maupun yang anak-anak antara 1-3 tahun (Bab 2 (1) Powers of Criminal Courts Act 1973)</p>	<p>a) Apabila waktu pengawasan yang dilakukan berhasil, pelaku tindak pidana bebas/pidana pengawasan berakhir,</p> <p>b) Apabila selama dalam masa pengawasan pelaku tindak pidana melanggar hukum lagi,</p>
-------------------	--	--	--	--

	<p>ditunda/suspended sentence yang diatur didalam Bab 22-27 Power of Criminal Courts Act 1973.</p>	<p>dewasa maupun anak-anak persetujuannya suka tidaknya dikenakan tindakan probation berupa pengawasan dan bimbingan. Jika suka harus diterangkan bahwa ia harus bersedia datang di kantor pegawai probation jika dipanggil dan bersedia menerima pegawai probation jika didatangi rumahnya. Jadi perintah probation tidak berdasarkan paksaan.</p> <p>(c) Perintah probation tidak dapat dibuat untuk kepentingan pelaku tindak pidana yang sudah berumur 14 tahun kecuali ia menyatakan tidak setuju untuk memenuhi syarat-syarat yang disebut.</p> <p>(2) Syarat Khusus Sebagaimana disebutkan didalam Powers of Criminal Courts Act 1973 :</p>	<p>akan diadili dan diputus mengenai pelanggaran yang baru, sedang putusan yang lama tetap berlaku, yang berarti bahwa masa probationnya yang lama tetap berlaku. Ketentuan ini sudah disampaikan kepada pelaku tindak pidana oleh pengadilan sejak pelaku dinyatakan bersalah dan ditempatkan dibawah pengawasan (Bab 8 Powers of Criminal Courts Act 1973).</p> <p>c) Mengenai pelanggaran yang baru diputus oleh hakim dan dapat terjadi bahwa putusan yang kedua berupa tindakan probation lagi, yang berarti bahwa jangka waktu probationnya bertambah. Khusus untuk anak perpanjangan waktu pengawasan sampai paling lama 3 bulan.</p> <p>d) Jika mengenai pelanggaran yang kedua diputus masuk dalam suatu lembaga untuk waktu tertentu maka putusan probation yang pertama menjadi hapus.</p> <p>e) Jika putusan yang kedua berupa pidana denda maka probation</p>
--	--	--	--

	<p>(a) Pada Bab 2 (5), bahwa pelaku tindak pidana bertempat tinggal di tempat yang ditunjuk oleh pengadilan seperti pelaku tindak pidana yang bekerja ditempatkan dalam probation hostel sedang pelaku tindak pidana yang masih sekolah ditempatkan dalam probation home.</p> <p>(b) Pasal 3 UU tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana menerima pemeliharaan yang bersangkutan dengan keadaan mentalnya. Pelaku tindak pidana harus dipelihara dalam rumah sakit jiwa untuk paling lama 12 bulan, jika sekiranya dari rumah sakit jiwa masih berada dalam jangka waktu probation maka pengawasan oleh pegawai probation diteruskan sampai berakhir. Jika sekiranya dari rumah sakit</p>	<p>yang pertama berjalan terus ditambah harus membayar denda.</p> <p>f) Sekalipun melanggar hukum tidak melanggar salah satu syarat tetapi karena keadaan yang mengkhawatirkan akan melanggar hukum, pegawai probation dapat membawanya kemuka pengadilan untuk mendapat putusan lain daripada probation/memperpanjang jangka waktu probation yang sudah ditentukan dengan mengingat batas 3 tahun.</p> <p>g) Seorang pelaku tindak pidana apabila wanita/gadis harus diawasi oleh seorang probation wanita.</p> <p>h) Memotong dari upah/uang sakunya sebagai bentuk perlakuan secara probation. Apabila pelakunya anak-anak, angsurannya harus dapat dipikul oleh anak dengan bantuan orang tuanya.</p> <p>i) Pengadilan dapat merubah syarat yang ditentukan atas permintaan pegawai probation/pelaku tindak pidana.</p> <p>j) Perubahan syarat tersebut</p>
--	--	---

		<p>jiwa masa probationnya sudah habis dan pelaku tindak pidana perlu diawasi juga berhubungan dengan keadaan mentalnya maka yang mengawasi ialah pegawai sosial dari rumah sakit jiwa.</p> <p>(c) Bab 4 yang memberi wewenang kepada pengadilan menentukan suatu syarat, bahwa si pelaku tindak pidana harus menghadiri suatu hari latihan yang ditentukan didalam perintah tersebut. Pengaruh persyaratan ini adalah, bahwa si pelaku tindak pidana harus hadir sesuai dengan perintah pengawas tidak lebih dari 60 hari dan selama didalam tempat latihan tersebut, ia harus mematuhi perintah-perintah orang yang ditugaskan disitu.</p>		<p>berdasar keadaan yaitu bisa dengan menambahkan syarat baru.</p> <p>k) Khusus untuk anak,</p> <ul style="list-style-type: none"> - jika salah satu syarat dilanggar dapat memasukkan anak dalam Attendance Centre/mengenaikan denda, yang tidak lebih dari 10 pounds, dengan tetap berlakunya tindakan probation. Atau pengadilan mengadili perkaranya yang lama dan dapat mengenakan pidana dan juga mengenai pelanggaran yang baru. - Seorang anak yang sudah berumur 10 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun dan bersalah dalam melakukan suatu pelanggaran hukum yang jika dilakukan oleh seorang dewasa dapat dipidana penjara, dapat dikirim ke Attendance Centre untuk 24 jam, untuk tiap hadir tidak kurang dari 1 jam dan tidak lebih dari 3 jam dan biasanya selama 2 jam. Juga dapat dikirim ke Attendance
--	--	---	--	---

				<p>Centre jika seorang anak, yang diperintahkan dibawah pengawasan pegawai probation dengan putusan pengadilan melanggar perjanjiannya. Tidak diperkenankan pengadilkan mengirim seorang anak ke Attendance Centre jika sudah pernah diputus pidana penjara, pernah dikirim ke Borstal, Detention Centre atau Approved School. Maksud pengiriman ke Attendance Centre ialah untuk mendidik disiplin dalam jangka waktu singkat dan melatihnya untuk belajar dengan tertib dan berfaedah dan memberi rekreasi dan pimpinan yang sehat bersama-sama dengan anak-anak lain secara teratur.</p> <p>l) Jika anak dikenakan pidana penjara atau dikirim ke Borstal/Approved School/Detention Centre maka tindakan probation menjadi hapus.</p> <p>m) Perintah pengawasan juga bisa dilakukan untuk seorang anak</p>
--	--	--	--	---

e. Yugoslavia	Menggunakan sistem sursis simple yaitu penundaan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.	<p>a. Pemberian ganti rugi (restitusi) oleh terpidana, pembayaran ganti rugi (kompensasi), pemenuhan kewajiban lain.</p> <p>b. Penundaan dilakukan dengan syarat berdasarkan keadaan dilakukannya delik, perbuatan terdakwa setelah melakukan delik, dan berdasar riwayat hidupnya.</p>	Pidana penjara atau denda dapat ditunda dalam waktu antara 1 s/d 5 tahun.	<p>yang malas masuk sekolah atas perintah pengadilan.</p> <p>Pasal 49, Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah masa percobaan berakhir, suspended sentence dihentikan. - Apabila selama menjalani pidana bersyarat, terpidana melakukan tindak pidana baru maka pengadilan dapat memperpanjang waktu percobaan atau dapat dikenakan pidana baru. - Atau tidak mencabut pidana bersyarat walaupun terpidana melakukan tindak pidana baru lagi berdasarkan pertimbangan tertentu.
---------------	--	---	---	---

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui adanya 3 jenis atau sistem yang digunakan dalam menerapkan pidana pengawasan (*probation*) atau pidana bersyarat (*suspended sentence*). Sistem itu adalah *Sursis Simple*, *Prova* dan kombinasi keduanya. Negara-negara yang menggunakan sistem *sursis simple* seperti Polandia dan Yugoslavia, sistem *prova* digunakan oleh Inggris sedangkan sistem kombinasi antara sistem *sursis simple* dengan *prova* diterapkan di Denmark dan Portugal. Masing-masing sistem mempunyai ciri tersendiri, seperti sistem *sursis simple* merupakan *mode of sanction/strafmodus* sedang sistem *prova* yang diterapkan di Inggris cirinya berupa tidak adanya *final sentence* karena putusan pembedanaannya ditunda. Bilamana dibandingkan antara ketiganya, maka tampaknya penundaan penjatuhan pidana/sistem *prova* merupakan yang terbaik karena dalam hal ini stigma sosial yang diakibatkan dapat dikurangi seminimal mungkin.³⁹⁾ Melihat ketiga sistem diatas, menurut Muladi, pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP (WvS) merupakan gabungan/kombinasi antara dua sistem yakni sistem Amerika (*Prova*) dan sistem Belgia-Perancis (*Sursis Simple*).⁴⁰⁾ Sedangkan dalam Konsep KUHP Baru menggunakan sistem *sursis simple*.

Mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana pengawasan (*probation*) dan pidana bersyarat (*suspended sentence*), walaupun ada perbedaan namun ada juga persamaannya. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Polandia dengan Denmark dimana keduanya sama-sama mensyaratkan kepada pelaku/terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan/pidana bersyarat untuk berhenti

³⁹⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 157.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hal 192.

menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan yang dinegara lain seperti di Indonesia, Portugal, Yugoslavia dan di Inggris tidak disyaratkan demikian. Persamaan yang lain dapat dilihat pada KUHP Portugal, Denmark dan Yugoslavia yang mengatur mengenai membayar kompensasi yang dinegara Indonesia dan di Inggris tidak disyaratkan demikian. Yang menarik dari perbandingan mengenai syarat-syarat yang diterapkan di beberapa negara tersebut adalah ketentuan untuk adanya persetujuan dari terpidana di Inggris untuk dijatuhkannya probation ini, dimana ketentuan ini tidak ada atau tidak diatur di Indonesia, Denmark, Portugal, Polandia dan Yugoslavia.

Untuk masa pengawasan dimasing-masing negara (Indonesia, Denmark, Polandia, Inggris, Portugal dan Yugoslavia) rata-rata berkisar antara 1, 2, 3 sampai 5 tahun. Masing-masing negara kecuali Indonesia (dalam Konsep KUHP Baru) menetapkan batas minimum dan maksimum dalam penerapan pidana pengawasan. Indonesia yaitu dalam Konsep KUHP Baru hanya menetapkan batas maksimal 3 tahun tanpa adanya batas minimalnya. Padahal menurut penulis, batas minimal ini penting untuk dicantumkan untuk menghindarkan besarnya disparitas dari hakim.

Sedangkan untuk pelaksanaan dari pidana pengawasan atau pidana bersyarat, semuanya sama yaitu pidana pengawasan atau pidana bersyarat itu berakhir apabila masa pengawasan/masa percobaan yang ditentukan tersebut telah berakhir. Sedang perbedaannya, apabila dalam atau selama menjalani syarat-syarat yang ditentukan dilanggar atau tidak dipenuhi, seperti UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa apabila syarat tidak dipenuhi maka

secara otomatis pidana bersyarat dicabut atau berakhir seperti di Denmark. Hal ini berbeda untuk KUHP (WvS) dan Portugal, dimana kepada terpidana yang tidak memenuhi syarat akan diberikan peringatan terlebih dahulu sehingga tidak secara otomatis membatalkan pidana pengawasan/pidana bersyarat tersebut. Seolah-olah disini ada penundaan didalam penundaan.

B.2. Kebijakan Legislatif dalam memformulasikan dan mewujudkan Pidana Pengawasan Yang Akan Datang.

Setelah mencermati uraian diatas disertai dengan tabel perbandingan, terlihat bahwa gerakan untuk menghumanisasikan sanksi pidana khususnya dalam rangka mencari alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan sebenarnya merupakan gerakan yang bersifat universal dan tidak terikat kepada suatu sistem hukum tertentu.

Disamping itu dapat dikemukakan disini, bahwa alternatif pidana perampasan kemerdekaan tersebut (*probation*/pidana pengawasan dan pidana bersyarat/*suspended sentence*) tidak hanya dikemukakan demi kepentingan si pelaku tindak pidana, namun juga demi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka memformulasikan dan mewujudkan ide pidana pengawasan dalam kebijakan legislatif di Indonesia yang akan datang, masih perlu diperhatikan beberapa hal sbb :

B.2.1. Jenis/Sistem Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan yang tercantum dalam Konsep KUHP Baru sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri seperti pidana pokok yang lain (pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda dan pidana kerja sosial), merupakan peningkatan dari KUHP (WvS). Dengan

ditetapkannya pidana pengawasan sebagai sanksi yang berdiri sendiri memberikan kemungkinan bagi hakim untuk lebih sering menggunakan atau menerapkan jenis sanksi ini. Mengingat selama ini (dalam kurun waktu 10 tahun antara tahun 1990-2000) di Kota Semarang hanya terdapat 1 kasus dengan putusan pidana bersyarat yaitu yang terjadi pada tahun 1993 No. Kasus 036/pid/PN/04-93 atas nama Paul Posuma bin Suryanata Setya Dharma yang diputus pidana penjara 6 bulan masa percobaan 1 tahun atas kasus pengguguran kandungan (aborsi).

Berkaitan dengan sistem hukum yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif yang akan datang, menurut penulis sebaiknya pidana pengawasan untuk orang dewasa menganut sistem *sursis simple* yaitu penundaan pelaksanaan pidana (jadi pidananya sudah diputuskan tapi ditunda dalam pelaksanaannya) sedangkan ketentuan pidana pengawasan untuk anak menggunakan *sistem prova* yaitu penundaan penjatuhan pidana. Perbedaan ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa baik secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial.⁴¹⁾ Ide untuk membedakan perlakuan antara anak dengan orang dewasa sudah tersirat dalam Pasal 73 (1) Konsep KUHP Baru yaitu pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi (anak atau dewasa.pen) dan perbuatannya. Dari

⁴¹⁾ Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 13.

bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa pembuat Konsep ingin memberikan batasan-batasan untuk membedakan dalam menghadapi terdakwa yang akan dijatuhi pidana pengawasan. Walaupun ada pembatasan tersebut tapi tampaknya sistem/jenis yang digunakan tetap sama yaitu sistem sursis simple, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 60 Konsep KUHP Baru bahwa "... & pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu **cara pelaksanaan pidana** sebagai alternatif dari pidana penjara." Ketentuan pasal 60 Konsep KUHP Baru (yang ditujukan untuk pelaku dewasa) juga berlaku untuk anak. Hal ini dapat dilihat dan ditegaskan dalam penjelasan pasal 114 bahwa "ketentuan dalam pasal ini mutatis mutandis dengan pidana pengawasan bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)". Oleh karena itu menurut penulis, sebaiknya dalam rangka Ius Constituendum, sistem/jenis yang akan diterapkan untuk anak dalam aturan umumnya, seperti : "Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai cara pemidanaan & Jenis pidana (salah satunya pidana pengawasan) secara khusus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandang dari segi fisik maupun psikis anak berbeda dengan orang dewasa. Untuk menunjukkan adanya perbedaan tersebut, maka penjatuhan pidana untuk anak digunakan sistem prova seperti di Amerika-Inggris dimana anak hanya dinyatakan bersalah (jadi tidak ada *final sentence*), tidak perlu dimasukkan dalam penjara

dan cukup yang kehidupannya sehari-hari diawasi, dibantu dan dibimbing oleh seorang pegawai probation.⁴²⁾ Sedangkan orang dewasa digunakan sistem *sursis simple*. Selain itu, pengaturan mengenai jenis pidana dan ppidanaan secara khusus terhadap anak dikaitkan dengan Konvensi Internasional hak-hak anak. Pemilihan sistem prova untuk anak bisa diterapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Yang perlu mendapat perhatian adalah dalam UU No. 3 Tahun 1997 selain dirumuskan pidana bersyarat juga ada pidana pengawasan. Hal ini seperti yang diterapkan dalam KUHP Denmark, tapi tetap menggunakan 1 istilah yaitu *suspended sentence* sedangkan KUHP Portugal menggunakan istilah *Suspended Sentence* dan *Probation order*. Hanya saja yang membedakan antara UU No. 3 Tahun 1997 dengan KUHP Portugal pada khususnya :

Penerapan pidana pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 1997 masih bias yaitu tidak ditentukan mengenai kapan pidana tersebut dapat dijatuhkan dan untuk tindak pidana apa saja (apakah pidana pengawasan dapat diancam untuk semua Tindak Pidana yang dilakukan anak atau hanya Tindak Pidana tertentu saja?). Sifatnya yang bias ini akan menyulitkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Menurut penulis, dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif yang akan datang, istilah pidana pengawasan ini dipakai untuk menggantikan istilah pidana bersyarat dalam Pasal 29 UU No. 3

⁴²⁾ R.A. Koesnoen, *Praktek Peradilan Anak Di negara-negara yang telah maju*, hal.10.

Tahun 1997 dan menjadi pidana pokok yang berdiri sendiri serta ketentuan untuk pidana pengawasan yang dirumuskan dalam Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1997 hendaknya dihapuskan mengingat ide dicantumkannya pidana pengawasan itu sendiri salah satunya untuk mengantisipasi KUHP yang akan datang sehingga dengan kata lain, sebagai aturan induknya belum ada sehingga dalam penerapannyapun dilapangan akan menemui kesulitan. Oleh karena itu uraian diatas jika dirumuskan menjadi :

Pasal 23 tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal tetap, sedang Pasal 29 :

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat Umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana pengawasan.
- (4) Syarat Khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana pengawasan bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

- (6) Jangka waktu masa pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana pengawasan, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana pengawasan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30 dihapuskan.

Tapi apabila nantinya Konsep KUHP tersebut telah disahkan dan dinyatakan berlaku maka ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997 hendaknya dihapuskan saja mengingat dalam Konsep sudah dirumuskan ketentuan tentang anak.

B.2.2. Syarat Penjatuhan Pidana Pengawasan

Penjatuhan pidana pengawasan didalam Konsep KUHP Baru baik untuk terpidana dewasa maupun terpidana anak-anak dapat ditetapkan syarat-syarat :

1. Terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana.
2. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau
3. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Ketiga syarat diatas sama seperti syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP (WvS) hanya saja dalam konsep KUHP Baru syarat tersebut tidak dibedakan menjadi syarat umum dan khusus. Sedangkan syarat nomor 2 (dua) yaitu “.... harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian” tidak terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997. Mengenai susunan syarat no. 2 dan no. 3 diatas, penulis kurang sependapat, sebab syarat no. 2 tersebut lebih tepat sebagai salah satu bentuk melakukan perbuatan tertentu (syarat 3).

Selain itu, menurut penulis seperti di Inggris, demi keberhasilan pelaksanaan pidana pengawasan ini terpidana seharusnya mempunyai hak untuk dimintai persetujuannya tentang pengenaan pidana pengawasan kepadanya beserta syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan kepadanya apabila syarat-syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhinya. Hal ini amat penting karena jangan sampai kegagalan pidana pengawasan

terjadi karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana bersyarat atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, hendaknya syarat-syarat khusus (syarat yang dikaitkan dengan keadaan-keadaan masing-masing perkara) seperti melakukan perbuatan tertentu untuk diperinci lagi seperti di Polandia. Apabila uraian diatas yang menjadi pendapat penulis dicantumkan dalam Pasal, maka :

Pasal

(1) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat :

- a. Syarat Umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana selama dalam pengawasan.
- b. Syarat Khusus, yaitu : Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Bentuk dari keharusan melakukan perbuatan tertentu tsb. berupa :
 1. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh Tindak Pidana yang dilakukan,
 2. mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan,

3. melakukan pekerjaan atau jasa-jasa pelayanan khusus untuk kepentingan umum,
4. melakukan pekerjaan yang menguntungkan atau mengikuti suatu pendidikan atau latihan keterampilan yang akan bermanfaat baginya untuk memperoleh pekerjaan yang menguntungkan,
5. menghentikan penggunaan alkohol yang berlebihan,
6. menjalani pembinaan medis,
7. menghentikan kunjungan ke tempat-tempat tertentu atau keterlibatan di dalam pergaulan dengan orang-orang atau kelompok tertentu,
8. mematuhi beberapa ketentuan tata tertib selama jangka waktu pengawasan yang akan mencegahnya untuk melakukan tindak pidana yang lain.

(2) Syarat khusus berupa keharusan melakukan perbuatan tertentu yang ditentukan dalam ayat (1) huruf b angka 1 s/d 8 sifatnya bisa alternatif maupun kumulatif sesuai dengan pertimbangan hakim setelah melihat kondisi masing-masing perkara dan memperoleh persetujuan dari terpidana.

Lebih lanjut mengenai Syarat khusus berupa mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh Tindak Pidana yang dilakukan tidak boleh diluar kemampuan terpidana khususnya terpidana anak-anak. Hal ini bisa dicantumkan dalam penjelasan pasal ybs. Dalam

penjelasan pasal tersebut juga bisa ditambahkan dengan ketentuan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana ini.

B.2.3. Masa Pengawasan

Mengenai masa pengawasan, menurut penulis dalam rangka Ius Constituendum pembatasan paling lama 3 tahun baik untuk terpidana dewasa tapi untuk terpidana anak-anak perlu waktu yang lebih lama misal maksimal 5 tahun seperti di Denmark, Polandia dan Yugoslavia agar usaha pembinaan berhasil secara maksimal.

Pidana pengawasan yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dimana masa pengawasannya paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun, menurut penulis kurang sesuai. Hal ini mengingat batas 3 bulan terlalu singkat untuk sebuah pembinaan dan pembimbingan sehingga dapat dipertanyakan tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta bentuk pengawasan itu sendiri seperti apa.

Menurut penulis, batas minimal yang hendaknya dapat diterapkan untuk anak adalah 1 tahun seperti di Portugal, Inggris dan di Yugoslavia. Sehingga apabila ketentuan tersebut dirumuskan dalam sebuah pasal maka berbunyi sbb :

Pasal ...

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Peningkatan waktu pengawasan ini juga berkaitan dengan bentuk-bentuk pelaksanaan pidana pengawasan yang akan diterapkan. Apabila melihat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bentuk-bentuk pelaksanaan pidana pengawasan⁴³⁾, dapat dibedakan antara pengawasan yang bersifat langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa kunjungan yang dilakukan secara berkala dan lapor diri, sedang tidak langsung dapat berupa pengenaan syarat-syarat tertentu bagi anak nakal yang bersangkutan. Bentuk-bentuk pengawasan ini bersifat alternatif, dalam arti kepada Jaksa diberi keleluasaan untuk memilih bentuk yang dinilai paling tepat, sesuai dengan kondisi yang dihadapi khususnya yang menyangkut perkembangan anak yang bersangkutan. Namun demikian, dengan pertimbangan yang sama, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk menerapkan bentuk-bentuk pengawasan tersebut secara kumulatif. Bentuk apapun yang akan dipilih, pertimbangan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut harus

⁴³⁾ Abdul Wahid, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-undangan RI Tahun 1999/2000.

tetap bertumpu pada kepentingan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosial.

Bentuk pengawasan langsung berupa kunjungan berkala ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu secara regular oleh Jaksa, dengan cara mendatangi anak yang bersangkutan ditempat tinggalnya. Dalam kunjungan ini, Jaksa melakukan pertemuan dan wawancara dengan anak nakal yang berada dalam pengawasannya, untuk mengumpulkan segala keterangan yang menyangkut perilaku anak, baik dilingkungan rumah, diluar rumah termasuk dilingkungan sekolahnya. Mengingat kondisi psikologis anak, dalam pertemuan tersebut anak harus didampingi oleh orang tuanya atau orang lain melakukan kekuasaan orang tua. Kehadiran orang tua dalam pertemuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tanggungjawab terhadap pembinaan anak tetap berada pada orang tua. Dalam menghimpun keterangan mengenai perkembangan perilaku anak nakal, perlu dibuka kemungkinan bagi Jaksa untuk melibatkan pihak-pihak lain, seperti Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga di daerah yang bersangkutan, kepala sekolah atau pimpinan tempat anak yang bersangkutan belajar, kepolisian setempat, serta lembaga-lembaga sosial lainnya yang ikut menangani anak yang bersangkutan. Dalam menilai perkembangan perilaku anak, informasi yang dihimpun mencakup keterangan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku, perilaku

anak di lingkungan rumah, di sekolah, dan lingkungan pergaulannya. Segala keterangan mengenai keadaan anak nakal ini hanya dipergunakan untuk kepentingan pembinaan anak nakal yang bersangkutan, karena itu perlu dijaga kerahasiaannya.

Selain kunjungan berkala, bentuk pengawasan langsung lainnya berupa kewajiban melapor diri yang dilakukan secara berkala kepada Jaksa yang menangani pelaksanaan pidana pengawasan. Apabila pelaksanaan kewajiban ini menurut penilaian Jaksa memberatkan anak dan keluarganya, misalnya karena jauh dari kantor kejaksaan, maka kewajiban lapor diri dapat dilakukan di kantor pemerintahan atau kepolisian setempat. Kewajiban lapor diri pada dasarnya anak yang bersangkutan harus hadir, didampingi atau tidak didampingi oleh orang tuanya. Namun apabila terdapat alasan-alasan yang sah, misalnya karena sekolah, sakit, dan lain-lainnya, maka kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang melakukan kekuasaan orang tua. Seperti halnya dalam kunjungan berkala, lapor diri harus dapat menghimpun keterangan mengenai perkembangan perilaku anak, seperti keterangan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku, perilaku anak di lingkungan rumah, di sekolah serta lingkungan pergaulannya.

Mengenai bentuk pengawasan tidak langsung berupa pengenaan syarat-syarat tertentu berupa larangan atau kewajiban,

Misalnya kewajiban mengikuti pendidikan, pelatihan atau kegiatan tertentu seperti kegiatan kepramukaan, atau larangan meninggalkan wilayah tempat tinggal anak yang bersangkutan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan anak yang bersangkutan, seperti larangan meninggalkan wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten atau propinsi. Anak nakal yang sedang menjalani pidana pengawasan dapat terjadi harus pindah tempat tinggal, misalnya karena mengikuti kepindahan orang tuanya atau untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu dalam substansi yang akan diatur, perlu ditentukan kewajiban pihak orang tua atau orang yang melakukan kekuasaan orang tua, untuk melaporkan kepindahan tersebut kepada Jaksa yang melakukan pengawasan. Apabila tempat tinggal yang baru dari anak berada di luar daerah hukum kantor kejaksaan yang melakukan pengawasan, maka laporan kepindahan tersebut oleh Jaksa diteruskan kepada kantor Kejaksaan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang baru, disertai permintaan untuk melanjutkan pengawasan terhadap anak yang bersangkutan. Tujuan ketentuan ini dimaksudkan agar pembinaan terhadap anak yang bersangkutan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dengan memperhatikan perkembangan perilaku anak, pelaksanaan pidana pengawasan dipertimbangkan tidak perlu dilakukan sampai masa pidananya habis. Apabila menurut pendapat dan pertimbangan Jaksa anak nakal tersebut telah menunjukkan perilaku yang baik, maka

kepada kejaksaan diberi kewenangan untuk mengusulkan, dengan disertai pendapat dan pertimbangannya, kepada hakim pengawas pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak nakal untuk menghentikan pelaksanaan pidana. Namun demikian, apabila selama masa menjalani pidana pengawasan, anak nakal tersebut ditangkap atau ditahan karena melakukan tindak pidana lagi, maka pelaksanaan pidana pengawasan ditangguhkan. Dimuka dikemukakan bahwa selama menjalani pidana pengawasan, anak nakal yang bersangkutan memperoleh bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bimbingan dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan pidana pengawasan yaitu guna memperbaiki perilaku anak yang bersangkutan dalam menjalani kehidupan yang normal dan wajar serta tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian dalam menentukan bentuk-bentuk pelaksanaan pembimbingan bertumpu pada kepentingan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Pembimbing kemasyarakatan yang berwenang melakukan pembimbingan terhadap anak nakal adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, gagasan substantif yang dikemukakan dimuka seperti kewajiban Jaksa untuk menyampaikan putusan pengadilan serta berkas perkara, dalam hal tempat tinggal anak berada di luar

daerah hukumnya, kewajiban dalam hal terjadi kepindahan, dan kewajiban berkoordinasi, juga berlaku sejajar sebagai gagasan substantif dalam pengaturan kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan. Bentuk dan tata cara Pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan lebih ditekankan pada pembentukan pribadi anak sehingga anak dapat menjalani kehidupan sosialnya secara wajar sebagaimana anak lainnya. Bentuk-bentuk bimbingan yang diberikan, seperti halnya bentuk pengawasan, dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi anak yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau di sekolah, atau secara tidak langsung, misalnya dengan mengirimkan bahan-bahan bimbingan atau meminta anak yang bersangkutan datang ke kantor Pembimbing Kemasyarakatan. Mengingat tujuan bimbingan yang hendak dicapai diatas, maka materi bimbingan dapat berupa pengajaran tentang keagamaan, pendidikan, keterampilan, budi pekerti serta soal-soal yang berkaitan dengan pergaulan. Oleh karena itu, pembimbingan dapat dilakukan secara bersama-sama (berkelompok) dengan melibatkan anak-anak lainnya. Pembimbingan yang dilaksanakan di kantor hanya dilakukan apabila tidak memberatkan anak dan keluarganya, misalnya tidak mengganggu kegiatan sekolah atau tidak membebani biaya secara berlebihan. Pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan anak merupakan salah satu teknik pembimbingan

yang dapat pula dikembangkan. Untuk lebih menjamin efektifitas pembimbingan maka pelaksanaan pembimbingan harus dilakukan secara berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terkait, misalnya dengan Departemen Pendidikan, Departemen yang menangani Masalah Sosial, Departemen Agama. Disamping itu, Pembimbing Kemasyarakatan dapat pula berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial yang kegiatannya khusus bergerak menangani masalah anak. Pembimbingan dilakukan selama anak nakal menjalani masa pidana pengawasan. Oleh karena itu apabila pelaksanaan pidana ini dihentikan sebelum masa hukumannya berakhir, misalnya karena perilaku anak yang bersangkutan dinilai sudah menunjukkan peningkatan ke arah perbaikan, maka berakhir pula pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari uraian bentuk-bentuk pelaksanaan pidana pengawasan diatas menurut penulis kurang memenuhi tujuan pemidanaan khususnya tentang memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pembinaan yang dimaksud meliputi upaya rehabilitasi dan resosialisasi. Untuk terpidana anak-anak yang berusia antara 8 tahun – 12 tahun pembimbingan seperti diatas menurut penulis relevan untuk diterapkan tapi untuk terpidana berusia antara 12 tahun – 18 tahun perlu dipikirkan bentuk-bentuk pidana pengawasan yang lain seperti di Inggris. Pembimbingan yang diterapkan di Inggris berupa

pekerjaan di bidang pertanian, pembangunan perumahan dan gedung-gedung dan penggarapan tanah. Seperti diatas dapat diterapkan di Indonesia, tapi bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak dan hendaknya pilihannya bermacam-macam seperti bercocok tanam, montir, sablon, menjahit, memasak dsb. Sebab dengan cara seperti itu anak sekaligus dibekali keterampilan yang dapat di pergunakan untuk mencari uang.

B.2.4. Pelaksanaan Pidana Pengawasan.

1. Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pasal 72 Konsep KUHP disebutkan bahwa “terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan”. Ketentuan Pasal ini menurut penulis melahirkan pendapat yang sifatnya tidak setuju seperti yang dikemukakan oleh Muladi. Alasan beliau tidak setuju karena hal tersebut sebagai bentuk kemunduran bilamana dibandingkan dengan pengaturan di dalam WvS. Didalam WvS yang menjadi pedoman bukan ancaman pidana, melainkan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim (penjara satu tahun, kurungan/denda).

Kritik serupa juga datang dari Guru Besar dari Belanda yaitu N. Keijer, bahwa adanya “batas” pidana 7 (tujuh) tahun, Pasal 72 dalam Konsep Tahun 2000 yang dikaitkan pada ancaman pidana, sebaiknya dikaitkan pada putusan hakim. Atas kritikan 2 pakar

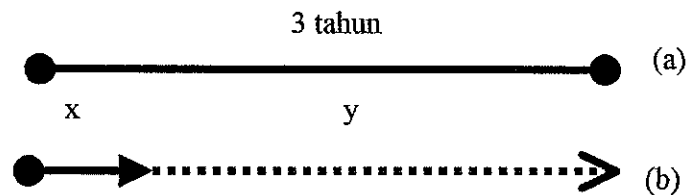
diatas, penulis setuju apalagi setelah melihat pasal-pasal perumusan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana pengawasan, seperti Pasal 493 ayat (3) yang sebetulnya tidak jauh berbeda akibat yang ditimbulkannya namun ancaman pidananya lebih berat 3 tahun daripada ayat sebelumnya sehingga jika melihatnya pada ancaman pidana pada setiap pasal maka merupakan suatu kemunduran dan cenderung untuk terjadinya diskresi semakin besar. Oleh karena itu batas 7 tahun itu seharusnya berdasar/dikaitkan dengan putusan hakim. Sehingga jika dirumuskan dalam kebijakan legislatif yang akan datang, menurut penulis menjadi “Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 7 tahun”.

Mengenai pelaksanaan pidana pengawasan itu sendiri menurut penulis, khususnya untuk terpidana dewasa bisa dilakukan “*combined incarceration and probation*” atau juga disebut istilah “*mixed or split sentence*”⁴⁴⁾ sebagai bentuk “*Shock probation*”.

2. Apabila dalam pelaksanaan pidana pengawasan dikemudian hari ada syarat yang dilanggar, baik itu syarat umum maupun syarat khusus, Pasal 73 ayat (5) Konsep KUHP Baru disebutkan bahwa masa pengawasannya diperpanjang yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang

⁴⁴⁾ Paul C. Friday, David M. Peterson and Harry E. Allen, *Shock Probation: A New Approach to Crime and Prospects*, ed. by David M. Petersen & Charles W. Thomas, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, hl. 247.

belum dijalani. Apabila ketentuan mengenai memperpanjang pidana (kalau melakukan pelanggaran) dapat dibuatkan bagan sebagai ilustrasi penjatuhan pidana oleh hakim (dengan menggunakan ancaman maksimal pidana pengawasan yaitu 3 tahun) :



Keterangan :

(a) Masa pengawasan yang dijatuhkan oleh hakim

(b) x = masa pengawasan yang baru dijalani yaitu 1 tahun

y = masa pengawasan yang belum dijalani yaitu 2 tahun

Tetapi setelah menjalani masa pengawasan 1 tahun, terpidana menunjukkan gejala yang membawa dirinya ke arah pelanggaran maka pidananya dapat diperpanjang yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani (jika berdasarkan contoh diatas maka maksimum pidana baru yang akan dijatuhkan oleh hakim adalah 4 tahun)

Apabila hakim memutuskan untuk memperpanjang misalnya $2 \times$ masa pengawasan yang belum dijalani (2 tahun) maka lama pidana baru yang harus dijalani $= 2 \times 2 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$. Total keseluruhan pidana yang di jalani terpidana (1 tahun yang sudah

dijalani sebagai putusan pidana yang pertama kali + 4 tahun masa pidana yang baru) adalah 5 tahun.

Yang pasti menurut hemat penulis, 4 tahun itu tetap berupa pidana pengawasan. Dan penentuan untuk mengubah penetapan jangka waktu pengawasan oleh Hakim pengawas setelah sebelumnya mendengar para pihak. Ketentuan untuk memperpanjang masa pengawasan bagi terpidana dewasa menurut penulis kurang efektif. Sebaiknya dalam kebijakan legislatif yang akan datang ditegaskan bahwa apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dan disetujui oleh terpidana tersebut dilanggar maka pidana pengawasannya dicabut. Apabila hal ini dirumuskan dalam sebuah Pasal maka berbunyi :

Pasal

Apabila dikemudian hari syarat-syarat yang telah ditentukan dan disetujui untuk dijalani dilanggar oleh terpidana maka secara otomatis pidana pengawasan dicabut untuk selanjutnya diterapkan pidana penjara yang sebelumnya ditunda.

Apabila terpidana anak-anak yang melakukan pelanggaran atas syarat-syarat yang telah ditentukan maka ketentuan untuk memperpanjang masa pengawasan, menurut penulis bisa diterapkan. Tapi seperti di KUHP Portugal, menurut penulis selain memperpanjang masa pengawasan, sebaiknya juga diberikan alternatif lainnya seperti teguran di muka umum dan

Uang jaminan. Teguran di muka umum misalnya bisa dihadapan Ketua RT, Ketua RW maupun dihadapan kelompok tempatnya dirawat. Mengenai pembayaran uang jaminan, pertama-tama penulis lebih setuju jika diganti dengan denda, sebab apabila menggunakan istilah uang jaminan mengandung asumsi bahwa pembayaran uang jaminan tersebut pemenuhannya bisa tidak oleh anak ybs. melainkan oleh orang lain misalnya orang tuanya yang kedudukannya sebagai penjamin. Hal ini berbeda dengan istilah denda. Menurut penulis, dalam rangka mendidik anak tersebut sebaiknya dalam membayar denda sebaiknya berasal dari uang saku atau upah yang diterima oleh anak sendiri (apabila anak diwajibkan syarat berupa melakukan pekerjaan tertentu dan atas pekerjaan itu dia mendapatkan upah). Jika mengingat tujuan pemidanaan, dalam hal denda dibayar oleh orang tuanya, tujuan tersebut tidak tercapai. Hal ini dikarenakan, anak tidak akan menjadi jera dan setiap kali akan mengulangi perbuatannya, karena orang tua yang akan melunasi dendanya.⁴⁵⁾ Sebaiknya jika memang pidana denda itu dimaksudkan sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka adalah tetap jika denda tersebut dibayar oleh anak yang bersangkutan sendiri dari hasil uang yang diperoleh dari jerih payah ia bekerja. Kiranya akan lebih bermanfaat bagi apa yang dituju dengan "*Individualized justice*" itu sehingga

⁴⁵⁾ Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 99.

mendidik dan membuat jera, untuk selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatan semacam itu lagi. Hal ini barangkali yang membedakan dengan ketentuan hukum di Inggris dimana Inggris membolehkan pemberian bantuan dari orang tua atau orang lain untuk pemenuhan kewajiban tersebut. Menurut penulis, pemenuhan kewajiban tanpa bantuan orang lain atau orang tua untuk tujuan si anak menjadi belajar bertanggungjawab dan sanksi ini benar-benar dirasakan oleh anak sehingga tidak tergantung kepada orang tua atau orang lain.

3. Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Oleh karena itu penulis mengusulkan diatas, supaya ditetapkan batas minimal untuk masa pengawasan tidak hanya batas maksimalnya saja. Hal ini untuk mengantisipasi bila terjadi pengurangan masa pengawasan (memperpendek masa pengawasan). Apabila ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal maka berbunyi :

Pasal

- (1) Apabila selama menjalani masa pengawasan terpidana sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan pertama menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai

Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.

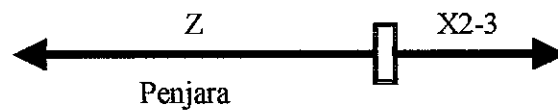
(2) Rincian perhitungan memperpendek masa pengawasan, yaitu :

- a. Terpidana yang telah menjalani pidana pengawasan selama 6 bulan sampai dua belas bulan memperoleh keringanan masa pengawasan dua bulan.
- b. Terpidana yang telah menjalani pidana pengawasan setelah tahun kedua memperoleh keringanan masa pengawasan 3 bulan.
- c. Terpidana yang telah menjalani pidana pengawasan setelah tahun ketiga memperoleh keringanan masa pengawasan 4 bulan.

Batasan ini terinspirasi dari Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) bagi narapidana yang berkelakuan baik.

4. Pasal 74 ayat (1) Konsep KUHP Baru Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Pasal 74 Ayat (2) Konsep KUHP Baru, jika terpidana dijatuhi pidana

penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. Apabila ketentuan dari Pasal 74 ayat (2) digambarkan dengan bagan maka :



Keterangan :

Z = Pidana penjara

X2-3 = Masa pengawasan yang belum dijalani dan ditunda untuk dilanjutkan kembali setelah terpidana menjalani pidana penjara sebagai pidana II.

Jadi dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terpidana menjalani pidana perampasan kemerdekaannya didalam lembaga (sebagai bentuk sanksi pidana yang baru) untuk kemudian setelah keluar menjalani sanksi sebelumnya yaitu pidana pengawasan (X2-3) yang belum selesai dijalani tapi sudah melakukan tindak pidana lagi.

Terhadap pasal 74 ayat (2) Konsep KUHP Baru penulis kurang setuju mengingat efektivitas dari pengawasan yang akan dijalani kembali setelah berakhirnya pidana penjara yang ditunda sebelumnya. Oleh karena itu seperti ketentuan untuk anak di

Inggris, menurut penulis perlu dicantumkan dalam salah satu pasal bahwa terpidana baik dewasa maupun anak-anak apabila selama masa pengawasan melakukan tindak pidana dan diputus masuk dalam suatu lembaga untuk waktu tertentu maka putusan probation/pidana pengawasan yang pertama menjadi hapus.

5. Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Suatu hal yang sangat strategis kedudukannya di dalam pelaksanaan pidana pengawasan adalah petugas pembina, yakni semacam *probation officers* di Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Mardjono, apabila pidana pengawasan ingin diberlakukan secara efektif, maka salah satu dari 3 hal yang perlu dipersiapkan adalah tenaga-tenaga terdidik (melalui Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan sekolah-sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial atau melalui pendidikan di Jurusan Kriminologi) yang dapat menjadi pengawas dan pembimbing bagi para terpidana muda ini.⁴⁶⁾ Dua hal lain yang perlu dipersiapkan supaya pidana pengawasan diperlakukan secara efektif, pertama, adanya pembatasan kepada para hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap seorang pelaku usia muda. Kedua, mempersiapkan masyarakat (termasuk para pengusaha/majikan)

⁴⁶⁾ Mardjono Reksodiputro, *Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usia Muda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal. 7.

untuk mendukung “integrasi” para pelaku ini dalam komunitas mereka, termasuk kesediaan mereka yang terpilih untuk menjadi “pengawas/pembimbing sukarela” (*voluntary probation officer*). Jabatan petugas pembina ini merupakan profesi yang memerlukan persyaratan-persyaratan cukup tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan latar belakang pendidikan. Dalam hal ini diutamakan bagi mereka yang mempunyai bidang studi ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu tentang perilaku manusia serta pengalaman kerja di dalam pekerjaan-pekerjaan sosial.

Di Amerika Serikat persyaratan pendidikan untuk *Probation Officer* bervariasi antara tingkatan master (*master's degree*), tingkatan sarjana muda (*bachelor's degree*) dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (*high school education*).

Untuk Indonesia perlu adanya penyesuaian dengan kondisi sosial yang ada. Menurut hemat penulis, persyaratan pendidikannya harus lulusan S1 atau minimal setingkat dengan Sarjana Muda atau yang masih menjalani Kuliah Kerja Nyata. Hal ini selain bertujuan mengurangi tingkat pengangguran dari kalangan para sarjana juga menambah tenaga pengawas apabila pidana ini sudah dijalankan.

Mengingat bahwa petugas pembina tersebut berasal dari lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda, maka diperlukan pendidikan khusus yang seragam dalam bidang-

bidang studi yang berkaitan dengan tugasnya sebagai petugas pembina, sebelum yang bersangkutan menjalankan tugasnya.

Didalam menjalankan tugasnya, maka petugas pembina ini sebaiknya mendapatkan bantuan dari para sukarelawan yang mempunyai pengalaman dengan pelaku tindak pidana. Mereka ini sangat penting untuk menunjang program-program perbaikan terpidana di masyarakat, sebab seringkali persoalan-persoalan yang timbul tidak mungkin dipecahkan oleh petugas pembina sendiri karena mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini masalah-masalah yang menyangkut psikologi dan psikiatri, sebab mereka inilah yang dapat mematahkan hambatan komunikasi yang ada di antara manusia-manusia dengan latar belakang yang bermacam-macam. Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan para petugas pembina, maka harus ada kerjasama antara lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang di dalam pembinaan petugas pembina dengan lembaga-lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi, sebab dengan mengkombinasikan pengalaman kerja mereka serta latihan-latihan yang telah diperolehnya dengan ilmu pengetahuan kemanusiaan dan perilaku, maka diharapkan hasil yang diperolehnya di dalam tugas-tugas pembinaan akan lebih efektif.

Untuk menjamin adanya sistem pengawasan yang memadai maka beban pengawasan tidak boleh berlebihan, karena beban pengawasan untuk tiap-tiap kasus ini akan mencakup pemahaman terhadap variabel-variabel yang beranekaragam tergantung pada tipe-tipe pelaku tindak pidana serta tugas-tugas yang dibebankan kepada terpidana yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat pengawasan. Didalam kasus-kasus tertentu, maka sistem pengawasan dan pembinaan kadang-kadang harus dilengkapi oleh bimbingan-bimbingan yang bersifat kelompok dan program-program pengobatan.

Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif, seringkali di dalam kasus-kasus tertentu dibutuhkan fasilitas-fasilitas jasa yang tersedia di masyarakat. Petugas pembina bilamana perlu harus selalu melibatkan diri dalam fasilitas-fasilitas ini demi kepentingan yang diawasi dan dibina. Untuk dapat meningkatkan daya guna pengawasan khusus dalam rangka resosialisasi terpidana secara optimal, pemerintah harus memberikan subsidi untuk menunjang perkembangan lembaga-lembaga reklasering swasta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ide dasar perlunya pidana pengawasan direkomendasikan sebagai salah satu sanksi non custodial dalam kebijakan legislatif di Indonesia terlihat dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan Konsep KUHP Baru. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ide yang melandasi penetapan pidana pengawasan dalam UU tersebut adalah untuk mengantisipasi KUHP yang baru, menghindarkan anak dari lembaga pemasyarakatan dan memberikan perlindungan/pendidikan bagi anak. Dalam Konsep KUHP Baru, ide yang melandasinya berupa menghindarkan terpidana dari pidana penjara, memungkinkan terpidana untuk bekerja yang secara ekonomis menguntungkan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas, mencegah terjadinya stigma, membebaskan terpidana dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi.
2. Ruang Lingkup kebijakan formulasi dalam mewujudkan pidana pengawasan meliputi "Jenis/Sistem Pidana Pengawasan", "Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Pengawasan", "Masa Percobaan/Masa Pengawasan" dan "Pelaksanaan Pidana pengawasan" baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

- a. Kebijakan legislatif dalam memformulasikan dan mewujudkan pidana pengawasan pada saat ini.

1. Jenis/Sistem Pidana Pengawasan/Pidana bersyarat

Pidana Pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan Konsep KUHP Baru menggunakan sistem sursis simple. Sedangkan pidana bersyarat dalam KUHP(WvS) merupakan gabungan/kombinasi antara dua sistem yakni Sistem Amerika (Prova) dan sistem Belgia-Perancis (Sursis Simple).

2. Syarat-syarat untuk dijatuhi pidana pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan pidana bersyarat dalam KUHP terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Sedangkan dalam Konsep KUHP Baru tidak ada pembagian syarat umum dan syarat khusus tersebut.

3. Masa percobaan untuk pidana bersyarat dalam UU No. 3 Tahun 1997 paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Untuk masa percobaan dalam KUHP (WvS) disebutkan bahwa bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama adalah 3 tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 tahun. Sedangkan masa pengawasan untuk pidana pengawasan dalam Konsep KUHP Baru dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 tahun.

4. Pelaksanaan Pidana pengawasan dan pidana bersyarat dalam UU No. 3 Tahun 1997, pidana bersyarat dalam KUHP, pidana pengawasan dalam Konsep KUHP Baru sama-sama berakhir

apabila masa pengawasan yang ditentukan telah selesai dijalani. Tapi apabila dalam masa pengawasan/masa percobaan tersebut terpidana melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang dijatuhkan maka menurut KUHP (WvS) kepada terpidana supaya diberi peringatan atau pidananya dijalankan. Dalam Konsep KUHP Baru disebutkan jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka masa pengawasannya diperpanjang yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pengawasan yang belum dijalani. Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tidak dirumuskan akibat dari tidak dipenuhinya syarat-syarat yang dijatuhkan.

- b. Kebijakan legislatif dalam memformulasikan dan mewujudkan pidana pengawasan pada masa yang akan datang, setelah dilakukan studi perbandingan dengan KUHP Asing dalam rangka Ius Constituendum, maka :

1. Jenis/Sistem Pidana Pengawasan

Berkaitan dengan sistem pidana pengawasan yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif yang akan datang, pidana pengawasan untuk orang dewasa menganut sistem sursis simple yaitu penundaan pelaksanaan pidana (jadi pidananya sudah diputuskan tapi ditunda dalam pelaksanaannya) sedangkan ketentuan pidana pengawasan untuk anak menggunakan sistem prova yaitu penundaan penjatuhan pidana. Ketentuan ini

hendaknya dicantumkan dalam aturan umum. Pemilihan sistem prova untuk anak ini juga dapat diterapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997.

2. Syarat Penjatuhan Pidana Pengawasan

- a) Syarat-syarat khusus (syarat yang dikaitkan dengan keadaan-keadaan masing-masing perkara) seperti melakukan perbuatan tertentu diperinci menjadi mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana yang dilakukan; mengajukan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan; melakukan pekerjaan atau jasa-jasa pelayanan khusus untuk kepentingan umum dll.
- b) Syarat khusus tersebut sifatnya bisa alternatif maupun kumulatif sesuai dengan pertimbangan hakim setelah melihat kondisi masing-masing perkara dan memperoleh persetujuan dari terpidana.
- c) Mengenai Syarat khusus berupa mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh Tindak Pidana yang dilakukan, tidak boleh diluar kemampuan terpidana khususnya terpidana anak-anak.

3. Masa Pengawasan

Mengenai masa pengawasan, dalam rangka *Ius Constituendum* pembatasan paling lama 3 tahun baik untuk terpidana dewasa tapi untuk terpidana anak-anak perlu waktu yang lebih lama misal

maksimal 5 tahun seperti di Denmark, Polandia dan Yugoslavia agar usaha pembinaan berhasil secara maksimal.

Batasan 5 tahun ini bisa juga diterapkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan batas minimalnya 1 tahun.

4. Pelaksanaan.

- a) Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dan disetujui oleh terpidana tersebut dilanggar maka pidana pengawasannya dicabut. Untuk terpidana anak-anak yang melakukan pelanggaran atas syarat-syarat yang telah ditentukan dapat memperpanjang masa pengawasan atau diberikan alternatif lainnya seperti teguran di muka umum dan Uang jaminan.
- b) Penetapan batas minimal masa pengawasan untuk mengantisipasi bila terjadi pengurangan masa pengawasan (memperpendek masa pengawasan).
- c) Adanya kerjasama antara lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang di dalam pembinaan petugas pembina dengan lembaga-lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi, sebab dengan mengkombinasikan pengalaman kerja mereka serta latihan-latihan yang telah diperolehnya dengan ilmu pengetahuan kemanusiaan dan perilaku, maka diharapkan hasil yang diperolehnya di dalam tugas-tugas pembinaan akan lebih efektif.

B. Saran

1. Dalam rangka penyusunan KUHP, hendaknya diadakan peninjauan terhadap kebijakan legislatif yang mencantumkan pidana pengawasan baik dalam UU No. 3 Tahun 1997 maupun dalam Konsep KUHP sendiri sebab sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh, masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaharui atau direvisi.
2. Hendaknya peraturan pelaksanaan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan seharusnya segera dikeluarkan untuk efektivitas dari penerapan sanksi pidana pengawasan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Abadinsky, Howard, *Probation and Parole : Theory and Practice*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995.
- , *Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (Sixth Edition), West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, U.S.A.
- Barnes and Teeters, *New Horizons in Criminology*, Prentice Hall of India Private Ltd., New Delhi, 1966.
- Bartollas, Clemens and Stuart J. Miller, *The Juvenile Offenders: Control, Correction and Treatment*, Holbrook Press, 1978.
- Centre for human Rights Geneva, *A Compilation of International Instruments* (Volume 1 Universal Instruments), United Nation New York, 1993.
- Criminal Code of Yugoslavia, *Servis Saveza Udruzenja pravnika Jugoslancje* Beograd, Proleterskih brigada 1974.
- Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, *Rancangan KUHP 1999-2000*.
- Dokumen, Fifth United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, UN., New York, 1975.
- Dokumen, Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.87/14/Rev.I, Caracas Venezuela, 25 Agustus- 5 September 1980.
- Dokumen, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders, A/NONF-121/22/Rev.1, Milan-Italia, 26 Agustus- 6 September 1985.

Friday, Paul C. , David M. Peterson and Harry E. Allen, *Shock Probation : A New Approach to Crime and Prospects*, ed. By David M. Petersen & Charles W. Thomas, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Garuda Nusantara, Abdul Hakim dan Nasroen (Yosabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.

Glueck, Sheldon, *Principles of a Rational Code*, dalam buku Grupp, Stanley E., *Theories of Punishment*, 1971.

Group, Stanley E., *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, 1971.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

Gorner, A Gryan, *Black's law Dictionary*, United States of America, West, Seventh Edition, 1999.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995.

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Hart, Harold D., *Punishment: For & Against*, Hart Publishing Company, Inc., New York City, 1971.

Hartono, Sunaryati, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1984.

-----, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan VI, 1989.

Hoefnagels, Peter, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.

-----, *The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology*, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 1984.

Hood, Roger and Richard Sparks, *Key Issues in Criminology*, Word University Library, London, 1970.

Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972.

Ketetapan MPR-RI Tahun 1999, termasuk GBHN-RI 1999-2004, Penerbit Pabelan, Surakarta.

Koeswadji, Hermien Hadiety, *Perkembangan macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Koesnoen, R.A., *Praktek Peradilan Anak di negara-negara yang telah maju*, Lokakarya tentang Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDIP tanggal 8 s/d 10 Agustus 1977 di Semarang.

-----, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961.

Kratcoski, Peter C. and Lucille Dunn Kratcoski, *Juvenile Delinquency Second Edition*.

Lamintang and D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit Pioner, Bandung, 1992.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

Mattulada, *Lingkungan Hidup Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan I, 1994.

Mays, G. Larry and L. Thomas Winfree, *Juvenile Justice*, The Mc Graw Hill Companies, Inc., United States of America, 2000.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajke Sarasin, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII, 1996.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.

-----, *Masalah-Masalah Hukum No. 3 Tahun XVI 1986*.

-----, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 24 Pebruari 1990.

-----, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nawawi, Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Edisi Kedua, Semarang, 1996.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP 2001.
- Neier, Aryeh, *Crime and Punishment A Radical Solution*, A Scarborough Book Stein And Day, Publisher, New York, 1978.
- Ohoitumur, Yong, *Teori Etika tentang Hukum Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Anak, Sekretariat Jendral DPR RI.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- , *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- , *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2 Seri Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono, *Jenis-jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru*, Makalah pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, BPHN, tanggal 5-7 Pebruari 1986 di Jakarta.

- , *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Ross, Alf, On Guilt, *Responsibility and Punishment*, Steven & Sons ltd., London, 1975.
- Sahetapy, J.E., *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 1994.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Seri Hukum Pidana I)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Kelima, 1987.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1973.
- , *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Semarang, 1991.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1996.
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I : Cetakan Keempat, Jakarta, 1994.
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 1976.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Kertas Kerja dalam Lokakarya "Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional" Buku I, BPHN, Jakarta, 1982.

- , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 1981.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Taft, Donal and R.W. England, *The Criminology*, Macmillan Co, New York, 1964.
- The Greenland Criminal Code, Fred B. Rothman & Co., New York, 1971.
- The American Law Institute, Model Penal Code Official Draft And Explanatory Notes, as Washington, D.C., 1985.
- The Seminar-cum-Field Study on Programmes to Rehabilitate Juvenile Delinquents in the ESCAP Region, 6-24 Januari 1992, Collaboration with the United Nations Asia and For East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI).
- The Penal Code of the Polish People's Republic by William S. Kenny Attorney Criminal Division Limited States Department of Justice.
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Penerbit Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Wahid, Abdul, Laporan Akhir Tim Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Pengawasan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-undangan RI Tahun 1999/2000.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Wise, Edward and Gerhard O.W. Mueller, *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois, 1975.

Undang-Undang :

UU No. 3 Tahun 1997

KUHP Moeljatno